

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kepada Allah SWT selalu kami panjatkan, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya Laporan Hasil Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2011 telah dapat diselesaikan. Dalam laporan ini dimunculkan gambaran fasilitas kesehatan di Provinsi Riau, khususnya pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Pelaksanaan pengumpulan data Rifaskes 2011 dilakukan pada bulan Mei-Desember 2011, di 33 Provinsi. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) mengerahkan sekitar 4000 enumerator yang menyebar di seluruh kabupaten/kota, seluruh peneliti Balitbangkes, dosen Poltekkes, Jajaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perguruan Tinggi.

Proses manajemen data mulai dari data dikumpulkan, kemudian dientri ke komputer, selanjutnya data *cleaning* dilakukan di Badan Litbangkes. Proses pengumpulan data dan manajemen data ini sungguh memakan waktu, stamina dan pikiran, sehingga tidaklah mengherankan bila diwarnai dengan dinamika kehidupan yang indah dalam dunia ilmiah.

Perkenankanlah kami menyampaikan penghargaan yang tinggi serta terima kasih yang tulus atas semua kerja cerdas dan penuh dedikasi dari seluruh peneliti, litkayasa dan staf Balitbangkes, rekan sekerja dari BPS, para pakar dari Perguruan Tinggi, Penanggung Jawab Operasional dari jajaran Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, seluruh enumerator serta semua pihak yang telah berpartisipasi mensukseskan Rifaskes. Simpati mendalam disertai doa kami haturkan kepada mereka yang mengalami kecelakaan sewaktu melaksanakan Rifaskes.

Secara khusus, perkenankan ucapan terima kasih kami dan para peneliti kepada Ibu Menteri Kesehatan yang telah memberi kepercayaan kepada kita semua, anak bangsa, dalam menunjukkan karya baktinya.

Kami telah berupaya maksimal, namun pasti masih banyak kekurangan, kelemahan dan kesalahan. Untuk itu kami mohon kritik, masukan dan saran, demi penyempurnaan Rifaskes dimasa yang akan datang.

Billahit taufiq walhidayah, wassalamu'alaikum wr. wb.

Jakarta, 25 Desember 2012
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

DR. dr. Trihono, MSc.

RINGKASAN EKSEKUTIF

HASIL RISET FASILITAS KESEHATAN (RIFASKES) PUSKESMAS 2011 BADAN LITBANGKES, KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2011 merupakan salah satu riset kesehatan nasional yang secara berkala dilakukan oleh Badan Litbangkes, Kemkes RI, disamping Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Riset Khusus Kesehatan (Rikus). Rifaskes 2011 dilaksanakan untuk memperoleh informasi terkini tentang *supply* pelayanan kesehatan, yaitu fasilitas Rumah Sakit Umum (RSU) Pemerintah/Pemerintah Daerah (Pemda), Puskesmas dan Laboratorium Klinik Mandiri (LKM). *Supply* tersebut termasuk gedung, persediaan air bersih, listrik, kendaraan, peralatan, obat, Sumber Daya Manusia (SDM), pedoman, pelatihan, anggaran dan sebagainya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan di RSU Pemerintah/Pemda, Puskesmas dan LKM. Rifaskes 2011 melakukan pengukuran dan pengamatan data primer serta penelusuran data sekunder untuk mengetahui situasi terkini kecukupan dan ketepatan *supply* pada institusi-institusi pelaksana upaya kesehatan tersebut diatas.

Kerangka pikir riset ini dikembangkan atas dasar konsep *Blum* (1974), *Donabedian* (2002), *Jacob* dan *WHO* 2000. Pada prinsipnya, pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan ini dilakukan didalam dan diluar gedung institusi pelayanan kesehatan dengan kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Semua kegiatan tersebut mempunyai komponen asupan (*input*), proses, luaran (*output*) dan dampak (*outcome*). Komponen asupan inilah yang menjadi fokus utama Rifaskes 2011. Disamping itu, dalam Rifaskes 2011 ini dikumpulkan pula data esensial yang berhubungan dengan komponen proses dan luaran dari berbagai jenis upaya kesehatan yang diselenggarakan baik oleh Puskesmas, RSU Pemerintah/Pemda maupun LKM.

Dengan demikian, Rifaskes 2011 memberikan gambaran/potret dan pemetaan ketersediaan *supply* di Puskesmas, RSU Pemerintah/Pemda dan LKM, baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Gambaran/potret dan pemetaan ketersediaan *supply* tersebut tentunya disesuaikan dengan fungsi yang diemban oleh ke tiga institusi pelaksana upaya kesehatan tersebut. Diharapkan riset ini juga akan menghasilkan Indeks Fasilitas dan Indeks Kinerja RSU Pemerintah/Pemda, Puskesmas dan LKM. Rifaskes 2011 mulai dilaksanakan sejak 2010. Tahap persiapan dilakukan pada tahun 2010, sedangkan pelaksanaan dilakukan pada tahun 2011 dan dilanjutkan dengan sosialisasi hasil dan analisis lanjut pada tahun 2012. Rifaskes 2011 dilaksanakan dengan menggunakan dana yang berasal dari DIPA Badan Litbangkes Kementerian kesehatan RI.

Laporan ini merupakan laporan hasil dari data fasilitas Puskesmas yang telah dikumpulkan melalui Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) Puskesmas 2011. Sedangkan hasil Rifaskes 2011 untuk RSU Pemerintah/Pemda dan LKM dilaporkan secara tersendiri.

Rancangan Rifaskes Puskesmas 2011 adalah studi potong lintang (*cross sectional*). Dilakukan secara sensus terhadap 9005 Puskesmas (berdasarkan data Ditjen BUK dan Pusdatin tahun 2010). Rancangan ini merupakan salah satu bagian dari rancangan Rifaskes 2011 secara keseluruhan.

Data yang dikumpulkan meliputi data input, proses, dan output upaya kesehatan di Puskesmas yang antara lain terdiri dari data fasilitas, Sumber Daya Manusia (SDM), alat kesehatan, organisasi dan manajemen, pelayanan kesehatan yang berjalan, output esensial dan pelayanan kesehatan, fungsi serta Indikator Mutu Esensial Puskesmas tahun 2010. Data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner Rifaskes Puskesmas 2011 yang terdiri dari 16 Blok. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan penilaian terhadap data sekunder.

Pengumpul data adalah peneliti Badan Litbangkes, politeknik kesehatan (Poltekkes), universitas (perguruan tinggi), organisasi profesi, ataupun institusi penelitian kesehatan lainnya yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, baik di tingkat Nasional maupun Provinsi/Kabupaten/Kota.

Kegiatan yang dilakukan : 1. Telaah dokumen (*document review*), 2. Pertemuan konsinyasi lintas program dan organisasi profesi, 3. Pertemuan pakar, 4. Penyusunan draft instrumen Rifaskes 2011, 5. Uji coba Instrumen, 6. Perbaikan dan finalisasi instrumen Rifaskes Puskesmas 2011, 7. Penyusunan *Plan of Action* (POA) pelaksanaan Rifaskes 2011 (bersama-sama dengan RSUD dan LKM), 8. Penyusunan pedoman instrumen Rifaskes 2011 (bersama-sama dengan RSUD dan LKM), 9. Pertemuan Tim Manajemen Rifaskes 2011 (bersama-sama dengan RSUD dan LKM), 10. Rapat Koordinasi tingkat Provinsi, 11. Workshop/Pelatihan Fasilitator (*Master of Trainers/MOT*) Rifaskes 2011 tingkat Pusat (bersama-sama dengan RSUD dan LKM), 12. Workshop/Pelatihan Penanggung Jawab Teknis/PJT (*Training of Trainers/ TOT*) Kabupaten/Kota Rifaskes 2011 (bersama-sama dengan RSUD dan LKM), 13. Workshop/Pelatihan Rifaskes Puskesmas 2011 untuk enumerator, 14. Pengumpulan data Rifaskes Puskesmas 2011, 15. Validasi studi, 16. Data RB/Editing/Cleaning, 17. Analisa data, 18. Penulisan laporan akhir, 19. Diseminasi hasil Rifaskes 2011 (bersama-sama dengan RSUD dan LKM), dan 20. Analisis lanjut

Pengorganisasian Rifaskes 2011 meliputi tingkat Pusat, tingkat Koordinator Wilayah I – IV (1 Korwil bertanggung jawab atas 8-9 Provinsi), tingkat Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota. Susunan organisasi Rifaskes2011 tingkat Pusat terdiri dari Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Pelaksana Harian, Tim Manajemen, Tim Teknis RS Pemerintah, Puskesmas, LKM, Manajemen Data (Mandat) dan Analisis Data (Andat).

Validasi studi ini dilaksanakan oleh tiga Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) terkemuka di Indonesia yaitu FKM UI, FKM Unair dan FKM Unhas. Proses validasi dilaksanakan 1-2 minggu setelah enumerator mengumpulkan data. Hasilnya baik proses pengumpulan data dan data yang dikumpulkan mempunyai validitas rata 80% lebih. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pengumpulan data dan data yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 adalah valid.

Laporan Povinsi Riau Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Dari kuesioner Puskesmas di Provinsi Riau yang telah terkumpul sebanyak 202, sebanyak 195 merupakan kuesioner Puskesmas yang memenuhi kriteria Rifaskes 2011 dan dipergunakan untuk analisis data dengan hasil-hasil sebagai berikut:

- Kurang lebih tiga perempat dari Puskesmas di Provinsi Riau yang dianalisis oleh Rifaskes 2011 (195 Puskesmas) tercatat sebagai Puskesmas wilayah perdesaan dan lebih dari separuhnya merupakan Puskesmas Non-perawatan. Hanya 15,4 persen Puskesmas yang merupakan Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar).
- Analisis deskriptif menunjukkan bahwa hampir seluruh Puskesmas di Provinsi Riau memiliki sumber daya tenaga kesehatan seperti dokter, perawat dan bidan. Sementara untuk tenaga dokter gigi hanya 80,5 persen dan tenaga promkes hanya 22,6 persen. Untuk tenaga saintarian dan gizi masing-masing sebesar 65,6 persen dan 68,2 persen.
- Analisis diskriptif juga menunjukkan bahwa 87,7 persen bangunan Puskesmas merupakan bangunan permanen dengan kondisi semua bangunan baik atau rusak ringan 73,3 persen. Sebanyak 69,2 persen Puskesmas memiliki listrik 24 jam dan 55,4 persen Puskesmas memiliki air bersih. Untuk ketersediaan alat transportasi sebanyak 48,7 persen Puskesmas memiliki kendaraan roda 2, 61,0 persen Puskesmas memiliki pusling/ambulans dan 61,0 persen Puskesmas memiliki pusling/ambulan/perahu bermotor. Sementara hanya 32,8 persen Puskesmas memiliki pusling, 2,1 persen Puskesmas memiliki perahu bermotor dan 22,1 persen Puskesmas memiliki 3 roda 2 dan pusling/perahu bermotor.
- Sebesar 97,9 persen Puskesmas mempunyai dokumen perencanaan tahunan. Sedangkan sebanyak 97,4 persen Puskesmas memiliki dokumen RUK (Rencana Usulan Kegiatan) dan 97,4 persen Puskesmas memiliki dokumen RPK (Rencana Pelaksanaan Kegiatan). Kegiatan Lokakarya Mini bulanan yang dilakukan Puskesmas adalah sebesar 77,9 persen dan hanya 52,8 persen Puskesmas yang melakukan Lokakarya Mini Triwulan.
- Untuk sistem informasi Puskesmas, hanya 1,5 persen Puskesmas yang memiliki jaringan antar ruang, 40,5 persen Puskesmas memiliki komputer tetapi tidak ada jaringan antar ruang, dan 62,9 persen Puskesmas menggunakan ICD X.
- Di dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan Kepmenkes No. 128/2004 Puskesmas diwajibkan melaksanakan Upaya Kesehatan Wajib yang terdiri dari Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA/KB, Perbaikan Gizi Masyarakat, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Pengobatan. Untuk kesesuaian penanggungjawab program sebanyak 21,5 persen Puskesmas memiliki penanggung jawab program promkes, 63,1 persen penanggungjawab program kesling, 97,9 persen penanggungjawab KIA/KB, 62,1 persen penanggungjawab perbaikan gizi masyarakat, 79,5 persen penanggungjawab pencegahan dan pemberantasan penyakit dan 78,5 persen penanggungjawab pengobatan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

- Pada kegiatan Program Promosi Kesehatan, kegiatan Penyuluhan PHBS merupakan presentase tertinggi yang dilakukan oleh Puskesmas (96,9%) dan disusul oleh kegiatan Pembinaan di Poskesdes (84,1%), Pembinaan Forum Desa Siaga (79,0%), dan Pembinaan Program Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) (83,1%).
- Pada kegiatan Program Kesehatan Lingkungan, kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) merupakan persentase tertinggi yang dilakukan oleh puskesmas (93,3%) dan disusul oleh kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Tempat Makanan dan minuman (91,8%), Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Sekolah (87,7%), Pemeriksaan Sanitasi Rumah Tangga (85,6%), Pemberantasan Sarang Nyamuk/Pemeriksaan Jentik Nyamuk (82,1%) dan Kunjungan/Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah (38,5%).
- Pada kegiatan Program kesehatan ibu, kegiatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) merupakan persentase tertinggi yang dilakukan oleh Puskesmas (96,9%) dan diikuti oleh Kemitraan Bidan dan Dukun (77,9%), Pelayanan Antenatal Terintegrasi (83,1%), dan Kelas Ibu Hamil dan Nifas (41,5%).
- Pada kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak, kegiatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) merupakan persentase tertinggi yang dilakukan oleh Puskesmas (84,6%) dan disusul oleh Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) (78,5%), Penanganan Kasus Diare pada Balita dengan Dehidrasi Sedang dan Berat (76,4%), Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) (67,2%), Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) (54,4%), Manajemen Asfiksia (52,3%), Kelas Ibu Balita (18,5%) dan Kekerasan Terhadap Anak (KTA) (13,3%).
- Pada kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana, Konsultasi KB merupakan persentase tertinggi sebesar 96,9 persen, diikuti, KB, 84,6 persen Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi Mantap (IUD, Susuk, Vasektomi), dan 68,2 persen Penanganan Komplikasi Kontrasepsi.
- Pada kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat, persentase tertinggi adalah pemberian kapsul vitamin A pada balita (98,5%) kemudian pemberian tablet besi dan penimbangan balita, masing-masing (97,9%), pemberian MP-ASI anak umur 6-24 bulan (91,8%), peningkatan pemberian ASI eksklusif (91,3%), dan pemberian PMP pemulihan balita pada gakin (83,6%).
- Pada kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular, persentase tertinggi adalah TB Paru (98,5%), diikuti Diare dan Malaria (masing-masing 95,4%), DBD (94,4%), ISPA/Pneumonia (93,3%), Surveilans terpadu (86,2%), Rabies (86,2%),Kusta (84,1%), Filariasis (65,1%), HIV/AIDS (46,7%), dan Schistosomiasis (4,6%).
- Pada kegiatan Program Imunisasi, kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung Puskesmas tertinggi adalah dengan frekuensi setiap hari (47,2%), kemudian frekuensi seminggu sekali (39,0%), dan tiga hari dalam seminggu (2,6%), dua hari dalam seminggu (0 %).
- Pada Puskesmas PONED, lebih dari tiga perempatnya melakukan pelayanan PONED 24 jam (77,3%).

- Persentase keberadaan UKBM yang terbanyak adalah Posyandu (96,9%), kemudian Posyandu Lansia (85,6%), Dana Sehat (40,5%) Peduli Lansia (27,7%), Peduli TB Paru (19,0%), Poskestren (25,1%), POD/WOD (17,9%), Peduli HIV-AIDS (9,7%) dan SBH (17,4%).
- Sekitar 66,6% Puskesmas memiliki kelengkapan alat kesehatan poliklinik umum kurang dari 60% jumlah standard alat poliklinik umum (56 alat). Untuk poliklinik KIA sebanyak 90,3% Puskesmas memiliki alat kesehatan kurang dari 80%. Pada Puskesmas PONEB sebanyak 95,3% Puskesmas PONEB memiliki alat kesehatan kurang dari 80%.
- Untuk ketersediaan obat umum di Poliklinik Umum, sebanyak 74,4% Puskesmas memiliki ketersediaan pelayanan obat umum kurang dari 80%. Sementara untuk pelayanan obat PONEB, 72,7% Puskesmas PONEB memiliki ketersediaan pelayanan obat PONEB kurang dari 40%. Sementara untuk Pelayanan Obat KB, sebanyak 61,0% Puskesmas memiliki ketersediaan pelayanan obat KB kurang dari 40%.

Dari hasil-hasil diatas dapat disimpulkan bahwa: 1. Rifaskes Puskesmas 2011 khususnya di Provinsi Riau telah menghasilkan gambaran input dan proses upaya kesehatan Puskesmas yang sangat kaya, rinci dan cukup valid untuk membuat potret fasilitas kesehatan di Puskesmas mulai dari tingkat nasional, Provinsi, kabupaten/kota maupun individual Puskesmas; 2. Baik input, dan proses upaya kesehatan di Puskesmas antara lain fasilitas, SDM, alat kesehatan, organisasi dan manajemen, pelayanan kesehatan yang berjalan, fungsi serta Indikator Mutu Esensial Puskesmas tahun 2010 diketemukan masih banyak berada dibawah standar yang telah ditentukan dalam buku Pedoman Puskesmas dan kebijakan Kementerian Kesehatan lainnya; 3. Dilihat dari input dan proses yang menunjang tiga fungsi Puskesmas, maka input dan proses yang mendukung keberhasilan fungsi Puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan fungsi Puskesmas sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan masih jauh dari harapan; 4. Dari sudut program wajib upaya kesehatan Puskesmas, maka input dan proses program wajib kesehatan ibu dan anak, terutama program PONEB, masih jauh dibandingkan standar minimal yang harus dipenuhi; dan 5. Terdapat disparitas input dan proses upaya kesehatan Puskesmas yang cukup tajam berdasarkan geografi, kota/desa dan regional.

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan adalah: 1. Perlu dilakukan analisis lanjut terhadap data yang dihasilkan oleh Rifaskes Puskesmas 2011 khususnya di Provinsi Riau; 2. Perlu pemenuhan dan pengembangan segera dan secara prioritas terhadap input dan proses upaya kesehatan Puskesmas; 3. Pemenuhan dan pengembangan input dan proses upaya Puskesmas yang menunjang fungsi Puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berwawasan kesehatan perlu mendapatkan prioritas tinggi; 4. Pemenuhan dan penyempurnaan input dan proses pada program PONEB pada seluruh Puskesmas perawatan harus segera dilaksanakan guna pencapaian RPJMN dan MDG; dan 5. Kesenjangan geografi, kota/desa dan regional dari input dan proses upaya kesehatan Puskesmas harus segera dipikirkan pemecahannya dengan meningkatkan integritas dan kejelasan peran Kementerian Kesehatan, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota.

DAFTAR SINGKATAN

AC	: Air Conditioner
AFP	: Acute Flaccid Paralysis
AIDS	: Acquired Immunodeficiency Syndrome
Akbid	: Akademi Kebidanan
AKL	: Akademi Kesehatan Lingkungan
Akper	: Akademi Keperawatan
Akzi	: Akademi Gizi
Alkes	: Alat Kesehatan
AMP	: Audit Maternal Perinatal
ANC	: Antenatal Care
APN	: Asuhan Persalinan Normal
Askes	: Asuransi Kesehatan
Astek	: Asuransi Tenaga Kerja
Balita	: Bawah Lima Tahun
Balkesmas	: Balai Kesehatan Masyarakat
BBLR	: Berat Badan Lahir Rendah
BCG	: Bacille Calmete Guerin
Bimtek	: Bimbingan Teknis
Binfar	: Bina Farmasi
BLU	: Badan Layanan Umum
BOK	: Bantuan Operasional Kesehatan
BOR	: Bed Occupancy Rate
BP	: Balai Pengobatan
BPP	: Badan Penyantun Puskesmas
BSL	: Bio Safety Level
BTA	: Basil Tahan Asam
CMHN	: Community Mental Health Nursing
D1 Keb	: Diploma-1 Kebidanan
DIII	: Diploma-3
D-IV	: Diploma-4
DBD	: Demam Berdarah Dengue
DHF	: Dengue Hemorrhagic Fever
Ditjen	: Direktorat Jenderal
DP3	: Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
DPT	: Difteri Pertusis Tetanus
DTP	: Dengan Tempat Perawatan

EKG	: Elektro Kardiogram
Email	: Electronic Mail
FIFO	: First In First Out
FEFO	: First Expired First Out
FK	: Fakultas Kedokteran
FKG	: Fakultas Kedokteran Gigi
FKM	: Fakultas Kesehatan Masyarakat
Gakin	: Keluarga Miskin
GKM	: Gugus Kendali Mutu
HB	: Hepatitis B
HIV	: Human Immunodeficiency Virus
HP	: Handphone
ID	: Identitas
IMD	: Insiasi Menyusu Dini
ISO	: International Standard Organization
ISPA	: Infeksi Saluran Pernafasan Akut
IUD	: Intrauterine Device
Jamkesda	: Jaminan Kesehatan Daerah
Jamkesmas	: Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jampersal	: Jaminan Persalinan
Jamsostek	: Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Juklak	: Petunjuk Pelaksanaan
Juknis	: Petunjuk Teknis
KB	: Keluarga Berencana
Kemenkes	: Kementerian Kesehatan
Kepmenkes	: Keputusan Menteri Kesehatan
Kesling	: Kesehatan Lingkungan
Kesmas	: Kesehatan Masyarakat
KN	: Kunjungan Neonatus
Keswa	: Kesehatan Jiwa
KIA	: Kesehatan Ibu dan Anak
KIPI	: Kejadian Ikutan Paska Imunisasi
KLB	: Kejadian Luar Biasa
KMS	: Kartu Menuju Sehat
Korwil	: Koordinator Wilayah
KTA	: Kekerasan Terhadap Anak

Lansia	: Lanjut Usia
LB	: Laporan Bulanan
Lokmin	: Lokakarya Mini
LOS	: Length of Stay
LP LPO	: Laporan Penerimaan dan Lembar Permintaan Obat
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MDGs	: Millennium Development Goals
MMD	: Musyawarah Masyarakat Desa
Monev	: Monitoring dan Evaluasi
MP ASI	: Makanan Pendamping Air Susu Ibu
MTBM	: Manajemen Terpadu Bayi Muda
MTBS	: Manajemen Terpadu Balita Sakit
Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Ormas	: Organisasi Massa
P2M	: Pengendalian Penyakit Menular
P4K	: Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi
PA	: Pembantu Administrasi
PAH	: Penampungan Air Hujan
PAM	: Perusahaan Air Minum
PE	: Penyelidikan Epidemiologis
Perkesmas	: Perawatan Kesehatan Masyarakat
Permenkes	: Peraturan Menteri Kesehatan
PGPS	: Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
PHBS	: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PHN	: Public Health Nursing
PINERE	: Penyakit Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging
PJO	: Penanggungjawab Operasional
PJT	: Penanggungjawab Teknis
PKPR	: Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PMT	: Pemberian Makanan Tambahan
PMK	: Pengembangan Manajemen Kinerja
PMTCT	: Prevention of Mother to Child Transmission
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
POA	: Plan of Action
POD	: Pos Obat Desa
Podes	: Potensi Desa
Polindes	: Pondok Bersalin Desa
PONED	: Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Dasar
PONEK	: Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Komprehensif
Posbindu	: Pos Pembinaan Terpadu

Laporan Povinsi Riau Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Poskesdes	: Pos Kesehatan Desa
Poskestren	: Pos Kesehatan Pesantren
Posyandu	: Pos Pelayanan Terpadu
Promkes	: Promosi Kesehatan
Protap	: Prosedur Tetap
PTT	: Pegawai Tidak Tetap
PUS	: Pasangan Usia Subur
Pusdatin	: Pusat Data dan Informasi
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
Pusling	: Puskesmas Keliling
Pustu	: Puskesmas Pembantu
PWS	: Pemantauan Wilayah Setempat
QA	: Quality Assurance
Rekmed	: Rekam Medik
Renstra	: Rencana Strategis
RI	: Rawat Inap
Rifas	: Riset Fasilitas
Rifaskes	: Riset Fasilitas Kesehatan
Rikhus	: Riset Khusus
Riskesdas	: Riset Kesehatan Dasar
RJ	: Rawat Jalan
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPK	: Rencana Pelaksanaan Kegiatan
RS	: Rumah Sakit
RUK	: Rencana Usulan Kegiatan
RW	: Rukun Warga
S1 Kes	: Sarjana Strata-1 Kesehatan
S2 Kes	: Sarjana Strata-2 Kesehatan
SAA	: Sekolah Asisten Apoteker
SBH	: Saka Bhakti Husada
SD	: Sekolah Dasar
SDM	: Sumber Daya Manusia
SDIDTK	: Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang
SJSN	: Sistem Jaminan Sosial Nasional
SIMPUS	: Sistem Manajemen Puskesmas
SK	: Surat Keputusan
SKp	: Sarjana Keperawatan
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SMD	: Survei Mawas Diri
SMU	: Sekolah Menengah Umum
SOP	: Standard Operational Procedures

SP2TP	: Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas
SPAG	: Sekolah Pembantu Ahli Gizi
SPAL	: Sistem Pembuangan Air Limbah
SPK	: Sekolah Perawat Kesehatan
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SPM-BK	: Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
SPPH	: Sekolah Pembantu Penilik Hygiene
SPR	: Sekolah Pengatur Rawat
SPRG	: Sekolah Pengatur Rawat Gigi
Susenas	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
Tb	: Tuberkulosis
THT	: Telinga, Hidung, Tenggorokan
TOGA	: Tanaman Obat Keluarga
TPA	: Tempat Pemrosesan Akhir
TPM	: Tempat Pengelolaan Makanan/Minuman
TT	: Tetanus Toksoid
TTU	: Tempat-tempat Umum
UCI	: Universal Child Immunization
UKBM	: Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
UKGS	: Usaha Kesehatan Gigi Sekolah
UKGMD	: Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat Desa
UKK	: Usaha Kesehatan Kerja
UKS	: Usaha Kesehatan Sekolah
UKP	: Upaya Kesehatan Pengembangan
UKW	: Upaya Kesehatan Wajib
USG	: Ultrasonografi
Usila	: Usia Lanjut
VCCM	: Vaccine Cold Chain Monitor
VCT	: Voluntary Counseling and Testing
Vit-A	: Vitamin A
VVM	: Vaccine Vial Monitor
WOD	: Warung Obat Desa
Yankes	: Pelayanan Kesehatan
Yankespro	: Pelayanan Kesehatan Reproduksi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xxv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. PERTANYAAN KEBIJAKAN	2
1.3. PERTANYAAN PENELITIAN	3
1.4. TUJUAN PENELITIAN	3
1.5. MANFAAT PENELITIAN	3
1.6. RUANG LINGKUP	3

BAB II KERANGKA KONSEP DAN PENGEMBANGAN INDIKATOR

2.1. BATASAN	5
2.2. KERANGKA KONSEP	5
2.3. PENGEMBANGAN INDIKATOR PUSKESMAS	
2.3.1. Indikator Input	7
2.3.2. Indikator Proses	8
2.3.3. Indikator Output	9

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. RANCANGAN PENELITIAN	11
3.2. POPULASI dan SAMPEL	
3.2.1. Populasi Penelitian	11
3.2.2. Sampel Penelitian	11
3.3. RESPONDEN	11
3.4. PENGUMPULAN DATA	
3.4.1. Jenis Data yang Dikumpulkan	12
3.4.2. Pengumpul Data	12
3.4.3. Cara Pengumpulan Data	13
3.5. PENGOLAHAN DATA	14
3.6. RINCIAN KEGIATAN	
3.6.1. Tahap Persiapan	14
3.6.1.1. Telaah Dokumen (document review)	14
3.6.1.2. Pertemuan Konsinyasi Lintas Program dan Organisasi Profesi	14
3.6.1.3. Pertemuan Pakar	14
3.6.1.4. Penyusunan Instrumen	14
3.6.1.5. Uji coba instrumen	15
3.6.1.6. Penyusunan Plan of Action (POA) Pelaksanaan.....	15

3.6.2. Tahap Pelaksanaan	15
3.6.2.1. Pengorganisasian Lapangan	15
3.6.2.2. Penyusunan Pedoman Instrumen	16
3.6.2.3. Pertemuan Tim Manajemen	16
3.6.2.4. Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi	16
3.6.2.5. Workshop Fasilitator Tingkat Pusat	17
3.6.2.6. Workshop Penanggungjawab Teknis Kabupaten/Kota	17
3.6.2.7. Workshop Enumerator	18
3.6.2.8. Pengumpulan Data	18
3.6.2.9. Validasi Studi	19
3.6.2.10. Pengolahan Data	19
3.6.2.11. Analisa Data	19

BAB IV HASIL

4.1. JUMLAH PUSKESMAS	21
4.2. FASILITAS PELAYANAN LAIN DI PUSKESMAS	23
4.3. SUMBER DAYA MANUSIA	24
4.4. SARANA DAN PRASARANA	26
4.5. ALAT TRANSPORTASI	28
4.6. MANAJEMEN PUSKESMAS	29
4.6.1. Perencanaan Tahunan dan Lokakarya Mini.....	29
4.6.2. Sistem Informasi Puskesmas	31
4.7. PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	32
4.8. PELAYANAN KESEHATAN	35
4.8.1. Program Promosi Kesehatan.....	35
4.8.1.1. Kegiatan Program Promosi Kesehatan.....	35
4.8.1.2. Pelatihan Program Promosi Kesehatan.....	36
4.8.1.3. Pedoman Program Promosi Kesehatan	37
4.8.1.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Promosi Kesehatan.....	39
4.8.2. Program Kesehatan Lingkungan.....	41
4.8.2.1. Kegiatan Program Kesehatan Lingkungan.....	41
4.8.2.2. Pelatihan Program Kesehatan Lingkungan.....	43
4.8.2.3. Pedoman Program Kesehatan Lingkungan.....	45
4.8.2.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan.....	46
4.8.3. Program Kesehatan Ibu.....	48
4.8.3.1. Kegiatan Program Kesehatan Ibu	48
4.8.3.2. Pelatihan Program Kesehatan Ibu	49
4.8.3.3. Pedoman Program Kesehatan Ibu	51
4.8.3.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Ibu.....	53
4.8.4. Program Kesehatan Bayi dan Anak	55
4.8.4.1. Kegiatan Program Kesehatan Bayi dan Anak.....	55
4.8.4.2. Pelatihan Program Kesehatan Bayi dan Anak.....	58
4.8.4.3. Pedoman Program Kesehatan Bayi dan Anak.....	59
4.8.4.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Bayi dan Anak.....	62

4.8.5. Program Keluarga Berencana.....	63
4.8.5.1. Kegiatan Program Keluarga Berencana.....	63
4.8.5.2. Pelatihan Program Keluarga Berencana.....	64
4.8.5.3. Pedoman Program Keluarga Berencana.....	66
4.8.5.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Keluarga Berencana.....	68
4.8.6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	70
4.8.6.1. Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat.....	70
4.8.6.2. Pelatihan Program Perbaikan Gizi Masyarakat.....	72
4.8.6.3. PedomanProgram Perbaikan Gizi Masyarakat	73
4.8.6.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Perbaikan Gizi Masyarakat.....	77
4.8.7. Program Pengendalian Penyakit Menular.....	78
4.8.7.1. Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular.....	78
4.8.7.2. Pelatihan Program Pengendalian Penyakit Menular.....	82
4.8.7.3. Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular.....	85
4.8.7.4. Pengawasan, Evalusi dan Bimbingan Program Pengendalian Penyakit Menular....	89
4.8.8. Program Imunisasi.....	90
4.7.8.1. Program Imunisasi di Puskesmas.....	90
4.7.8.2. Pelatihan Program Imunisasi.....	92
4.7.8.3. Pedoman Program Imunisasi.....	93
4.7.8.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Imunisasi.....	94
4.9. PELAYANAN PONED	96
4.10. PUSKESMAS SEBAGAI PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	97
4.11. ALAT KESEHATAN DAN OBAT	104
4.11.1. Poliklinik Umum	104
4.11.2. Poliklinik KIA.....	106
4.11.3. Alat-alat Puskesmas PONED.....	107
4.11.4. Alat-alat Imunisasi	108
4.11.5. Obat Umum.....	108
4.11.6. Obat PONED.....	109
4.11.7. Obat/Alat KB.....	110
BAB V. KESIMPULAN.....	113
BAB VI. SARAN-SARAN.....	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN SK TIM RIFASKES 2011 PROVINSI RIAU	119
LAMPIRAN KUESIONER PUSKESMAS RIFASKES 2011	120

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
Tabel 3.1.	Jumlah Puskesmas per Kabupaten/Kota	11
Tabel 4.1.1.	Jumlah Puskesmas di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	21
Tabel 4.1.2.	Jumlah dan Persentase Puskesmas menurut Lokasi di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	22
Tabel 4.1.3.	Jumlah dan Persentase Puskesmas menurut Jenis Puskesmas, Rifaskes 2011	22
<u>FASILITAS PELAYANAN LAIN DI PUSKESMAS</u>		
Tabel 4.2.1.	Persentase Puskesmas dengan Fasilitas PONEB Menurut Jenis Puskesmas di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	23
<u>SUMBER DAYA MANUSIA</u>		
Tabel 4.3.1.a.	Persentase Puskesmas Berdasarkan Ketersediaan Sumber Daya Tenaga di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	24
Tabel 4.3.1.b.	Persentase Puskesmas Berdasarkan Ketersediaan Sumber Daya Tenaga di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	25
<u>SARANA DAN PRASARANA</u>		
Tabel 4.4.1.	Persentase Puskesmas dengan menurut Jenis dan Kondisi Seluruh Bangunan Puskesmas di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	26
Tabel 4.4.2.	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Listrik 24 Jam dan Air Bersih Puskesmas di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	27
<u>ALAT TRANSPORTASI</u>		
Tabel 4.5.1	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Alat Transportasi Puskesmas di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	28
<u>MANAJEMEN PUSKESMAS</u>		
Tabel 4.6.1.1.	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Perencanaan dan Penggerakan Pelaksanaan Puskesmas di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	30
Tabel 4.6.1.2.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Dokumen dan Keterlibatan PJ Program dalam menyusun RKT di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	30
Tabel 4.6.2.1.	Persentase Puskesmas menurut Sistem Informasi Puskesmas di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	31

Laporan Povinsi Riau Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
<u>PENANGGUNG JAWAB PROGRAM</u>		
Tabel 4.7.1.a.	Persentase Puskesmas Menurut Kesesuaian PJ Program Puskesmas di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	33
Tabel 4.7.1.b.	Persentase Puskesmas Menurut Kesesuaian PJ Program Puskesmas di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	34
<u>PELAYANAN KESEHATAN</u>		
Tabel 4.8.1.1.1.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Kegiatan Program Promosi Kesehatan di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	36
Tabel 4.8.1.2.1.	Persentase Puskesmas menurut Pelatihan Program Promosi Kesehatan pada Tahun 2009 dan 2010 di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	37
Tabel 4.8.1.3.1.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Pedoman Program Promosi Kesehatan di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	38
Tabel 4.8.1.4.1.	Persentase Puskesmas menurut Penerimaan Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Promosi Kesehatan di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	40
Tabel 4.8.2.1.1.a.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Program Kesehatan Lingkungan di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	42
Tabel 4.8.2.1.1.b.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Kegiatan Program Kesehatan Lingkungan di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	43
Tabel 4.8.2.2.1.	Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Kesehatan Lingkungan, pada Tahun 2009 dan 2010 di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	44
Tabel 4.8.2.3.1.	Persentase Puskesmas menurut Kepemilikan Pedoman dalam Program Kesehatan Lingkungan di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	46
Tabel 4.8.2.4.1.	Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	47
Tabel 4.8.3.1.1.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Kegiatan Program Kesehatan Ibu di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	49
Tabel 4.8.3.2.1.	Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan pada Pelatihan Program Kesehatan Ibu pada Tahun 2009-2010, Rifaskes 2011	50
Tabel 4.8.3.4.1.a.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Pedoman untuk Melaksanakan Program Kesehatan Ibu di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	52
Tabel 4.8.3.4.1.b.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Pedoman untuk Melaksanakan Program Kesehatan Ibu di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	53
Tabel 4.8.3.5.1.	Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Ibu di Provinsi	54

Laporan Povinsi Riau Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
	Riau, Rifaskes 2011	
Tabel 4.8.4.1.1.a.	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	56
Tabel 4.8.4.1.1.b.	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	57
Tabel 4.8.4.2.1.	Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan Pelatihan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak pada Tahun 2009 dan 2010 di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	58
Tabel 4.8.4.3.1.a.	Persentase Puskesmas menurut Pedoman Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	61
Tabel 4.8.4.3.1.b.	Persentase Puskesmas menurut Pedoman Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	61
Tabel 4.8.4.4.1.	Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	62
Tabel 4.8.5.1.1.	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	64
Tabel 4.8.5.2.1.	Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Pelayanan KB Tahun 2009-2010 di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	65
Tabel 4.8.5.3.1.a.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Pelayanan KB di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	67
Tabel 4.8.5.3.1.b.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Pelayanan KB di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	67
Tabel 4.8.5.4.1.	Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dari Dinas Kesehatan Kab/Kota di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	69
Tabel 4.8.6.1.1.a.	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	71
Tabel 4.8.6.1.1.b.	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	71
Tabel 4.8.6.2.1.	Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Tahun 2009-2010 di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	73
Tabel 4.8.6.3.1.a.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	74
Tabel 4.8.6.3.1.b.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Riau, Rifaskes	75

Laporan Povinsi Riau Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
	2011	
Tabel 4.8.6.3.1.c.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	76
Tabel 4.8.6.4.1.	Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	78
Tabel 4.8.7.1.1.a.	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	79
Tabel 4.8.7.1.1.b.	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	80
Tabel 4.8.7.1.1.c.	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	81
Tabel 4.8.7.2.1.a.	Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Pengendalian Penyakit Menular Tahun 2009-2010 di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	83
Tabel 4.8.7.2.1.b.	Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Pengendalian Penyakit Menular Tahun 2009-2010 di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	83
Tabel 4.8.7.2.1.c.	Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Pengendalian Penyakit Menular Tahun 2009-2010 di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	84
Tabel 4.8.7.3.1.a.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	86
Tabel 4.8.7.3.1.b.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	87
Tabel 4.8.7.3.1.c.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	88
Tabel 4.8.7.4.1.	Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	90
Tabel 4.8.8.1.1.	Persentase Puskesmas menurut Frekuensi Pelayanan Imunisasi di Dalam dan Luar Gedung di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	91
Tabel 4.8.8.2.1.	Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Imunisasi Tahun 2009-2010 di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	92

Laporan Povinsi Riau Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
Tabel 4.8.8.3.1.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Pelayanan Imunisasi di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	93
Tabel 4.8.8.4.1.	Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam Program Imunisasi di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	95
<u>PELAYANAN PONED</u>		
Tabel 4.9.1.	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pelayanan dan Pelatihan PONED, Rifaskes 2011	96
<u>PUSKESMAS SEBAGAI PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>		
Tabel 4.10.1.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Petugas Khusus dan Petugas yang dilatih Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	97
Tabel 4.10.2.	Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Pedoman, SOP dan Peraturan tentang pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	98
Tabel 4.10.3.	Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Alokasi Dana Khusu Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	99
Tabel 4.10.4.a.	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	100
Tabel 4.10.4.b.	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	100
Tabel 4.10.5.	Persentase Puskesmas menurut Pelaksanaan pembinaan dan Pemantauan Kegiatan UKBM di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	101
Tabel 4.10.6.	Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Input dan Proses Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	102
Tabel 4.10.7.a.	Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	103
Tabel 4.10.7.b.	Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	104
<u>ALAT KESEHATAN DAN OBAT DALAM GEDUNG</u>		
Tabel 4.11.1.1.	Persentase Puskesmas menurut Skor Ketersediaan Alat Kesehatan Poliklinik Umum di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	105
Tabel 4.11.2.1.	Persentase Puskesmas menurut Skor Ketersediaan Alat Kesehatan Poliklinik KIA di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	106

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
Tabel 4.11.3.1.	Persentase Puskesmas menurut Skor Ketersediaan Alat Kesehatan PONE D di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	107
Tabel 4.11.4.1.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Alkes Imunisasi di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	108
Tabel 4.11.5.1	Persentase Puskesmas menurut Skor Ketersediaan Obat Umum di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	109
Tabel 4.11.6.1.	Persentase Puskesmas menurut Skor Ketersediaan Obat PONE D di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	110
Tabel 4.11.7.1.	Persentase Puskesmas Menurut Skor Ketersediaan Pelayanan Obat KB Di Provinsi Riau, Rifaskes 2011	111

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Hal.
Gambar 2.1.	Kerangka Konsep Riset Fasilitas Kesehatan 2011	6

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Hak atas kesehatan setiap warga negara dijamin oleh konstitusi. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28A menyatakan bahwa, *"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"*. Selanjutnya, dalam pasal 28 H ayat 1, *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*, pasal 34 ayat 1, *"Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara"*, dan pasal 34 ayat 3, *"Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak"*.

Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 (pasal 10) dan PP Nomor 38 tahun 2007, penyelenggaraan urusan kesehatan di Indonesia merupakan sinergi antara peran pemerintah daerah dan pusat. Sistem Kesehatan Nasional menetapkan Rumah Sakit dan Puskesmas merupakan salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan (Kepmenkes 274 tahun 2009). Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas merupakan bagian dari pelayanan publik sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Keberadaan Rumah Sakit dan Puskesmas juga menjadi bagian dari UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, setidaknya terkait dengan Bab V (Bagian Kedua) mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Bab VI mengenai Upaya Kesehatan.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas mengatur hal yang esensial tentang Puskesmas. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas **Kesehatan Kabupaten /Kota** yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Secara nasional standar wilayah kerja Puskesmas adalah satu Kecamatan, tapi apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari satu Puskesmas maka tanggungjawab wilayah kerja dibagi antar Puskesmas dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah desa/kelurahan/RW. Masing masing Puskesmas tersebut bertanggung jawab langsung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Untuk menjangkau seluruh wilayah kerjanya Puskesmas diperkuat dengan Puskesmas Pembantu serta Puskesmas Keliling. Untuk daerah yang jauh dari sarana pelayanan rujukan puskesmas dilengkapi dengan fasilitas rawat inap

Fungsi puskesmas :

1. Pusat Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan.
Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Puskesmas aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dan penyelenggaraan setiap pembangunan di wilayah kerjanya.
2. Pusat pemberdayaan Masyarakat
Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat , keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif

dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk sumber pembiayaannya serta ikut menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan. Pemberdayaan berdayaan masyarakat diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi dan situasi, khususnya sosial budaya masyarakat setempat.

3. Pusat Pelayanan kesehatan Strata pertama, yang meliputi:
 - Pelayanan kesehatan perorangan
 - Pelayanan kesehatan masyarakat

Dalam upaya pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Renstra – Kemenkes) 2010 -2014, maka dukungan kebijakan yang tepat dalam hal Upaya Kesehatan menjadi suatu hal yang penting. Kebijakan yang tepat hanya akan diperoleh bila didasarkan pada bukti yang kuat dan sah (*evidence based policy*). Melalui kebijakan yang tepat maka perencanaan program secara konkuren di setiap tingkat administrasi Pemerintahan dan intervensi yang dilakukan akan lebih efektif.

Informasi yang dibutuhkan agar penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dapat dilakukan secara tepat, belum tersedia secara akurat, *up to date* dan memadai. Selain itu, saat ini belum tersedia peta status terkini tentang fasilitas kesehatan (RS, Puskesmas dan Laboratorium) dan kinerjanya pada pada tingkat wilayah dan nasional. Penyelenggaraan sistem pelayanan kesehatan di masa datang yang kompleks (Jaminan Kesehatan Masyarakat/ Jamkesmas) memerlukan informasi tentang *supply* pelayanan kesehatan agar tujuan tercapai optimal.

Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2011 merupakan salah satu riset kesehatan nasional yang secara berkala dilakukan oleh Badan Litbangkes, Kementerian Kesehatan RI, disamping Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Riset Khusus Kesehatan (Rikus). Rifaskes 2011 dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh informasi terkini tentang *supply* pelayanan kesehatan, yaitu pada fasilitas kesehatan Rumah Sakit Umum (RSU) Pemerintah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Klinik Mandiri (LKM). Buku ini membahas secara khusus mengenai pelaksanaan dan hasil Riset Fasilitas Kesehatan pada fasilitas kesehatan Puskesmas yang dilaksanakan tahun 2011.

1.2. PERTANYAAN KEBIJAKAN

Supply apa yang dibutuhkan (fasilitas, SDM, peralatan kesehatan dan pelayanan kesehatan) agar institusi pelayanan kesehatan baik pusat maupun daerah dapat meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat secara optimal untuk mencapai tujuan RPJMN Bidang Kesehatan 2010-2014, MDGs 2015, Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM-BK), *Universal Coverage*, dan akselerasi pencapaian pembangunan kesehatan.

1.3. PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana informasi terkini tentang *supply* pelayanan kesehatan, yaitu Puskesmas, termasuk SDM, alat kesehatan (alkes) penting dan canggih dan penyediaan pelayanannya pada tingkat wilayah dan nasional
2. Bagaimana distribusi *supply* pelayanan kesehatan di berbagai wilayah

1.4. TUJUAN PENELITIAN

1. Diperolehnya informasi terkini tentang *supply* pelayanan kesehatan, yaitu fasilitas (puskesmas), termasuk Sumber Daya Manusia, peralatan kesehatan penting dan penyediaan pelayanannya pada tingkat wilayah dan nasional (*stock opname*).
2. Diperolehnya peta ketersediaan *supply* fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas) di berbagai wilayah (kabupaten/kota/propinsi)
3. Diperolehnya Indeks Kinerja Puskesmas

1.5. MANFAAT PENELITIAN

1. Mendukung pencapaian Universal Coverage Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dengan menyediakan data fasilitas (puskesmas) terkait dengan paket pelayanan kesehatan yang dapat diberikan (*benefit package*).
2. Memberikan masukan untuk penyusunan kebijakan revitalisasi Puskesmas.
3. Memungkinkan Pemerintah Pusat/provinsi mengalokasi bantuan/peran kepada daerah berdasar evidens secara optimal.
4. Memungkinkan pemerintah daerah mengembangkan *supply* pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
5. Dapat digunakan dasar bagi perencanaan fasilitas pelayanan kesehatan di berbagai tingkat administrasi pemerintahan.
6. Menghasilkan peta yang terintegrasi antara masalah kesehatan dan penyediaan pelayanan kesehatan berdasarkan berbagai riset/informasi yang relevan (riskesdas, Rifaskes, Podes, Susenas dll)
7. Mendorong kegiatan riset *follow up* yang lebih tajam dan terarah

1.6. RUANG LINGKUP

Secara keseluruhan Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) ini dilakukan di seluruh Rumah Sakit Umum Pemerintah, di seluruh Puskesmas, dan di seluruh Laboratorium Klinik Mandiri di Indonesia. Tahap persiapan dilakukan pada tahun 2010, sedangkan pelaksanaan dilakukan pada tahun 2011.

BAB II

KERANGKA KONSEP DAN PENGEMBANGAN INDIKATOR

2.1. BATASAN

Riset Fasilitas Kesehatan merupakan pengukuran dan pengamatan data primer serta penelusuran data sekunder tentang kecukupan (adekuasi) dan ketepatan (*appropriateness*) penyediaan fasilitas kesehatan dan kinerjanya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang disediakan oleh swasta yang dilakukan secara berkala.

Fasilitas kesehatan merupakan fasilitas yang memberikan pelayanan kesehatan, baik yang ditujukan untuk memberikan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) maupun Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), rawat jalan, rawat inap, serta melingkupi strata I, II, dan III. Fasilitas kesehatan strata pertama meliputi antara lain puskesmas, balai pengobatan pemerintah dan swasta, praktek bersama dan perorangan serta fasilitas laboratorium Pelayanan Mandiri. Termasuk fasilitas kesehatan strata kedua dan ketiga antara lain Balai kesehatan mata masyarakat, Balai pengobatan penyakit paru, Balai kesehatan indera masyarakat, Balai besar kesehatan paru masyarakat, RS Pemerintah dan swasta.

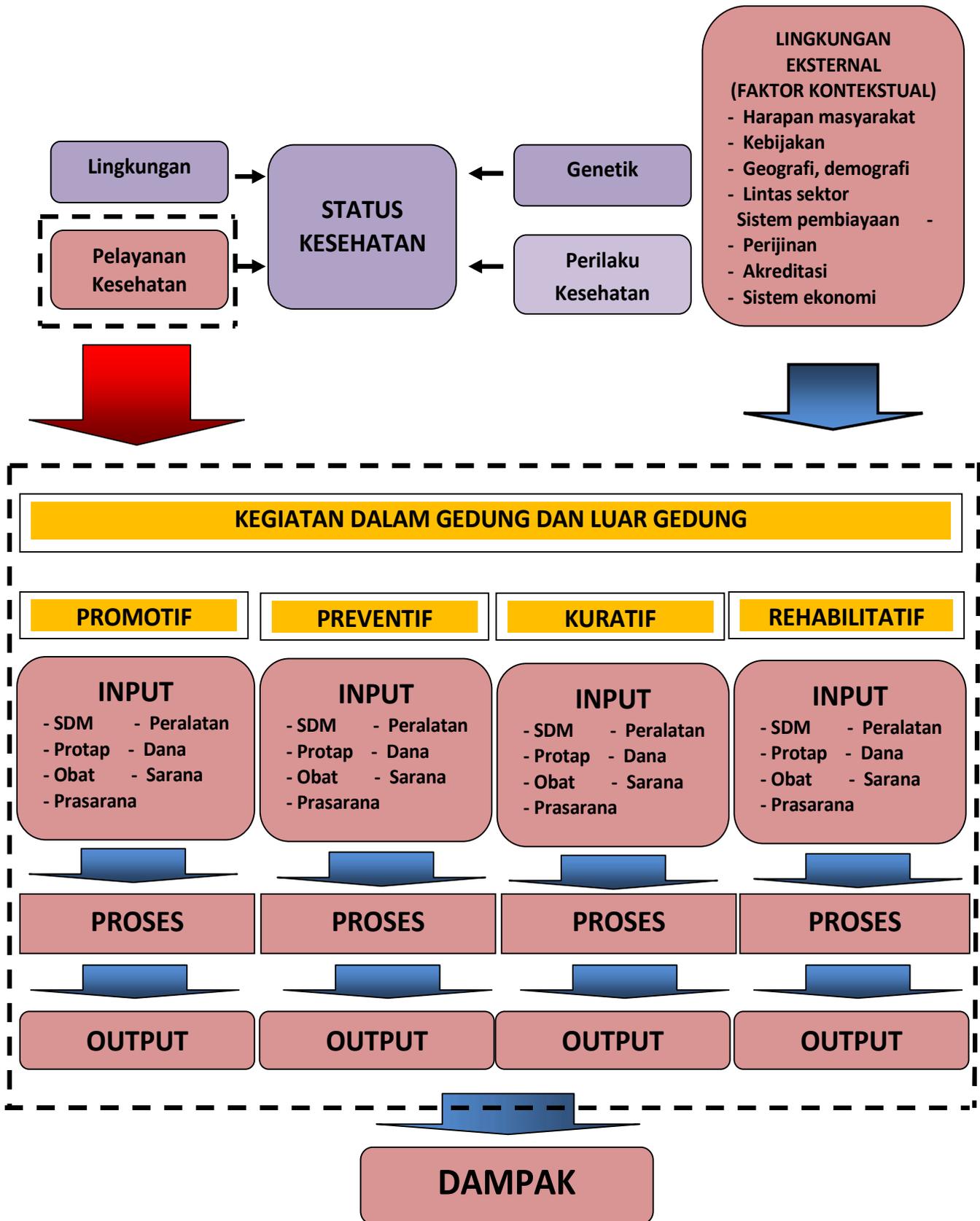
Berdasarkan tingkat kepentingannya (urgensi), maka Riset Fasilitas Kesehatan pertama ini ditujukan untuk Rumah Sakit, Puskesmas, dan Laboratorium pelayanan kesehatan mandiri.

2.2. KERANGKA KONSEP

Kerangka Konsep Riset Fasilitas Kesehatan mengacu pada Konsep HL. Blum mengenai "*Health Determinant*", Konsep "*Organization System*" Donabedian dan Konsep Jakab mengenai "*Organizational Reform*".

Berdasarkan hal tersebut, dikembangkan kerangka konsep seperti yang terlihat pada Gambar 2.1. Kerangka Konsep Riset Fasilitas Kesehatan 2011.

Gambar 2.1. Kerangka Konsep Riset Fasilitas Kesehatan 2011



Dimodifikasi dari : Blum, Donabedian, dan Jakab

HL. Blum menyebutkan bahwa status kesehatan dipengaruhi oleh 4 (empat) determinan kesehatan, yakni Perilaku Kesehatan, Genetik, Lingkungan, dan Pelayanan Kesehatan. Riset Fasilitas terkait erat dengan determinan pelayanan kesehatan seperti yang dimaksud oleh Blum. Konsep ini dipadukan dengan pendekatan kesisteman organisasi yang dikemukakan oleh Donabedian, yang meliputi Input (Masukan), Proses, Output (Luaran), dan *Outcome* (Dampak). Secara khusus, Jakab menjabarkan komponen kesisteman organisasi Donabedian dalam konteks elemen-elemen yang mempengaruhi Fasilitas Kesehatan.

2.3. PENGEMBANGAN INDIKATOR PUSKESMAS

2.3.1. INDIKATOR INPUT

Indikator-indikator Input untuk puskesmas diklasifikasikan ke dalam kelompok:

A. Organisasi, meliputi:

1. Struktur
2. Fungsi
3. Jejaring
4. Luas wilayah
5. Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa

B. Peraturan/kebijakan, meliputi:

1. SPO/Protap pelayanan
2. Surat Edaran, Pedoman, Surat Keputusan

C. Sumber Daya Puskesmas, meliputi:

1. Sumber Daya Manusia: jumlah, kualifikasi, status kepegawaian, pendidikan, pelatihan
2. Fasilitas bangunan: kondisi bangunan, jenis ruang pelayanan, jenis ruang non pelayanan, sarana air, toilet, listrik, jaringan telepon, internet
3. Alat transportasi: kendaraan roda empat, roda dua, perahu bermotor, dan lain-lain. Penilaian mengenai alat transportasi ini termasuk jumlah dan kondisi dari alat transportasi tersebut.
4. Alat kesehatan: jenis, jumlah, dan kondisi
5. Obat-obatan: jenis dan jumlah
6. Buku Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, Standar Prosedur Operasional untuk Upaya Kesehatan Wajib dan Upaya Kesehatan Pengembangan
7. Dana operasional Puskesmas: Alokasi dan Realisasi

2.3.2. INDIKATOR PROSES

Indikator-indikator proses untuk Puskesmas diklasifikasikan ke dalam kelompok:

- A. Perencanaan (P1), meliputi keberadaan dokumen perencanaan:
 - 1. Bulanan,
 - 2. Tribulanan, dan
 - 3. Tahunan

- B. Penggerakan dan Pelaksanaan, meliputi:
 - 1. Dokumen pencatatan dan pelaporan, Sistem Pencatatan dan Pelaporan Tingkat Puskesmas (SP2TP) dan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)
 - 2. Pembagian tugas/pekerjaan jelas dan tertulis
 - 3. Pembagian daerah binaan
 - 4. Penetapan penanggung jawab Program

- C. Pembinaan dan pengawasan penilaian, meliputi:
 - 1. Bimbingan
 - 2. Monitoring: Terencana, Insidental, metode
 - 3. Evaluasi: Penilaian Kinerja

- D. Manajemen operasional Puskesmas, meliputi:
 - 1. Membuat data pencapaian/cakupan kegiatan pokok tahun lalu
 - 2. Menyusun RUK melalui analisis dan perumusan masalah berdasarkan prioritas
 - 3. Menyusun RPK secara rinci dan lengkap
 - 4. Melaksanakan lokakarya mini bulanan
 - 5. Melaksanakan lokakarya mini tribulanan (lintas sektoral)
 - 6. Membuat dan mengirimkan laporan bulanan ke Kabupaten/kota
 - 7. Program Jaminan Mutu
 - 8. Penilaian kepuasan pasien

- E. Manajemen alat dan obat, meliputi:
 - 1. Membuat kartu inventarisasi dan menempatkan di masing-masing ruangan
 - 2. Melaksanakan up dating daftar inventaris alat
 - 3. Mencatat penerimaan dan pengeluaran obat/bahan di gudang secara rutin
 - 4. Menerapkan pendekatan *First In First Out* (FIFO) dan FEFO

2.3.3. INDIKATOR OUTPUT

A. Utilisasi (*outreach*)

1. Dalam gedung, artinya kegiatan-kegiatan upaya kesehatan yang dilakukan didalam gedung, misalnya pemeriksaan gigi.
2. Luar gedung, artinya kegiatan-kegiatan upaya kesehatan di masyarakat, misalnya puskesmas keliling, imunisasi.

B. Target cakupan pelayanan kesehatan

1. Upaya kesehatan wajib

- (1) Promosi Kesehatan,
- (2) Kesehatan lingkungan,
- (3) KIA,
- (4) Upaya perbaikan gizi masyarakat,
- (5) Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular,
- (6) Upaya pengobatan.

2. Upaya kesehatan pengembangan (penambahan atau inovasi) :

- (1) Rawat inap dan PONED
- (2) Usaha Kesehatan Sekolah
- (3) Kesehatan Gigi dan Mulut
- (4) Kesehatan usia lanjut,
- (5) Upaya kesehatan mata,
- (6) Kesehatan jiwa,
- (7) Kesehatan olah raga,
- (8) Perawatan Kesehatan Masyarakat,
- (9) Pembinaan Pengobatan Tradisional,
- (10) Kesehatan kerja
- (11) Kesehatan haji

3. Layanan Penunjang, meliputi:

- (1) Laboratorium
- (2) Farmasi
- (3) Gawat darurat bencana
- (4) Puskesmas keliling

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. RANCANGAN PENELITIAN

Rancangan Riset Fasilitas Kesehatan adalah studi potong lintang (*cross sectional*).

3.2. POPULASI dan SAMPEL

3.2.1. POPULASI PENELITIAN

Populasi penelitian adalah puskesmas di seluruh Provinsi Riau.

3.2.2. SAMPEL PENELITIAN

Pada perencanaan awal, sampel penelitian adalah seluruh puskesmas yang terdaftar di Pusdatin seperti terlihat pada tabel 3.1. Namun sesudah dilaksanakan rapat kordinasi teknis dengan dinas Kesehatan provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota disepakati sampel Puskesmas adalah semua Puskesmas yang terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Sensus). Puskesmas yang akan didatangi hanya Puskesmas yang sudah berfungsi sebelum bulan Februari 2010, sedangkan puskesmas lainnya informasinya diambil di Dinas kesehatan Kabupaten/Kota saja. Hasil pengumpulan data dari 305 puskesmas, 195 Puskesmas yang dianalisis yaitu Puskesmas yang sudah berfungsi sebelum Februari 2010.

3.3. RESPONDEN

Responden di puskesmas meliputi :

1. Kepala Puskesmas
2. Staf puskesmas terkait
3. Pengelola informasi puskesmas

Tabel 3.1. Jumlah Puskesmas Per Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS
1	Kuantan Singingi	17
2	Indragiri Hulu	17
3	Indragiri Hilir	23
4	Pelalawan	12
5	Siak	14
6	Kampar	26
7	Rokan Hulu	21
8	Bengkalis	11
9	Rokan Hilir	16
10	Kepulauan Meranti	8
11	Kota Pekanbaru	19
12	Kota Dumai	9
	JUMLAH	193

Sumber: Pusdatin, 2010

3.4. PENGUMPULAN DATA

3.4.1. JENIS DATA YANG DIKUMPULKAN

Secara umum data yang dikumpulkan meliputi: Identitas tempat, karakteristik, Input (sumber daya manusia, fasilitas fisik, peralatan, pedoman dan ketatausahaan), proses (perencanaan, penggerakan-pelaksanaan, pengawasan penilaian dan pengendalian), dan out kegiatan.

Kuesioner Puskesmas terdiri dari 16 Blok sebagai berikut :

Blok I	:	Pengenalan Tempat
Blok II	:	Keterangan Pengumpul Data
Blok III	:	Karakteristik Puskesmas
Blok IV	:	Sumber Daya Manusia
Blok V	:	Fasilitas Fisik
Blok VI	:	Ketatausahaan (Tu)
Blok VII	:	Manajemen
Blok VIII	:	Pelayanan Kesehatan
Blok IX	:	Pelayanan Rawat Inap
Blok X	:	Puskesmas Sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat A. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat B. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
Blok XI	:	Puskesmas Sebagai Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan
Blok XII	:	Pustu Dan Bidan Desa
Blok XIII	:	Jaringan Pelayanan Kesehatan Dasar
Blok XIV	:	Rumah Dinas
Blok XV	:	Alat Kesehatan Dalam Gedung
Blok XVI	:	Alat Kesehatan Luar Gedung

3.4.2. PENGUMPUL DATA

Pengumpul data adalah petugas yang direkrut Badan Litbangkes, yang berasal dari Politeknik Kesehatan (Poltekkes), kalangan Universitas (perguruan tinggi), Dinas kesehatan Kabupaten/Kota ataupun masyarakat umum yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, baik di tingkat Pusat maupun daerah. Petugas pengumpul data di Puskesmas harus memenuhi kualifikasi latar belakang pendidikan D3 di bidang kesehatan. Sebelum melakukan pengumpulan data, setiap petugas mendapat pelatihan terlebih dahulu.

3.4.3. CARA PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data merupakan faktor penentu dan bagian penting dari rangkaian kegiatan survei sehingga data yang dikumpulkan terhindar dari bias, akurat, valid dan dapat diandalkan. Pengumpulan data dilakukan melalui :

1. *Interview* (wawancara) dengan menggunakan kuesioner
2. Pengamatan/ observasi langsung
3. Data sekunder, dikumpulkan dengan memperhatikan/ *check* dokumen yang ada di puskesmas.

Pada pengumpulan data, enumerator/ pengumpul data diharuskan memperhatikan etika sebagai berikut

1. Tim pengumpul data harus menghormati norma sosial setempat. Upayakan agar kunjungan ke Puskesmas dapat diatur sedemikian rupa sehingga seluruh responden sedang berada di tempat. Oleh karena itu, enumerator harus membuat perjanjian waktu terlebih dahulu sebelum berkunjung.
2. Pada waktu menggali informasi dari responden, pewawancara harus menciptakan suasana yang baik. memperhatikan dan bersikap netral terhadap respons dari responden, tidak memberi kesan memaksa. tidak emosi, tidak mengarahkan, dapat menghindari percakapan yang menyimpang atau bertele-tele. meminta izin sebelumnya untuk pertanyaan yang sensitif.
3. Setelah selesai melakukan wawancara, mengucapkan terima kasih pada saat berpamitan.

Untuk mengendalikan mutu hasil wawancara dilakukan hal seperti berikut:

1. Tim pewawancara harus bekerjasama dengan baik selama melaksanakan tugas di lapangan. Ketua Tim (Katim) harus dapat membagi tugas lapangan (dalam proses pengumpulan data) secara seimbang, baik untuk dirinya sendiri dan maupun untuk anggota tim pengumpul data yang lain.
2. Semua enumerator bertanggung jawab melakukan editing terhadap hasil wawancara yang telah dikumpulkan dan harus diverifikasi oleh Katim, segera setelah pengumpulan data dianggap selesai. Ketua tim meneliti **kelengkapan dan konsistensi** jawaban pada kuesioner yang telah diisi, segera setelah diserahkan oleh pewawancara.
3. Kualitas yang tinggi dari data yang dikumpulkan dapat dicapai apabila wawancara sudah diverifikasi dengan observasi yang cermat dan dilakukan mengikuti prosedur yang benar.
4. Apabila dalam hal-hal tertentu ada permasalahan dalam pengisian kuesioner yang tidak bisa diselesaikan oleh tim, maka tim segera menghubungi Penanggung Jawab Teknis (PJT) Kabupaten/Kota dan akan didiskusikan bersama dengan PJO Kabupaten/Kota, jika perlu berkoordinasi dengan PJT dan atau PJO Provinsi.

Kuesioner yang sudah selesai diedit oleh Ka Tim, diserahkan pada PJT Kab/Kota untuk selanjutnya dibawa ke Tim Manajemen Data. Sementara kuesioner yang belum terisi lengkap saat PJT Kab/Kota kembali ke Pusat, dilengkapi dan diserahkan kepada PJT Kab/Kota. Untuk selanjutnya dikirim via pos/paket ke Tim Manajemen Data.

3.5. PENGOLAHAN DATA

Pengolahan data yang direncanakan meliputi:

1. Deskriptif nasional dan provinsi
2. Peta wilayah
3. Analisis untuk menghasilkan berbagai indikator adekuasi, *apropriateness*, kinerja (efektivitas dan efisiensi), dan mutu.
4. Penyusunan Indeks Kinerja Puskesmas

Buku ini hanya memuat hasil analisis deskriptif.

3.6. RINCIAN KEGIATAN

Kegiatan di dalam Riset Fasilitas Kesehatan ini meliputi:

3.6.1. TAHAP PERSIAPAN

3.6.1.1. Telaah Dokumen (*document review*)

Kegiatan ini diperlukan untuk menyusun protokol pelaksanaan penelitian, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

3.6.1.2. Pertemuan Konsinyasi Lintas Program dan Organisasi Profesi

Pertemuan ini dimaksudkan untuk memperoleh dukungan lintas program dalam persiapan dan pelaksanaan Riset Fasilitas Kesehatan tahun 2011. Pada pertemuan ini antara lain menghasilkan:

- a. Indikator-indikator kinerja Puskesmas dari unit-unit utama Kementerian Kesehatan yang terkait dan Organisasi Profesi
- b. Tersosialisasinya rencana kegiatan Riset Fasilitas Pelayanan Kesehatan tahun 2011
- c. Adanya pemahaman tentang perlu dan manfaat dari kegiatan Riset Fasilitas Pelayanan Kesehatan tahun 2011

3.6.1.3. Pertemuan Pakar

Pertemuan ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan-masukan dari para pakar dalam pengembangan indikator RIFAS 2011.

Pada pertemuan ini dihasilkan antara lain:

- a. Perumusan indikator Rifas 2011 untuk Puskesmas
- b. Sosialisasi pelaksanaan Riset Fasilitas 2011
- c. Pengembangan jejaring dalam pelaksanaan Riset Fasilitas 2011
- d. Masukan pakar dalam pelaksanaan Riset Fasilitas 2011

3.6.1.4. Penyusunan Instrumen

Pertemuan ini bertujuan untuk menyusun instrumen penelitian Riset Fasilitas Pelayanan Kesehatan tahun 2011, meliputi instrumen RIFAS Puskesmas. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan dan berbagai masukan yang diterima melalui serangkaian pertemuan (diskusi). Kuesioner Puskesmas dikembangkan

dengan mempertimbangkan jenis (Puskesmas dengan fasilitas rawat inap dan non rawat inap) dan lokasi (perkotaan dan perifer) Puskesmas.

3.6.1.5. Uji coba instrumen

Uji coba instrumen dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai validitas dan reliabilitas draft instrumen Riset Fasilitas 2011. Tujuan kegiatan uji coba instrumen adalah:

- a. Diperoleh hasil uji coba instrumen riset fasilitas pelayanan kesehatan
- b. Diperolehnya gambaran untuk manajemen data hasil penelitian
- c. Diperolehnya masukan-masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan instrumen

Uji coba kuesioner Puskesmas dilakukan di 21 Puskesmas yang berbeda dengan mempertimbangkan keterwakilan Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap (dengan tempat tidur) dan Puskesmas non rawat inap (non tempat tidur), daerah perkotaan (urban) dan daerah perifer (*remote*). Puskesmas yang menjadi sampel dalam uji coba instrumen untuk masing-masing provinsi: 1 Puskesmas perawatan dan 2 *nonperawatan* (1 di perkotaan dan 1 di *remote area*) di Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Timur.

3.6.1.6. Penyusunan *Plan of Action* (POA) Pelaksanaan

Tujuan pertemuan ini adalah tersusunnya perencanaan pelaksanaan (*plan of action*) Riset Fasilitas Pelayanan Kesehatan tahun 2011.

3.6.2. TAHAP PELAKSANAAN

Riset Fasilitas dilaksanakan pada tahun 2011. Pengumpulan data dilakukan antara bulan Juli sampai dengan pertengahan Oktober 2011. Pengorganisasian Rifaskes 2011 meliputi tingkat Pusat, tingkat Wilayah, tingkat Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota. Susunan organisasi Rifaskes tingkat Pusat terdiri dari Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Pelaksana Harian, Tim Manajemen, Tim Teknis, Tim Manajemen Data (Mandat) dan Tim Analisis Data (Andat).

3.6.2.1. Pengorganisasian Lapangan

Untuk memudahkan pengumpulan data dan menjaga kualitas data pelaksanaan pengumpulan dibagi dalam 4 wilayah. Setiap koordinator wilayah bertanggung jawab pada 8-9 provinsi. Koordinator Wilayah (korwil) terdiri dari Ketua, 1-2 orang Wakil Ketua, Penanggung Jawab Teknis Provinsi (PJT) dan Penanggung Jawab Administrasi.

Korwil 1. Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan (Pusat 1) bertanggung jawab mengkoordinasi kegiatan Rifas di delapan (8) provinsi, yaitu: DKI Jakarta, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan dan Papua

Korwil 2. Pusat Teknologi Kesehatan Terapan dan Epidemiologi Klinik (Pusat 2) bertanggung jawab mengkoordinasi kegiatan Rifas di delapan (8) provinsi, yaitu: Aceh, Jambi, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, dan Papua Barat.

Korwil 3. Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat (Pusat 3) bertanggung jawab mengkoordinasi kegiatan Rifas di Sembilan (9) provinsi, yaitu: Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

Korwil 4. Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pusat 4) bertanggung jawab mengkoordinasi kegiatan Rifas di delapan (8) provinsi, yaitu: Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Barat.

3.6.2.2. Penyusunan Pedoman Instrumen

Sebagai perlengkapan pengumpulan data terlebih dahulu disiapkan formulir yang akan diisi oleh petugas. Sebagai pedoman cara pengisian formulir dibuat pedoman teknis instrumen Riset Fasilitas 2011. Pada pengumpulan data ini dibuat 4 pedoman teknis yaitu: pedoman teknis instrumen Puskesmas Riset Fasilitas 2011, serta pedoman teknis pertanggungjawaban keuangan Riset Fasilitas 2011. Pedoman Instrumen Riset fasilitas 2011 diperlukan sebagai acuan agar terjadi kesamaan di dalam definisi operasional dan pemaknaan dari instrumen yang sudah disusun.

Penyusunan pedoman instrumen dimaksudkan sebagai bagian dari upaya jaga mutu yang dilakukan agar data yang dikumpulkan didasarkan pada kesamaan pemahaman dari enumerator yang akan menghasilkan data yang valid. Penyusunan pedoman instrumen dilakukan melalui serangkaian diskusi yang melibatkan narasumber terkait dan kerja tim sehingga menghasilkan pedoman instrumen yang meliputi instrumen untuk pengambilan data Puskesmas.

3.6.2.3. Pertemuan Tim Manajemen

Tujuan dari kegiatan ini adalah menjamin pelaksanaan Riset Fasilitas dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pada pertemuan ini dihasilkan yaitu :

- a. Rencana teknis pelaksanaan Riset Fasilitas 2011.
- b. Identifikasinya potensi permasalahan dan masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan Riset Fasilitas 2011.
- c. Identifikasinya alternatif-alternatif pemecahan masalah dalam pelaksanaan Riset Fasilitas 2011.

Pertemuan tim manajemen merupakan salah satu bentuk dari upaya jaga mutu pelaksanaan Riset Fasilitas 2011. Pada tahap-tahap awal, pertemuan tim manajemen dilakukan untuk mematangkan perencanaan dan mempersiapkan penunjang pelaksanaan Rifas. Ketika Rifas berjalan, pertemuan tim manajemen dilakukan dengan maksud melakukan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan Riset Fasilitas 2011 dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pertemuan tim internal manajemen melibatkan tim inti, tim manajemen data, dan tim administrasi. Pelaksana kegiatan adalah Tim Riset Fasilitas 2011

3.6.2.4. Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi

Rapat koordinasi tingkat provinsi bertujuan untuk koordinasi persiapan pelaksanaan Riset Fasilitas 2011 di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Beberapa tujuan khusus rapat Koordinasi antara lain :

- a. Sosialisasi pelaksanaan Riset Fasilitas 2011
- b. Teridentifikasinya faktor penghambat dalam pelaksanaan Rifas 2011
- c. Teridentifikasinya faktor penunjang dan potensi untuk pelaksanaan Riset Fasilitas 2011
- d. Tersusunnya alternatif pemecahan untuk mengatasi faktor penghambat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Riset Fasilitas 2011
- e. Tersusunnya rencana pelaksanaan dan mekanisme kerja Riset Fasilitas 2011 di setiap daerah
- f. Tersedianya tenaga penanggungjawab operasional Rifas 2011 di setiap daerah

Rapat Koordinasi Riset Fasilitas 2011 tingkat Provinsi dilaksanakan di seluruh provinsi dan dilakukan di ibukota provinsi. Rapat ini diikuti oleh pelaksana Riset Fasilitas 2011 (tim pusat yang terdiri dari ketua dan wakil penanggungjawab propinsi, tim administrasi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi).

Rapat Koordinasi Riset Fasilitas 2011 diikuti oleh pimpinan institusi terkait dengan harapan akan dilakukan sosialisasi dan persiapan pelaksanaan Riset Fasilitas di masing-masing fasilitas kesehatan yang dipimpinnya atau di setiap puskesmas yang berada di wilayah kerjanya. Kegiatan Rapat Koordinasi Riset Fasilitas 2011 dilakukan di ibukota 33 provinsi di Indonesia. Sebagai pelaksana kegiatan adalah seluruh Satuan kerja (satker) di lingkungan Badan Litbang Kesehatan.

3.6.2.5. *Workshop* Fasilitator Tingkat Pusat

Workshop fasilitator Riset Fasilitas dilakukan dengan pertimbangan bahwa perlu adanya pendelegasian dan penyebarluasan pemahaman substansi Riset Fasilitas 2011 mengingat rentang kendali (*span of control*) kegiatan Rifas 2011 yang cukup lebar. Tujuan dari kegiatan ini agar peserta *workshop* mampu untuk memberikan materi dan arahan mengenai Riset Fasilitas pada Penanggungjawab Teknis (PJT) kabupaten/kota dan enumerator Riset Fasilitas 2011, dan memahami substansi, instrumen yang digunakan, serta mekanisme pertanggungjawaban administrasi Riset Fasilitas 2011. Melalui kegiatan ini peserta mampu memahami substansi Riset Fasilitas 2011, memahami instrumen Riset Fasilitas 2011, dan memahami mekanisme pertanggungjawaban administrasi.

Workshop diikuti oleh seluruh Penanggungjawab Teknis (PJT) Provinsi Riset Fasilitas 2011, Koordinator Wilayah, dan panitia. Pelatihan dilakukan selama 5 hari dengan berbagai materi yang terkait dengan pelaksanaan Riset Fasilitas 2011, meliputi pemahaman mengenai kebijakan umum Puskesmas, indikator-indikator penelitian, cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, mekanisme dan alur kerja, pemahaman instrumen yang digunakan, serta pertanggungjawaban keuangan.

3.6.2.6. *Workshop* Penanggung jawab Teknis Kabupaten/Kota

Tujuan *workshop* agar peserta *workshop* mampu untuk memberikan pemahaman mengenai substansi dan pertanggungjawaban administrasi Riset Fasilitas 2011 pada enumerator. Melalui kegiatan ini, peserta *workshop* mampu memahami substansi Riset Fasilitas 2011, memahami instrumen Riset Fasilitas 2011, dan memahami mekanisme pertanggungjawaban administrasi Riset Fasilitas 2011

Workshop penanggungjawab teknis kabupaten/kota diikuti oleh seluruh Penanggungjawab Teknis (PJT) kabupaten/kota, Koordinator Wilayah, pembantu administrasi (PA) dan panitia. Pelatihan dilakukan selama 7 hari dengan berbagai materi yang terkait dengan pelaksanaan Riset Fasilitas 2011, meliputi pemahaman mengenai kebijakan umum puskesmas, indikator-indikator penelitian, cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, mekanisme dan alur kerja, pemahaman instrumen yang digunakan, serta pertanggungjawaban keuangan.

Workshop ini khususnya ditujukan untuk PJT kabupaten/kota dan tenaga Pembantu Administrasi (PA). *Workshop* untuk PJT kabupaten/kota dilakukan oleh fasilitator tingkat pusat dengan dukungan dari Tim Manajemen Rifas 2011. Peserta *workshop* dapat memberikan pengarahan dan pemahaman untuk enumerator. Hal ini dilakukan mengingat akan ada sekitar 3352 enumerator Riset Fasilitas 2011 yang direkrut sehingga perlu adanya penyebaran pemahaman pelaksanaan Riset Fasilitas kepada PJT kabupaten/kota yang selanjutnya akan terlibat di dalam pelaksanaan *workshop* untuk enumerator.

3.6.2.7. *Workshop* Enumerator

Workshop untuk enumerator dilakukan dengan pertimbangan bahwa perlu adanya penyamaan pemahaman substansi Riset Fasilitas 2011 kepada enumerator Rifas 2011. Dengan pemahaman yang baik, enumerator dapat mengumpulkan data dengan benar sehingga akan menghasilkan kualitas data yang baik. Tujuan umum dari *workshop* ini agar peserta *workshop* mampu untuk melakukan pengumpulan data Riset Fasilitas 2011 dengan baik, memahami substansi Riset Fasilitas 2011, memahami instrumen Riset Fasilitas 2011, dan memahami mekanisme pertanggungjawaban administrasi Riset Fasilitas 2011

Workshop enumerator secara nasional diikuti oleh seluruh enumerator Riset Fasilitas, enumerator untuk Puskesmas. *Workshop* dilakukan selama 5 hari dengan berbagai materi yang terkait dengan pelaksanaan Riset Fasilitas 2011, meliputi pemahaman mengenai kebijakan umum puskesmas, indikator-indikator penelitian, cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, mekanisme dan alur kerja, pemahaman instrumen yang digunakan, serta pertanggungjawaban keuangan.

Workshop enumerator dilakukan terhadap 3352 enumerator Rifas 2011, dengan rincian 2186 enumerator puskesmas dan 498 orang tim entri data. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi paparan/presentasi dan tanya jawab, diskusi, dan praktek lapangan. *Workshop* dilakukan di ibukota propinsi. Pelaksanaan *workshop* dilakukan sesuai dengan kesediaan waktu masing-masing propinsi.

3.6.2.8. Pengumpulan Data

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data Riset Fasilitas di Puskesmas yang meliputi data input, proses, dan output. Kegiatan pengumpulan data riset fasilitas kesehatan, dilaksanakan di seluruh Puskesmas sebanyak 9.188 buah.

Riset fasilitas kesehatan untuk Puskesmas dilakukan secara total *coverage*. Ruang lingkup kegiatan meliputi: input, proses, output dan outcome pelayanan kesehatan di Puskesmas. Pengumpulan data dilakukan di setiap Puskesmas dengan cara mendatangi langsung fasilitas kesehatan tersebut dan melakukan wawancara terhadap responden terkait, pengamatan (observasi) dan telaah terhadap data sekunder yang ada.

3.6.2.9. Validasi Studi

Kegiatan validasi studi merupakan salah satu bentuk dari upaya jaga mutu pelaksanaan Riset Fasilitas 2011. Dilakukan oleh Akademisi dari beberapa universitas (perguruan tinggi), untuk melihat gambaran seberapa valid hasil Riset Fasilitas Kesehatan 2011. Validasi studi dilakukan oleh tim khusus dari Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, dan Universitas Hasanuddin.

3.6.2.10. Pengolahan Data

Pengolahan data meliputi *data editing*, *data entry*, *data cleaning*, dan *data processing*. Pelaksanaan pengolahan data dilakukan oleh 2 tim yaitu tim manajemen data dan tim analisis data. Tim manajemen data (mandat) bertanggung jawab pada data sejak diterima dari enumerator hingga data siap dianalisa. Sedangkan tim analisis data bertanggung jawab pada pembuatan *syntax*, *dummy table* dan mengeluarkan hasil.

3.6.2.11. Analisa Data

Analisa data meliputi: deskriptif nasional dan wilayah, Peta wilayah, analisis untuk menghasilkan berbagai indikator adekuasi, *apropriateness*, kinerja (efektivitas dan efisiensi), dan mutu, dan penyusunan Indeks Kinerja Puskesmas.

BAB IV HASIL

4.1. JUMLAH PUSKESMAS

Analisis deskriptif hasil Rifaskes 2011 untuk Puskesmas dilakukan berdasarkan seluruh Puskesmas yang ada di Provinsi Riau. Jumlah Puskesmas yang berhasil dikunjungi dan dilakukan pengumpulan data adalah sejumlah 195 Puskesmas yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota. Pada tabel 4.1.1. disajikan distribusi Puskesmas tersebut.

Tabel 4.1.1.
Jumlah Puskesmas di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Puskesmas beroperasi sebelum Februari 2010 dan dikunjungi	Puskesmas tidak dikunjungi karena beroperasi setelah Januari 2010	Puskesmas tidak dikunjungi karena merupakan daerah sulit	Total Jumlah Puskesmas
1	Kuantan Singingi	21	0	0	21
2	Indragiri Hulu	16	1	0	17
3	Indragiri Hilir	25	0	0	25
4	Pelalawan	12	0	0	12
5	Siak	14	0	0	14
6	Kampar	26	2	0	28
7	Rokan Hulu	19	2	0	21
8	Bengkalis	11	0	0	11
9	Rokan Hilir	15	1	0	16
10	Kepulauan Meranti	8	0	0	8
11	Kota Pekanbaru	19	1	0	20
12	Kota Dumai	9	0	0	9
Riau		195	7	0	202

Dari total jumlah puskesmas, didapatkan bahwa ada 195 puskesmas yang dikunjungi, 7 Puskesmas tidak dikunjungi karena beroperasi setelah Januari 2010, tidak ada Puskesmas yang tidak dikunjungi karena akses yang sulit dan sebagainya. Analisis disepakati hanya pada Puskesmas yang sudah berfungsi sebelum Februari 2010 (ada di daftar sampel ataupun tidak), yaitu sejumlah 195 Puskesmas.

Pada tabel 4.1.2 Puskesmas diklasifikasikan berdasarkan lokasi, secara keseluruhan di provinsi Riau terdapat 53 puskesmas perkotaan dan 142 puskesmas perdesaan. Jenis Puskesmas diklasifikasikan menjadi dua: Puskesmas Perawatan dan Puskesmas Non-Perawatan. Yang dimaksud dengan Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang menjalankan fungsi perawatan. Untuk menjalankan fungsinya biasanya Puskesmas diberikan tambahan ruangan dan fasilitas rawat inap yang merupakan pusat rujukan antara. Dari tabel

4.1.3 dapat dilihat sebaran Puskesmas Perawatan dan Puskesmas Non-Perawatan di 12 Kabupaten/Kota yang dianalisis dari 195 Puskesmas. Dapat dilihat bahwa secara keseluruhan terdapat 58 Puskesmas Perawatan (29,7%) dan 137 Puskesmas Non Perawatan (70,3%) di Provinsi Riau. Jumlah Puskesmas Perawatan terbanyak yang dari total Puskesmas adalah di Kabupaten Kuantan Singingi (47,6%). Sementara Kabupaten/Kota terendah yaitu Kabupaten Indragiri Hilir (16%), diikuti oleh Kabupaten Kepulauan Meranti (25%).

Tabel 4.1.2.

Jumlah dan Persentase Puskesmas menurut Lokasi di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Lokasi			
			Perkotaan		Perdesaan	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Kuantan Singingi	21	2	9.5	19	90.4
2	Indragiri Hulu	16	4	25.0	12	75.0
3	Indragiri Hilir	25	4	16.0	21	84.0
4	Pelalawan	12	1	8.3	11	91.6
5	Siak	14	2	14.2	12	85.7
6	Kampar	26	2	7.6	24	92.3
7	Rokan Hulu	19	4	21.0	15	78.9
8	Bengkalis	11	3	27.2	8	72.7
9	Rokan Hilir	15	1	6.6	14	93.3
10	Kepulauan Meranti	8	2	25.0	6	75.0
11	Kota Pekanbaru	19	19	100	0	0
12	Kota Dumai	9	9	100	0	0
Riau		195	53	27.2	142	72.8

Tabel 4.1.3.

Jumlah dan Persentase Puskesmas menurut Jenis Puskesmas, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Jenis			
			Perawatan		Non Perawatan	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Kuantan Singingi	21	10	47.6	11	52.4
2	Indragiri Hulu	16	4	25.0	12	75.0
3	Indragiri Hilir	25	4	16.0	21	84.0
4	Pelalawan	12	4	33.3	8	66.7
5	Siak	14	5	35.7	9	64.3
6	Kampar	26	7	26.9	19	73.1
7	Rokan Hulu	19	5	26.3	14	73.7
8	Bengkalis	11	4	36.4	7	63.6
9	Rokan Hilir	15	5	33.3	10	66.7
10	Kepulauan Meranti	8	2	25.0	6	75.0
11	Kota Pekanbaru	19	5	26.3	14	73.7
12	Kota Dumai	9	3	33.3	6	66.7
Riau		195	58	29.7	137	70.3

4.2. FASILITAS PELAYANAN LAIN DI PUSKESMAS

Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah Kecamatan, selain mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan dasar/wajib dan pengembangan, juga diperkenankan untuk memberikan fasilitas pelayanan lainnya. Fasilitas tersebut yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011, antara lain ditanyakan tentang ada/tidak ada PONE (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar).

Tabel 4.2.1.
Persentase Puskesmas dengan Fasilitas PONE Menurut Jenis Puskesmas di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Puskesmas Perawatan		Puskesmas Non Perawatan	
			% PONE	% Non PONE	% PONE	% Non PONE
1	Kuantan Singingi	21	19.0	28.6	0	52.4
2	Indragiri Hulu	16	0	25.0	0	75.0
3	Indragiri Hilir	25	12.0	4.0	12.0	72.0
4	Pelalawan	12	8.3	25.0	0	66.7
5	Siak	14	0	35.7	7.1	57.1
6	Kampar	26	7.7	19.2	3.8	69.2
7	Rokan Hulu	19	26.3	0	0	73.7
8	Bengkalis	11	36.4	0	0	63.6
9	Rokan Hilir	15	13.3	20.0	20.0	46.7
10	Kepulauan Meranti	8	0	25.0	0	75.0
11	Kota Pekanbaru	19	0	26.3	0	73.7
12	Kota Dumai	9	11.1	22.2	0	66.7
Riau		195	11.3	18.5	4.1	66.2

Puskesmas PONE adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetrik (kebidanan) dan neonatus emergensi dasar. Pada umumnya, Puskesmas dimaksud mempunyai fasilitas rawat inap. Dari Rifaskes 2011, terdata bahwa fasilitas PONE dimiliki oleh 11,3 persen Puskesmas Perawatan dan 4,1% Puskesmas Non Perawatan, yang tersebar di Provinsi Riau. Kabupaten yang memiliki Fasilitas PONE di Puskesmas Perawatan terbanyak yaitu Kabupaten Bengkalis (36,4%), Rokan hulu (26,3%) dan Kuantan Singingi (19,0%). Sementara ada 4 Kabupaten/Kota yang tidak memiliki fasilitas PONE di Puskesmas Perawatan (0%) yaitu Indragiri Hulu, Siak, Kepulauan Meranti, dan Kota Pekanbaru.

4.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Puskesmas merupakan unit pelaksana pembangunan kesehatan terdepan yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat. Keberhasilan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat sangat tergantung dari kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan yang ada. Yang dimaksud tenaga kesehatan di Puskesmas adalah semua orang yang bekerja secara aktif dan profesional di bidang kesehatan. Selain itu dalam memberikan pelayanan kesehatan perlu pula dipertimbangkan distribusi tenaga kesehatan tersebut.

Analisis deskriptif tenaga kesehatan di Puskesmas dari hasil Rifaskes 2011 ditujukan untuk mengetahui ketersediaan tenaga Puskesmas dan penyebarannya di 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Analisis dilakukan pada 195 Puskesmas dari 202 Puskesmas yang dikunjungi di 12 Kabupaten/Kota. Analisis disepakati hanya pada Puskesmas yang sudah berfungsi sebelum Februari 2010.

Tabel 4.3.1.a.
Persentase Puskesmas Berdasarkan Ketersediaan Sumber Daya Tenaga
di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Dokter		Dokter Gigi		Perawat		Bidan	
			% Ada	Jml Rata-rata/Pusk	% Ada	Jml Rata-rata/Pusk	% Ada	Jml Rata-rata/Pusk	% Ada	Jml Rata-rata/Pusk
1	Kuantan Singingi	21	100	1.6	66.7	0.7	100	12.0	100	14.6
2	Indragiri Hulu	16	100	3.4	68.8	0.9	100	15.9	100	20.6
3	Indragiri Hilir	25	100	1.4	48.0	0.6	100	16.4	100	14.3
4	Pelalawan	12	100	3.1	83.3	1.2	100	13.3	100	16.7
5	Siak	14	100	3.6	92.9	1.4	100	23.8	100	21.6
6	Kampar	26	100	2.6	80.8	1.4	100	14.2	100	16.4
7	Rokan Hulu	19	100	2.1	100	1.1	100	11.4	100	14.8
8	Bengkalis	11	100	3.8	100	1.5	100	12.4	100	9.8
9	Rokan Hilir	15	100	3.0	73.3	0.9	93.3	26.4	93.3	23.1
10	Kepulauan Meranti	8	100	1.9	87.5	1.1	100	10.5	100	12.1
11	Kota Pekanbaru	19	100	3.9	100	1.7	100	10.6	100	8.5
12	Kota Dumai	9	100	6.1	100	2.1	100	16.4	100	15.9
Riau		195	100	2.8	80.5	1.2	99.5	15.2	99.5	15.7

Analisis dilakukan pada tenaga Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Sanitarian, Tenaga Gizi dan Promkes. Untuk setiap jenis tenaga dilihat keberadaannya dan jumlah rata-rata per Puskesmas, seperti dapat dilihat pada tabel 4.3.1.a. dan 4.3.1.b.

Untuk keberadaan Dokter (Tabel 4.3.1.a.) hampir seluruh Puskesmas di Provinsi Riau sudah memiliki tenaga dokter (100%) dengan jumlah rata-rata 2.8 per Puskesmas. seluruh Puskesmas telah memiliki tenaga Dokter (100%), dengan rata-rata keberadaan dokter terendah Kabupaten Indragiri hilir 1,4, Kuantan Sengingi 1,6 dan Kepulauan Meranti 1,9.

Untuk keberadaan Dokter Gigi, 80,5% Puskesmas di Provinsi Riau yang memiliki dokter gigi, dengan jumlah rata-rata 1,2 per Puskesmas. Puskesmas yang sudah memiliki dokter gigi paling banyak di Kota yaitu Kota Dumai (100%) dengan rata-rata 2,1 per

Laporan Provinsi Riau Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Puskesmas, kemudian Kota Pekanbaru (100%) dengan rata-rata 1,7 per Puskesmas, Kabupaten Bengkalis (100%) dengan rata-rata 1,5 per Puskesmas dan Kabupaten Rokan Hulu (100%) dengan rata-rata 1,1 per Puskesmas. Sementara di Kabupaten Indragiri Hilir (48 %) dengan rata-rata 0,6 per Puskesmas, kemudian Kuantan Singingi (66,7%) dengan rata-rata hanya 0,7 per Puskesmas dan Indragiri Hulu (68,8%) dengan rata-rata 0,9 per Puskesmas.

Deskripsi keberadaan Perawat menunjukkan bahwa hampir 100 persen (96,6%) Puskesmas di Provinsi Riau telah memiliki tenaga Perawat dengan jumlah rata-rata 16,73 per Puskesmas. 14 Kabupaten/Kota telah memiliki tenaga Perawat di seluruh Puskesmas, sementara di Kabupaten Banyu Asin belum semua Puskesmas memiliki tenaga Perawat, namun dengan jumlah rata-rata 9,55 tenaga Perawat per Puskesmas, artinya distribusi tenaga Perawat di Kabupaten Banyu Asin belum merata.

Keberadaan Bidan di Provinsi Riau juga hampir 100 persen (99,5%) dengan jumlah rata-rata 15,2 Perawat per Puskesmas. sementara Kabupaten Rokan Hilir belum semua Puskesmas mempunyai tenaga Perawat tetapi jumlah rata-rata mencapai 26,4. Hampir Seluruh Puskesmas mempunyai (99,5%) di Kabupaten/Kota telah memiliki tenaga Bidan, sementara di Kabupaten Rokan Hilir belum semua Puskesmas memiliki tenaga Bidan, Akan tetapi jumlah rata-rata Bidan di Kabupaten tersebut cukup banyak, masing-masing 23,1. Tenaga bidan merupakan tenaga yang sangat penting di Puskesmas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan tenaga bidan, seperti juga perawat, diharapkan ada di seluruh Puskesmas.

Tabel 4.3.1.b.

Persentase Puskesmas Berdasarkan Ketersediaan Sumber Daya Tenaga
di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Sanitarian		Tenaga Gizi		Promkes	
			% Ada	Jml Rata-rata/Pusk	% Ada	Jml Rata-rata/Pusk	% Ada	Jml Rata-rata/Pusk
1	Kuantan Singingi	21	47.6	0.6	71.4	0.9	4.8	0
2	Indragiri Hulu	16	62.5	0.9	62.5	0.6	18.8	0.2
3	Indragiri Hilir	25	64.0	0.8	36.0	0.4	12.0	0.2
4	Pelalawan	12	66.7	1.0	41.7	0.5	41.7	0.8
5	Siak	14	100	2.5	92.9	1.9	57.1	0.9
6	Kampar	26	61.5	0.7	76.9	0.9	30.8	0.4
7	Rokan Hulu	19	47.4	0.5	68.4	0.7	36.8	0.4
8	Bengkalis	11	63.6	0.9	81.8	1.2	9.1	0.1
9	Rokan Hilir	15	53.3	0.7	26.7	0.3	6.7	0.1
10	Kepulauan Meranti	8	25.0	0.3	87.5	1.0	0.0	0
11	Kota Pekanbaru	19	100	1.3	100	1.2	10.5	0.1
12	Kota Dumai	9	100	1.4	100	2.1	55.6	0.7
Riau		195	65.6	0.9	68.2	0.9	22.6	0.3

Analisis keberadaan tenaga Sanitarian menunjukkan bahwa di Provinsi Riau hanya ada di 65,6 persen Puskesmas dengan jumlah rata-rata 0,9 Sanitarian per Puskesmas. Di Kabupaten Siak, Kota Dumai dan Pekanbaru sudah seluruh Puskesmasnya memiliki Sanitarian dengan rata-rata 2,5, 1,4 dan 1,3 Sanitarian per Puskesmas. Sementara Kabupaten Kepulauan Meranti hanya 25 persen dengan jumlah rata-rata 0,3 Sanitarian per Puskesmas,

di Kabupaten Rokan Hulu 47,4 persen dengan jumlah rata-rata 0,5 per Puskesmas, kemudian di Kabupaten Kuantan Singingi 47,6 persen dengan jumlah rata-rata 0,6 per Puskesmas.

Tenaga gizi di Provinsi Riau sebanyak 68,2 persen dengan jumlah rata-rata 0,9 per Puskesmas. Seluruh Puskesmas di Kota Dumai dan Kota Pekanbaru sudah memiliki Tenaga Gizi (100%), dengan jumlah rata-rata 2,1 dan 1,2 per Puskesmas. Sementara di Kabupaten Rokan Hilir hanya 26,7 persen Puskesmas yang memiliki Tenaga Gizi dengan rata-rata 0,3 per Puskesmas. Kabupaten Indragiri Hilir 36 persen dengan rata-rata 0,4 per Puskesmas dan di Kabupaten Pelalawan 41,7 persen dengan jumlah rata-rata 0,5 Tenaga Gizi per Puskesmas.

Tenaga Promkes termasuk tenaga di Puskesmas yang mempunyai peran penting untuk kontribusi pelayanan kesehatan masyarakat. Akan tetapi tenaga Promkes ini termasuk tenaga yang jumlahnya sedikit, di Provinsi Riau hanya 22,6 persen Puskesmas dengan jumlah rata-rata 0,3 Tenaga Promkes Per Puskesmas. Kabupaten Siak 57,1 persen Puskesmas nya memiliki Tenaga Promkes dengan jumlah rata-rata 0,9 Tenaga Promkes per Puskesmas, kemudian di Kota Dumai, Tenaga Promkes ada 55,9 persen Puskesmas dengan jumlah rata-rata 3,63 per Puskesmas, di Kabupaten Pelalawan 41,7 persen dengan jumlah rata-rata 0,8 per Puskesmas. Sementara di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak ada tenaga Promkes (0%), di Kabupaten Kuantan Singingi hanya 4,8 persen Puskesmas dengan jumlah rata-rata 0 Tenaga Promkes per Puskesmas kemudian di Kabupaten Rokan Hilir 4,8 persen Puskesmas dengan jumlah rata-rata 0,1 Tenaga Promkes per Puskesmas.

4.4. SARANA DAN PRASARANA

Pada tabel 4.4.1. dan 4.4.2. disajikan data tentang Sarana dan Prasarana Puskesmas yang meliputi Jenis dan Kondisi bangunan, listrik 24 jam, dan air bersih.

Tabel 4.4.1.
Persentase Puskesmas dengan menurut Jenis dan Kondisi Seluruh Bangunan
Puskesmas di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Keadaan Bangunan Baik/Rusak Ringan	Jenis Bangunan Permanen
1	Kuantan Singingi	21	85,7	95,2
2	Indragiri Hulu	16	75,0	81,3
3	Indragiri Hilir	25	28,0	28,0
4	Pelalawan	12	75,0	91,7
5	Siak	14	57,1	100
6	Kampar	26	96,2	100
7	Rokan Hulu	19	84,2	100
8	Bengkalis	11	81,8	100
9	Rokan Hilir	15	86,7	100
10	Kepulauan Meranti	8	100	100
11	Kota Pekanbaru	19	57,9	94,7
12	Kota Dumai	9	77,8	100
Riau		195	73,3	87,7

Persentase Puskesmas di Provinsi Riau yang memiliki kondisi bangunan dalam keadaan baik atau rusak ringan sebanyak 73,3 persen. Terbesar di Kabupaten Kepulauan Meranti (100%), seluruh Puskesmas di Kab. Kepulauan Meranti dalam keadaan baik atau rusak ringan, kemudian Kabupaten Kampar (96,2%) dan Rokan Hilir (86,7%). Sedangkan terendah di Kabupaten Indragiri Hilir (28,0%) kemudian Siak (57,1%) dan Kota Pekanbaru (57,9%).

Persentase Puskesmas yang memiliki jenis bangunan permanen di Provinsi Riau sudah 87,1 persen. Seluruh Puskesmas di 7 Kabupaten/Kota sudah memiliki bangunan permanen. Sementara di Kabupaten Indragiri Hilir hanya 28,0 persen, di Indragiri Hulu 81,3 persen, dan di Kabupaten Pelalawan 91,7 persen.

Tabel 4.4.2.

Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Listrik 24 Jam dan Air Bersih Puskesmas di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Puskesmas dengan Ketersediaan (%)	
			Listrik 24 Jam	Air Bersih*
1	Kuantan Singingi	21	66,7	52,4
2	Indragiri Hulu	16	68,8	37,5
3	Indragiri Hilir	25	52,0	64,0
4	Pelalawan	12	25,0	66,7
5	Siak	14	50,0	57,1
6	Kampar	26	92,3	69,2
7	Rokan Hulu	19	63,2	42,1
8	Bengkalis	11	72,7	63,6
9	Rokan Hilir	15	93,3	53,3
10	Kepulauan Meranti	8	25,0	12,5
11	Kota Pekanbaru	19	94,7	78,9
12	Kota Dumai	9	100	22,2
Riau		195	69,2	55,4

* komposit : tersedia sumber air, tersedia sepanjang tahun dan kualitas air baik

Persentase Puskesmas yang tersedia listrik 24 jam di Provinsi Riau 69,2 persen. Seluruh Puskesmas di Kota Dumai sudah mempunyai ketersediaan listrik 24 jam (100%). Ketersediaan listrik terendah di Kabupaten Kepulauan Meranti (25,0%), kemudian Kabupaten Pelalawan (25,0%) dan Kabupaten Indragiri Hilir (52,0%).

Untuk ketersediaan air bersih, di Provinsi Riau Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan air bersih sepanjang tahun hanya 55,4 persen. Kota Pekanbaru sudah 78,9 persen Puskesmas memiliki ketersediaan air bersih. Ketersediaan air bersih terendah di Kabupaten Kepulauan Meranti (12,5%) kemudian Kabupaten Indragiri Hulu (37,5%) dan Kabupaten Rokan Hulu (42,1%).

4.5. ALAT TRANSPORTASI

Untuk ketersediaan sarana transportasi, Dari 195 Puskesmas menunjukkan hanya 48,7 persen Puskesmas di Riau memiliki kendaraan bermotor roda dua. Seluruh Puskesmas di Kabupaten Siak sudah memiliki alat transportasi kendaraan roda dua (100%). Persentase kepemilikan kendaraan roda dua terendah ada di Kabupaten Indragiri Hilir (0%), Kabupaten Indragiri Hulu (25,0%), dan Kabupaten Rokan Hilir (26,7%).

Tabel 4.5.1.
Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Alat Transportasi Puskesmas
di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Ketersediaan Alat Transportasi Puskesmas (%)					
			Kendaraan Roda 2	Pusling	Perahu Bermotor	3 Roda 2 + 1 Pusling / Perahu Bermotor	Pusling / Ambulans	Pusling/ Ambulans/ Perahu Bermotor
1	Kuantan Singingi	21	81.0	28.6	0	23.8	85.7	85.7
2	Indragiri Hulu	16	25.0	43.8	0	18.8	62.5	62.5
3	Indragiri Hilir	25	0	0	0	0	12.0	12.0
4	Pelalawan	12	83.3	50.0	25.0	41.7	50.0	50.0
5	Siak	14	100	28.6	0	28.6	85.7	85.7
6	Kampar	26	26.9	50.0	3.8	19.2	69.2	69.2
7	Rokan Hulu	19	89.5	57.9	0	57.9	84.2	84.2
8	Bengkalis	11	27.3	18.2	0	9.1	45.5	45.5
9	Rokan Hilir	15	26.7	0	0	0	53.3	53.3
10	Kepulauan Meranti	8	50.0	0	0	0	12.5	12.5
11	Kota Pekanbaru	19	36.8	63.2	0	31.6	84.2	84.2
12	Kota Dumai	9	88.9	33.3	0	33.3	66.7	66.7
Riau		195	48.7	32.8	2.1	22.1	61.0	61.0

Di Provinsi Riau, 32,8 persen puskesmas sudah memiliki kendaraan Puskesmas Keliling (Pusling) roda 4. Tiga Kabupaten dengan persentase puskesmas yang memiliki kendaraan pusling roda 4 tertinggi adalah Kota Pekanbaru (63,2%), Kabupaten Rokan hulu (57,9%) dan Kabupaten Pelalawan serta Kampar (50%), Sementara 3 Kota terendah adalah Kabupaten Indragiri Hilir, Rokan Hilir, dan meranti (0%). Sedangkan yang memiliki perahu bermotor, ada sebanyak 2,1 persen, Kabupaten Pelalawan (25%) dan Kampar sebesar 3,8 persen.

Tabel 4.4.3 menunjukkan persentase puskesmas yang memiliki sarana transportasi tiga (3) kendaraan bermotor roda 2 (yang masing-masing diasumsikan digunakan oleh Sanitarian, Perawat dan Bidan untuk pelayanan luar gedung) dan pusling roda 4 atau perahu bermotor, secara nasional hanya 26,8 persen. Tabel 4.4.3 menunjukkan juga sarana transportasi berupa persentase Puskesmas yang memiliki ambulans atau pusling roda empat dan yang memiliki ambulans atau pusling roda empat atau perahu bermotor. Ambulans merupakan sarana transportasi pasien untuk kasus yang tidak bisa ditangani Puskesmas dan memerlukan rujukan ke sarana pelayanan yang lebih mampu seperti ke rumah sakit.

Puskesmas Keliling walaupun tidak didesain seperti ambulans, namun bila tidak ada ambulans digunakan juga sebagai kendaraan ambulans, yaitu membawa pasien yang memerlukan rujukan segera. Di Provinsi Riau persentase Puskesmas yang memiliki ambulans atau pusling roda empat secara nasional sebesar 22,1 persen. Sementara yang memiliki ambulans atau pusling roda empat atau perahu bermotor di Riausebanyak 61 persen.

4.6. MANAJEMEN PUSKESMAS

4.6.1. Perencanaan Tahunan dan Lokakarya Mini

Pada Rifaskes 2011 ditanyakan apakah Puskesmas mempunyai dokumen Rencana Kerja Tahunan tahun 2010, bila ada dilihat apakah dokumennya berupa Rencana Usulan Kegiatan (RUK) atau Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan dilihat juga apakah Penanggung Jawab Program terlibat dalam Menyusun Rencana Kerja Tahunan. Selain Rencana Kerja Tahunan, Rifaskes 2011 juga melihat dokumen Kegiatan Penggerakan Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan dan Lokakarya Mini Triwulanan.

Dari 195 Puskesmas yang dianalisis, persentase puskesmas yang mempunyai Rencana Kerja Tahunan di Provinsi Riau sebanyak 97,9% (189 Puskesmas). Ada 7 Kabupaten Kota yang seluruh puskesmasnya mempunyai Rencana Kerja Tahunan (100%) Sementara Persentase terendah ada di Kabupaten Pelalawan (91,7%), kemudian Kabupaten Indragiri Hulu (92,3%) dan Kabupaten Rokan Hilir (93,3%).

Tabel 4.6.1.1. juga menggambarkan persentase puskesmas menurut pelaksanaan lokakarya mini bulanan. Secara nasional ada 77,9 persen puskesmas yang melaksanakan lokakarya mini bulanan dan ada dokumennya. Seluruh Puskesmas di Kota Dumai di Provinsi Riau telah melaksanakan lokakarya mini bulanan dan ada dokumennya (100%). Sementara terendah ada di Kabupaten Kepulauan Meranti 37,5 persen, Kabupaten Bengkalis 45,5 Persen dan Kabupaten Rokan Hilir serta pelalawan masing-masing hanya 66,7 persen.

Sedangkan yang mengatakan melaksanakan lokakarya mini bulanan, tapi tidak dapat memperlihatkan dokumennya di Provinsi Riau hanya 15,4 persen.

Persentase puskesmas menurut Pelaksanaan Lokakarya Mini Triwulan dan ada dokumennya di Provinsi Riau hanya 52,8 persen Puskesmas. Terbesar di Kota Pekanbaru (94,7%), kemudian Kabupaten Rokan Hulu (78,9%) dan Indragiri Hilir (76,0%). Sementara seluruh Puskesmas di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Indragiri Hulu tidak melaksanakan lokakarya Mini Triwulanan (0 %) kemudian Kabupaten Rokan Hilir (33,3%). Persentase Puskesmas di Provinsi Riau yang menyatakan melaksanakan Lokakaryamini Triwulanan tapi tidak dapat menunjukkan dokumennya sebesar 7,7 persen.

Tabel 4.6.1.1.
Persentase Puskesmas Menurut Kegiatan Perencanaan dan Penggerakan Pelaksanaan
Puskesmas di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Kegiatan Penggerakan Pelaksanaan			
			Lokakarya Mini Bulanan		Lokakarya Mini Triwulan	
			% Ya, ada Dokumen	% Ya, Tidak ada Dokumen	% Ya, ada Dokumen	% Ya, Tidak ada Dokumen
1	Kuantan Singingi	21	66.7	33.3	19.0	14.3
2	Indragiri Hulu	16	81.3	6.3	0	6.3
3	Indragiri Hilir	25	68.0	8.0	76.0	8.0
4	Pelalawan	12	66.7	33.3	66.7	8.3
5	Siak	14	92.9	7.1	35.7	7.1
6	Kampar	26	96.2	0	57.7	11.5
7	Rokan Hulu	19	89.5	10.5	78.9	0
8	Bengkalis	11	45.5	45.5	72.7	18.2
9	Rokan Hilir	15	66.7	13.3	33.3	6.7
10	Kepulauan Meranti	8	37.5	62.5	0	12.5
11	Kota Pekanbaru	19	94.7	5.3	94.7	0
12	Kota Dumai	9	100	0	66.7	0
Riau		195	77.9	15.4	52.8	7.7

Tabel 4.6.1.2.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Dokumen dan Keterlibatan PJ Program dalam
menyusun RKT di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No.	Kabupaten/Kota	Jml Pusk dengan RKT	% Ketersediaan Dokumen		% Keterlibatan PJ Program dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT)
			Rencana Usulan Kegiatan (RUK)	Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)	
1	Kuantan Singingi	21	100	100	100
2	Indragiri Hulu	13	84,6	92,3	92,3
3	Indragiri Hilir	25	100	100	100
4	Pelalawan	12	100	100	91,7
5	Siak	13	100	92,3	100
6	Kampar	26	100	100	100
7	Rokan Hulu	19	89,5	89,5	100
8	Bengkalis	11	100	100	100
9	Rokan Hilir	15	100	93,3	93,3
10	Kepulauan Meranti	7	85,7	100	100
11	Kota Pekanbaru	18	100	100	94,4
12	Kota Dumai	9	100	100	100
Riau		189	97,4	97,4	97,9

Dari 189 puskesmas yang memiliki rencana kerja tahunan, Di Provinsi Riau terdapat 97,4 persen yang memiliki dokumen Rencana Usulan Kegiatan (RUK). Terbesar di Kabupaten Kuansing, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Bengkalis, Rokan Hilir, Kota Dumai dan kota Pekanbaru, seluruh Puskesmas di Kabupaten/Kota tersebut telah memiliki dokumen

Rencana Usulan Kegiatan (100 %). Sedangkan terendah ada di Indragiri hulu (84,6%), kemudian Kabupaten Kepulauan Meranti (85,7%) dan kabupaten Rokan Hulu (89,5%).

Bila dilihat dari keberadaan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK), dari 189 puskesmas yang memiliki rencana kerja tahunan, di Provinsi Riau terdapat 97,4 persen Puskesmas yang memiliki dokumen RPK. Seluruh Puskesmas di 7 Kabupaten/kota telah memiliki dokumen RPK. Sementara terendah ada di Kabupaten Rokan Hulu (89,5%), kemudian Kabupaten Indragiri Hulu dan Siak (92,3%) serta Kabupaten Rokan Hilir (93,3%).

Dari 189 puskesmas yang memiliki rencana kerja tahunan, di Provinsi Riau terdapat 97,9% yang mengikutsertakan penanggung jawab program dalam penyusunan rencana kerja tahunan. Seluruh Puskesmas di 8 Kabupaten/kota telah mengikutsertakan penanggung jawab program dalam penyusunan rencana kerja tahunan. Sedangkan terendah ada di Kabupaten Pelalawan (91,7%), kemudian Indragiri Hulu (92,3%) dan Rokan Hilir (93,3%).

4.6.2. Sistem Informasi Puskesmas

Tabel 4.6.2.1. menunjukkan Sistem Informasi yang dimiliki Puskesmas, diantaranya mengenai penggunaan sistem komputerisasi di Puskesmas, yaitu computer antar ruang terhubung satu sama lain dengan jaringan tertentu (LAN/Local Area Network) dan Penggunaan Sistem Pengkodean Penyakit dalam pencatatan pelaporan dengan ICD X di Puskesmas.

Penggunaan system komputerisasi di Puskesmas yang terhubung satu sama lain dengan jaringan tertentu (LAN/Local Area Network) di Provinsi Riau hanya 1,5 persen. Persentase tertinggi di Kabupaten Pelalawan (8,3%), Kota Pekanbaru (5,3%) dan Kabupaten Kampar (3,8%), sementara di 9 kabupaten/kota belum ada puskesmas yang memiliki system komputerisasi dengan jaringan antar ruangan (0%). Sedangkan untuk penggunaan komputer tanpa jaringan antar ruang Provinsi Riau hanya 40,5 persen puskesmas. Persentase yang terendah di Kabupaten Indragiri Hulu puskesmasnya belum memiliki fasilitas komputer (6,3%), kemudian Kota Pekanbaru (10,5%) dan Kabupaten Siak (28,6%). Sementara penggunaan komputer tanpa jaringan antar ruangan yang tertinggi di Kota Dumai (77,8%), Kabupaten Rokan hulu (60,3%) dan Kabupaten Kuantan Sengingi (61,9%).

Puskesmas yang telah menggunakan system pengkodean penyakit dalam pencatatan pelaporan dengan ICD X di Provinsi Riau hanya 62,6 persen. Persentase tertinggi di Kabupaten Siak (92,9%), Kota Dumai (88,9%) dan Kabupaten Rokan Hilir (80,0%). Sementara yang terendah di Kabupaten Indragiri Hulu (31,3%), kemudian Kota Pekanbaru (47,4%) dan Kabupaten Indragiri hilir (48,0%).

Tabel 4.6.2.1.
Persentase Puskesmas Menurut Sistem Informasi Puskesmas
di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No.	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	% Penggunaan sistem komputer untuk pelayanan dalam gedung		% Penggunaan International code disease (ICD) X di Puskesmas
			Ya, ada jaringan antar ruangan	Ya, menggunakan komputer tapi tidak ada jaringan antar ruang	
1	Kuantan Singingi	21	0	61.9	47.6
2	Indragiri Hulu	16	0	6.3	31.3
3	Indragiri Hilir	25	0	40.0	48.0
4	Pelalawan	12	8.3	33.3	75.0
5	Siak	14	0	28.6	92.9
6	Kampar	26	3.8	38.5	69.2
7	Rokan Hulu	19	0	63.2	68.4
8	Bengkalis	11	0	54.5	63.6
9	Rokan Hilir	15	0	53.3	80.0
10	Kepulauan Meranti	8	0	25.0	75.0
11	Kota Pekanbaru	19	5.3	10.5	47.4
12	Kota Dumai	9	0	77.8	88.9
Riau		195	1.5	40.5	62.6

4.7. PENANGGUNG JAWAB PROGRAM

Di dalam melaksanakan fungsi Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama, sesuai Kepmenkes No. 128/2004, seluruh Puskesmas di Indonesia diharapkan melaksanakan program Upaya Kesehatan Wajib. Sedangkan Upaya Kesehatan Pengembangan di setiap Puskesmas disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana masing-masing Puskesmas, juga dukungan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Untuk kelancaran pelaksanaan setiap upaya atau program kegiatan ditentukan siapa penanggung jawabnya dan dibuatkan Surat Keputusannya oleh pejabat yang berwenang menetapkan. Pada tabel 4.7.1.a. dan 4.7.1.b. dapat kita lihat tentang kesesuaian latar belakang pendidikan penanggung jawab program Upaya Kesehatan Wajib.

Latar belakang pendidikan yang sesuai untuk Penanggungjawab Program Promosi Kesehatan adalah dari DIII Promosi Kesehatan atau S1 Kesehatan Masyarakat. Pada Tabel 4.7.1.a. dapat dilihat bahwa persentase Puskesmas yang mempunyai penanggung jawab Program Promosi Kesehatan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai di Provinsi Riau adalah sebesar 21,5 persen. Persentase tertinggi yang mempunyai penanggung jawab Program Promosi Kesehatan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah Kota Dumai (55,6%), Kabupaten Pelalawan (41,7%), dan Kabupaten Indragiri Hulu (37,5%). Persentase Puskesmas terendah mempunyai penanggung jawab Program Promosi Kesehatan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah Kabupaten Kepulauan Meranti (0%), berikutnya adalah Kabupaten Indragiri Hilir (4,0%) dan Kabupaten Kuantan Singingi (4,8%).

Latar belakang pendidikan yang sesuai untuk Penanggungjawab Program Kesehatan Lingkungan adalah DIII Kesehatan Lingkungan atau Sanitarian atau S1 Kesehatan Masyarakat. Persentase Puskesmas yang mempunyai penanggung jawab Program Kesehatan Lingkungan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai di Provinsi Riau adalah sebesar 63,1 persen. Persentase tertinggi yang mempunyai penanggung jawab Program Kesehatan Lingkungan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah Kota Dumai dan Kabupaten Siak (100%), Kota Pekanbaru (94,7%), dan Kabupaten Indragiri Hilir (68,0%). Persentase terendah mempunyai penanggung jawab Program Kesehatan Lingkungan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah Kabupaten Kepulauan Meranti (25,0%), berikutnya adalah Kabupaten Kuantan Singingi (38,1%) dan Kabupaten Rokan Hulu (42,1%).

Latar belakang pendidikan yang sesuai untuk Penanggungjawab Program KIA/KB adalah DIII Kebidanan, DIII Keperawatan, atau Dokter. Persentase Puskesmas yang mempunyai penanggung jawab Program KIA/KB dengan latar belakang pendidikan yang sesuai di Riau adalah sebesar 97,9 persen. Terdapat 8 Kabupaten/Kota dengan persentase 100,0 persen dalam hal penanggung jawab Program KIA/KB dengan latar belakang pendidikan yang sesuai. Persentase terendah yang mempunyai penanggung jawab Program KIA/KB dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah Kabupaten Siak (92,9%), berikutnya adalah Kabupaten Rokan hilir (93,3%) dan Kabupaten Rokan Hulu (94,7%).

Latar belakang pendidikan yang sesuai untuk Penanggungjawab Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah DIII Gizi, S1 Kesehatan Masyarakat, atau S1 Gizi. Kesesuaian latar belakang pendidikan penanggung jawab Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Riau sebesar 62,1 persen. Seluruh Puskesmas di Kota Dumai dan Kabupaten Siak mempunyai penanggung jawab Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang sesuai (100%), berikutnya adalah Kota Pekanbaru (89,5%) dan Kabupaten Kep. Meranti (87,5%). Sementara Persentase terendah adalah Kabupaten Rokan Hilir (20,0%), kemudian diikuti oleh Kabupaten Indragiri Hilir (28,0%) dan Kabupaten Pelalawan (41,7%).

Latar belakang pendidikan yang sesuai untuk Penanggungjawab Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular adalah DIII Kebidanan, DIII Keperawatan, S1 Kesehatan Masyarakat, atau Dokter. Persentase Puskesmas di Provinsi Riau yang mempunyai penanggungjawab Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah sebesar 79,5 persen. Persentase tertinggi yaitu Kabupaten Pelalawan sudah mempunyai penanggung jawab Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dengan latar *belakang* pendidikan yang sesuai (100%) kemudian Kabupaten Kuantan Singingi (95,2%) dan Kabupaten Rokan Hulu (89,5%). Persentase terendah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti (50,0%), berikutnya adalah Kota Dumai (66,7%) dan Kota Pekanbaru (68,4%).

Latar belakang pendidikan yang sesuai untuk Penanggungjawab Program Pengobatan adalah DIII Kebidanan, DIII Keperawatan, atau Dokter. Di Provinsi Riau, Puskesmas yang mempunyai penanggung jawab Program Pengobatan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah sebesar 78,5 persen. Persentase tertinggi yang mempunyai penanggung jawab Program Pengobatan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah Kabupaten Siak (92,9%), Bengkalis (90,9%), dan Kabupaten Kuantan Singingi (90,5%). Sementara, persentase terendah adalah Kabupaten Rokan hulu (63,2%), Kota Dumai (66,7%), dan Kabupaten Kampar (69,2%).

Tabel 4.7.1.a.
 Persentase Puskesmas Menurut Kesesuaian PJ Program Puskesmas
 di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No.	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	% Kesesuaian PJ Program		
			Promosi Kesehatan	Kesehatan Lingkungan	KIA/KB
1	Kuantan Singingi	21	4.8	38.1	95.2
2	Indragiri Hulu	16	37.5	56.3	100
3	Indragiri Hilir	25	4.0	68.0	100
4	Pelalawan	12	41.7	58.3	100
5	Siak	14	28.6	100	92.9
6	Kampar	26	23.1	61.5	100
7	Rokan Hulu	19	15.8	42.1	94.7
8	Bengkalis	11	18.2	63.6	100
9	Rokan Hilir	15	26.7	53.3	93.3
10	Kepulauan Meranti	8	0	25.0	100
11	Kota Pekanbaru	19	26.3	94.7	100
12	Kota Dumai	9	55.6	100	100
Riau		195	21.5	63.1	97.9

Tabel 4.7.1.b.
 Persentase Puskesmas Menurut Kesesuaian PJ Program Puskesmas
 di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No.	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	% Kesesuaian PJ Program		
			Perbaikan Gizi Masyarakat	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Pengobatan
1	Kuantan Singingi	21	61.9	95.2	90.5
2	Indragiri Hulu	16	62.5	68.8	81.3
3	Indragiri Hilir	25	28.0	84.0	80.0
4	Pelalawan	12	41.7	100	83.3
5	Siak	14	100	78.6	92.9
6	Kampar	26	69.2	80.8	69.2
7	Rokan Hulu	19	52.6	89.5	63.2
8	Bengkalis	11	72.7	72.7	90.9
9	Rokan Hilir	15	20.0	73.3	73.3
10	Kepulauan Meranti	8	87.5	50.0	75.0
11	Kota Pekanbaru	19	89.5	68.4	78.9
12	Kota Dumai	9	100	66.7	66.7
Riau		195	62.1	79.5	78.5

4.8. PELAYANAN KESEHATAN

4.8.1. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN

4.8.1.1. Kegiatan Program Promosi Kesehatan

Kegiatan dalam pelaksanaan Program Promosi Kesehatan yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 meliputi, Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pembinaan di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pembinaan Forum Desa Siaga, dan Pembinaan Program Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Angka di Provinsi Riau, dari keempat jenis kegiatan Program Promosi Kesehatan, kegiatan Penyuluhan PHBS merupakan presentase tertinggi yang dilakukan oleh Puskesmas (96,9%) dan disusul oleh kegiatan Pembinaan di Poskesdes (84,1%), Pembinaan Forum Desa Siaga (79,0%), dan Pembinaan Program Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) (83,1%), dan untuk Provinsi Riau sebesar 68,2 persen Puskesmas melakukan keempat jenis kegiatan dalam Program Promosi Kesehatan secara lengkap (Tabel 4.8.1.1.1).

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan Penyuluhan PHBS dalam lingkup provinsi adalah sebesar 96,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan penyuluhan PHBS terdapat di 10 Kabupaten/Kota sebanyak (100,0%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan penyuluhan PHBS ditemukan di 2 Kabupaten Kuantan Sengingi (76,2%), berikutnya adalah Kabupaten Indragiri hulu (93,8%).

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan pembinaan di Poskesdes dalam lingkup provinsi adalah sebesar 84,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pembinaan di Poskesdes terdapat di 3 Kabupaten/Kota yakni, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan hulu, Kota Dumai (100,0%). Sedangkan persentase Puskesmas terendah ditemukan di Kabupaten Kuantan Sengingi (52,4%), berikutnya adalah Kabupaten Indragiri Hulu (62,5%) dan Kabupaten Siak (78,6%).

Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Pembinaan Forum Desa Siaga dalam lingkup provinsi adalah sebesar 79,0 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pembinaan Forum Desa Siaga terdapat di 2 Kabupaten/Kota yakni, kota Dumai, Kota Pekanbaru (100,0%). Sementara persentase Puskesmas terendah ditemukan pada Kabupaten Kuantan Sengingi (38,1%), berikutnya adalah Kabupaten Indragiri HULU (43,8%) dan Kabupaten Bengkalis (72,7%).

Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dalam lingkup provinsi adalah sebesar 83,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pembinaan UKBM terdapat di 3 Kabupaten/Kota Siak, Pekanbaru dan Dumai (100%). Sedangkan persentase Puskesmas terendah ditemukan pada Kabupaten Bengkalis (45,5%), kemudian Kabupaten Rokan Hilir (66,7%) dan Kabupaten Kuantan Sengingi (71,4%).

Tabel 4.8.1.1.1.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Kegiatan Program Promosi Kesehatan di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Juml Pusk	PHBS	Pembinaan Poskesdes	Pembinaan Forum Desa Siaga	UKBM	Kegiatan Lengkap Promosi Kesehatan
1	Kuantan Singingi	21	76.2	52.4	38.1	71.4	33.3
2	Indragiri Hulu	16	93.8	62.5	43.8	68.8	43.8
3	Indragiri Hilir	25	100	80.0	80.0	84.0	64.0
4	Pelalawan	12	100	91.7	83.3	75.0	58.3
5	Siak	14	100	78.6	85.7	100	71.4
6	Kampar	26	100	100	88.5	96.2	88.5
7	Rokan Hulu	19	100	100	94.7	94.7	94.7
8	Bengkalis	11	100	81.8	72.7	45.5	45.5
9	Rokan Hilir	15	100	86.7	86.7	66.7	53.3
10	Kepulauan Meranti	8	100	87.5	87.5	75.0	62.5
11	Kota Pekanbaru	19	100	94.7	100	100	94.7
12	Kota Dumai	9	100	100	100	100	100
Riau		195	96.9	84.1	79.0	83.1	68.2

Persentase Puskesmas yang melakukan secara lengkap keempat jenis kegiatan dalam Program Promosi Kesehatan dalam lingkup provinsi adalah sebesar 68,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan secara lengkap dalam Program Promosi Kesehatan terdapat di Kota Dumai (100%), kemudian Kabupaten Rokan Hulu (94,7%), dan Kota Pekanbaru (94,7%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan lengkap dalam Program Promosi Kesehatan ditemukan pada Kabupaten Kuantan Singingi (33,3%), berikutnya adalah Kabupaten Indragiri Hulu (43,8%) dan Kabupaten Bengkalis (45,5%).

4.8.1.2. Pelatihan Program Promosi Kesehatan

Pelatihan petugas Puskesmas dalam pelaksanaan Program Promosi Kesehatan yang dikumpulkan pada Rifaskes ini meliputi pelatihan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pelatihan Desa Siaga dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2009 dan 2010. Di Provinsi Riau, dari ketiga jenis pelatihan Program Promosi Kesehatan, Pelatihan Desa Siaga merupakan persentase tertinggi yang diikuti oleh petugas Puskesmas (65,6%) dan berikutnya adalah Pelatihan PHBS (59,5%), dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat (28,2%). Di provinsi Riau, sebesar 26,7 persen Puskesmas yang petugasnya mengikuti secara lengkap keempat pelatihan dalam Program Promosi Kesehatan (Tabel 4.8.1.2.1).

Persentase petugas Puskesmas yang mengikuti Pelatihan PHBS dalam lingkup provinsi adalah sebesar 59,5 persen. Persentase puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti Pelatihan PHBS terdapat di Kabupaten Siak (100%), kemudian Kabupaten Kampar (88,5%), dan kabupaten Rokan hilir (80,0%). Persentase puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti Pelatihan PHBS ditemukan pada Kabupaten Kuantan Singingi (23,8%), kemudian Kota Dumai (33,3%) dan Kabupaten Bengkalis (36,4%).

Tabel 4.8.1.2.1
 Persentase Puskesmas menurut Pelatihan Program Promosi Kesehatan
 pada Tahun 2009 dan 2010 di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pelatihan PHBS	Pelatihan Desa Siaga	Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Lengkap Promosi Kesehatan
1	Kuantan Singingi	21	23.8	19.0	4.8	4.8
2	Indragiri Hulu	16	50.0	25.0	12.5	12.5
3	Indragiri Hilir	25	60.0	64.0	32.0	28.0
4	Pelalawan	12	50.0	75.0	8.3	8.3
5	Siak	14	100	100.0	35.7	35.7
6	Kampar	26	88.5	84.6	57.7	53.8
7	Rokan Hulu	19	52.6	68.4	36.8	31.6
8	Bengkalis	11	36.4	45.5	9.1	9.1
9	Rokan Hilir	15	80.0	86.7	40.0	40.0
10	Kepulauan Meranti	8	50.0	75.0	12.5	12.5
11	Kota Pekanbaru	19	63.2	94.7	36.8	36.8
12	Kota Dumai	9	33.3	44.4	11.1	11.1
Riau		195	59.5	65.6	28.2	26.7

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Desa Siaga dalam lingkup provinsi adalah sebesar 65,6 persen. Persentase puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti Pelatihan Desa Siaga terdapat di Kabupaten Siak (100%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti Pelatihan Desa Siaga ditemukan di Kabupaten Indragiri Hulu (25,0%), kemudian Kota Dumai (44,4%) dan Bengkalis (45,5%).

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dalam lingkup provinsi adalah sebesar 28,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat terdapat di Kabupaten Kampar (57,7%), kemudian Kabuapten Rokan Hilir (40,0%), dan Kabupaten Rokan hulu dan Kota Pekanbaru (36,8%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dapat ditemukan di Kabupaten Kuantan seningi (4,8%), Kabupaten Pelalawan (8,3%) dan Kabupaten Bengkalis (9,1%).

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan lengkap ketiga jenis pelatihan Program Promosi Kesehatan dalam lingkup provinsi adalah sebesar 26,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti secara lengkap ketiga jenis pelatihan dalam Program Promosi Kesehatan adalah di Kabupaten Kampar (53,8%), kemudian Roka Hllir (40,0%), Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Pekanbaru (36,8%). Persentase Puskesmas terendah mengikuti pelatihan secara lengkap dalam Program Promosi Kesehatan ada di Kabupaten Kuantan Seningi (4,8%), Kabupaten Pelalawan (8,3%) dan Kabupaten Bengkalis (9,1%).

4.8.1.3. Pedoman Program Promosi Kesehatan

Pedoman Program Promosi Kesehatan diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Dalam Program Promosi Kesehatan, buku pedoman yang dikumpulkan pada Rifaskes ini meliputi Juknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Poskesdes, Pedoman

Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga, Juknis Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Siaga. Pada Provinsi Riau pedoman Program Promosi Kesehatan terbanyak dimiliki oleh puskesmas adalah Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga (63,6%) kemudian berturut turut Juknis Poskesdes (50,8%) dan Juknis Penggerakan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Siaga (51,3%). Di Provinsi Riau persentase Puskesmas memiliki ketiga jenis pedoman seperti yang disebutkan di atas adalah sebesar 42,6 persen (Tabel 4.8.1.3.1).

Tabel 4.8.1.3.1.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Pedoman Program Promosi Kesehatan di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Juml Pusk	Juknis Poskesdes	Pengembangan Desa Siaga	Juknis Penggerakan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Siaga	Pedoman Lengkap Promosi Kesehatan
1	Kuantan Singingi	21	23.8	47.6	42.9	23.8
2	Indragiri Hulu	16	50.0	43.8	43.8	43.8
3	Indragiri Hilir	25	28.0	36.0	32.0	20.0
4	Pelalawan	12	50.0	66.7	66.7	50.0
5	Siak	14	71.4	92.9	85.7	64.3
6	Kampar	26	61.5	73.1	57.7	53.8
7	Rokan Hulu	19	68.4	73.7	63.2	57.9
8	Bengkalis	11	72.7	90.9	54.5	45.5
9	Rokan Hilir	15	33.3	40.0	26.7	26.7
10	Kepulauan Meranti	8	62.5	87.5	50.0	50.0
11	Kota Pekanbaru	19	57.9	68.4	52.6	42.1
12	Kota Dumai	9	55.6	88.9	55.6	55.6
Riau		195	50.8	63.6	51.3	42.6

Persentase Puskesmas yang memiliki petunjuk teknis pengembangan dan penyelenggaraan Poskesdes dalam lingkup provinsi adalah sebesar 50,8 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Juknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Poskesdes ditemukan di Kabupaten Bengkalis (72,7%) kemudian Siak (71,4%) dan Kabupaten Rokan hulu (68,4%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Juknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Poskesdes ditemukan pada Kabupaten Kuantan Sengingi (23,8%) dan berikutnya adalah Kabupaten Indragiri hilir (28,0%) dan Kabupaten Rokan hilir (33,3%).

Persentase Puskesmas yang memiliki Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga dalam lingkup provinsi adalah sebesar 63,6 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga dapat ditemukan di Kabupaten Siak (92,9%) dan berikutnya Kabupaten Bengkalis (90,9%) dan Kota Dumai (88,9%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga ditemukan pada Kabupaten Rokan hilir (40,0%) dan berikutnya adalah Kabupaten Indragiri hulu (43,8%) dan Kabupaten Kuantan Sengingi (47,6%).

Persentase Puskesmas yang memiliki Petunjuk Teknis Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Siaga dalam lingkup provinsi adalah sebesar 51,3 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Juknis Penggerakan dan

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Siaga ditemukan di Kabupaten Siak (85,7%) dan berikutnya adalah Kabupaten Pelalawan (66,7%) dan Kabupaten Kampar (63,2%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Juknis Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Siaga ditemukan di Kabupaten Rokan Hilir (26,7%) dan berikutnya adalah Kabupaten Indragiri Hilir (32,0%) dan Kabupaten Kuantan Singingi (42,9%).

Persentase Puskesmas yang memiliki pedoman Program Promosi Kesehatan secara lengkap (yaitu memiliki ketiga jenis pedoman dan juknis yang disebutkan di atas) dalam lingkup provinsi adalah sebesar 42,6 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki pedoman Program Promosi Kesehatan secara lengkap ditemukan di Kabupaten Siak (64,3%) dan kemudian Kabupaten Rokan Hulu (57,9%) dan Kota Dumai (55,6%). Persentase terendah Puskesmas memiliki pedoman Program Promosi Kesehatan secara lengkap (yaitu memiliki ketiga jenis pedoman dan juknis yang disebutkan di atas) ditemukan di Kabupaten Indragiri Hilir (20,0%) dan berikutnya adalah Kabupaten Kuantan Singingi (23,8%) dan Kabupaten Rokan Hilir (26,7%).

4.8.1.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Promosi Kesehatan

Pengawasan, evaluasi dan bimbingan teknis diperlukan dalam Program Promosi Kesehatan untuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan Program Promosi Kesehatan. Pengawasan, evaluasi dan bimbingan teknis dapat berupa kunjungan supervise atau bimbingan teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, umpan balik dalam bentuk tertulis, dan pertemuan monitoring dan evaluasi (monev) yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. Pada Provinsi Riau bentuk pengawasan, evaluasi dan bimbingan teknis dalam Program Promosi Kesehatan yang paling banyak diterima Puskesmas adalah supervisi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota ke Puskesmas (68,2%) dan pertemuan monev yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota (64,1%) dan kemudian umpan balik (57,9%). Di provinsi Riau persentase Puskesmas menerima lengkap ketiga bentuk evaluasi dan bimbingan (kunjungan supervisi, umpan balik tertulis dan pertemuan monev) adalah sebesar 42,6 persen. (Tabel 4.8.1.4.1.).

Di Provinsi Riau, dari 195 Puskesmas sebesar 68,2 persen Puskesmas menerima kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Program Promosi Kesehatan. Persentase Puskesmas tertinggi menerima kunjungan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Program Promosi Kesehatan ditemukan di Kota Pekanbaru (94,7%) kemudian Kabupaten Kampar (92,3%) dan Kota Dumai (88,9%). Sedangkan persentase Puskesmas terendah ditemukan di Kabupaten Kuantan Singingi (9,5%) kemudian Kabupaten Indragiri Hilir (18,8%) dan Kabupaten Bengkalis (54,5%).

Di Provinsi Riau, dari 195 Puskesmas sebesar 57,9 persen Puskesmas menerima umpan balik dari Dinas Kesehatan untuk Program Promosi Kesehatan. Persentase Puskesmas tertinggi menerima umpan balik Dinas Kesehatan untuk Program Promosi Kesehatan ditemukan di Kabupaten Rokan Hilir (100%), Kabupaten Rokan Hulu (94,7%) kemudian Kota Pekanbaru (89,5%) dan Kota Dumai (88,9%). Sedangkan persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi (9,5%) kemudian Kabupaten Indragiri Hilir (18,8%) dan Kabupaten Kepulauan Meranti (25,0%).

Laporan Provinsi Riau Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Di Provinsi Riau, dari 195 Puskesmas sebesar 64,1 persen Puskesmas mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi Program Promosi Kesehatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. Persentase Puskesmas tertinggi mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Program Promosi Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota ditemukan di Kabupaten Siak dan Kampar (100%) kemudian Kota Pekanbaru (94,7%) dan Kota Dumai (88,9%). Sedangkan persentase Puskesmas terendah mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Program Promosi Kesehatan ditemukan di Kabupaten Indragiri hilir (16,7%), Kabupaten kepulauan meranti (25%) kemudian kabupaten Bengkalis (27,3%).

Di Provinsi Riau, dari 195 Puskesmas, sebesar 42,6 persen Puskesmas menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap (ketiga jenis) dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Program Promosi Kesehatan. Persentase Puskesmas tertinggi menerima Pengawasan, Evaluasi, dan Bimbingan secara lengkap untuk Program Promosi Kesehatan ditemukan di kota Dumai (88,9%) kemudian Kota Pekanbaru (78,9%) dan Kabupaten Roak hilir (66,7%). Sedangkan persentase Puskesmas terendah menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap ditemukan di Kabupaten Kuantan Singingi (4,8%) kemudian Kabupaten Indragiri hulu (6,3%) dan Kabupaten kepulauan Meranti (12,5%).

Tabel 4.8.1.4.1.

Persentase Puskesmas menurut Penerimaan Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Promosi Kesehatan di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Supervisi Dinkes	Umpan Balik	Pertemuan Monev	Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Lengkap
1	Kuantan Singingi	21	9.5	9.5	38.1	4.8
2	Indragiri Hulu	16	18.8	18.8	62.5	6.3
3	Indragiri Hilir	25	72.0	48.0	44.0	36.0
4	Pelalawan	12	58.3	58.3	16.7	16.7
5	Siak	14	85.7	50.0	50.0	21.4
6	Kampar	26	92.3	65.4	100	61.5
7	Rokan Hulu	19	78.9	94.7	100	73.7
8	Bengkalis	11	54.5	45.5	27.3	27.3
9	Rokan Hilir	15	86.7	100	73.3	66.7
10	Kepulauan Meranti	8	87.5	25.0	25.0	12.5
11	Kota Pekan Baru	19	94.7	89.5	94.7	78.9
12	Kota Dumai	9	88.9	88.9	88.9	88.9
	Riau	195	68.2	57.9	64.1	42.6

4.8.2. PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN

4.8.2.1. Kegiatan Program Kesehatan Lingkungan

Kegiatan Program Kesehatan Lingkungan yang dikumpulkan dalam Rifaskes ini meliputi Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Sekolah, Pemeriksaan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU), Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pengelola Makanan/Minuman (TPM), Pemeriksaan Sanitasi Rumah Tangga, Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah dan Pemberantasan Sarang Nyamuk atau Pemeriksaan Jentik Nyamuk. Di Provinsi Riau, dari keenam jenis kegiatan Program Kesehatan Lingkungan, kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) merupakan persentase tertinggi yang dilakukan oleh puskesmas (93,3%) dan disusul oleh kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Tempat Makanan dan minuman (91,8%), Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Sekolah (87,7%), Pemeriksaan Sanitasi Rumah Tangga (85,6%), Pemberantasan Sarang Nyamuk/ Pemeriksaan Jentik Nyamuk (82,1%) dan Kunjungan/Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah (38,5%). Di Provinsi Riau sebesar 23,6 persen Puskesmas melakukan lengkap keenam kegiatan dalam Program Kesehatan Lingkungan (Tabel 4.8.2.1.1.a dan 4.8.2.1.1.b).

Di Provinsi Riau persentase Puskesmas melakukan kegiatan Kunjungan/Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Sekolah adalah sebesar 87,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Sekolah terdapat di 3 Kabupaten/Kota yakni, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Dumai (100,0%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Sekolah ditemukan di Kabupaten Indragiri Hulu (68,8%), berikutnya adalah Kabupaten Kepulauan Meranti (75,0%) dan Kabupaten Kuantan Singingi (76,2%).

Di Provinsi Riau persentase Puskesmas melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) adalah sebesar 93,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi TTU ditemukan di 7 Kabupaten/Kota yakni, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rohul, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai (100,0%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan pemeriksaan sanitasi TTU ditemukan di Kabupaten Indragiri Hulu (68,8%), berikutnya adalah Kabupaten Rokan Hilir (80,0%) dan Kabupaten Kuantan Singingi (85,7%).

Di Provinsi Riau persentase Puskesmas melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan/ Minuman (TPM) adalah sebesar 91,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pemeriksaan TPM ditemukan di 7 Kabupaten/Kota yakni, Kabupaten Kuantan Singingi, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai (100,0%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi TPM ditemukan di Kabupaten Indragiri Hulu (53,6%), berikutnya adalah Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Rokan Hilir (80,0%).

Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Rumah Tangga dalam lingkup provinsi adalah sebesar 85,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Rumah Tangga ditemukan di 4 Kabupaten/Kota yakni, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai (masing-masing 100,0%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Pemeriksaan

Sanitasi Rumah Tangga ditemukan di Kabupaten Kuantan Singingi (57,1%) kemudian Kabupaten Indragiri Hulu (62,5%) dan Indragiri Hilir (66,7%).

Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah dalam lingkup provinsi adalah sebesar 38,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi TPA Sampah ditemukan di Kabupaten Bengkalis (63,6%) kemudian Kota Palembang (63,2%) dan Kabupaten Kampar (61,5%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi TPA Sampah ditemukan di Kota Dumai (11,1%) kemudian Kabupaten Indragiri Hilir (12,0%) dan Kabupaten Pelalawan (16,7%).

Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk/ Pemeriksaan Jenis Nyamuk dalam lingkup provinsi adalah sebesar 82,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk/ Pemeriksaan Jentik Nyamuk ditemukan di 3 Kabupaten/Kota yakni, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Bengkalis (masing-masing 100,0%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk/ Pemeriksaan Jentik Nyamuk ditemukan di Kabupaten Pelalawan (41,7%) kemudian Kabupaten Kuantan Singingi (52,4%) dan Indragiri Hilir (56,3%).

Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Pelayanan Klinik Sanitasi dalam lingkup provinsi adalah sebesar 65,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pelayanan Klinik Sanitasi ditemukan di Kota Dumai (100,0%) kemudian Kota Pekanbaru (94,9%), Kabupaten Kampar (92,3%) dan Kabupaten Pelalawan (91,7%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Pelayanan Klinik Sanitasi ditemukan di Kabupaten Kepulauan Mentawai (25,0%) kemudian Kabupaten Indragiri Hulu (31,3%) dan Kabupaten Rokan Hilir (33,3%).

Tabel 4.8.2.1.1.a.

Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Program Kesehatan Lingkungan di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Juml Pusk	Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Sekolah	Pemeriksaan Sanitasi TTU	Pemeriksaan Sanitasi Tempat Makan Minuman	Pemeriksaan Sanitasi Rumah Tangga
1	Kuantan Singingi	21	76.2	85.7	100	57.1
2	Indragiri Hulu	16	68.8	68.8	62.5	62.5
3	Indragiri Hilir	25	84.0	100	80.0	96.0
4	Pelalawan	12	83.3	91.7	91.7	83.3
5	Siak	14	92.9	100	100	78.6
6	Kampar	26	100	100	100	100
7	Rokan Hulu	19	100	100	100	100
8	Bengkalis	11	90.9	100	100	90.9
9	Rokan Hilir	15	80.0	80.0	80.0	66.7
10	Kepulauan Meranti	8	75.0	87.5	87.5	87.5
11	Kota Pekanbaru	19	94.7	100	100	100
12	Kota Dumai	9	100	100	100	100
Riau		195	87.7	93.3	91.8	85.6

Tabel 4.8.2.1.1.b.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Kegiatan Program Kesehatan Lingkungan di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Juml Pusk	Pemeriksaan Sanitasi TPA Sampah	Pemberantasan Sarang Nyamuk/Pemeriksaan Jentik	Pelayanan Klinik Sanitasi	Kegiatan Lengkap Program Kesling
1	Kuantan Singingi	21	33.3	52.4	52.4	9.5
2	Indragiri Hulu	16	25.0	56.3	31.3	6.3
3	Indragiri Hilir	25	12.0	84.0	48.0	4.0
4	Pelalawan	12	16.7	41.7	91.7	8.3
5	Siak	14	28.6	92.9	71.4	7.1
6	Kampar	26	61.5	100	92.3	53.8
7	Rokan Hulu	19	52.6	89.5	73.7	36.8
8	Bengkalis	11	63.6	100	63.6	36.4
9	Rokan Hilir	15	40.0	93.3	33.3	6.7
10	Kepulauan Meranti	8	37.5	75.0	25.0	25.0
11	Kota Pekanbaru	19	63.2	100	94.7	57.9
12	Kota Dumai	9	11.1	88.9	100.0	11.1
Riau		195	38.5	82.1	65.6	23.6

Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan lengkap (melaksanakan keenam kegiatan tersebut di atas) dalam Program Kesehatan Lingkungan dalam lingkup provinsi adalah sebesar 23,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan lengkap dalam Program Kesehatan Lingkungan terdapat di Kota Pekanbaru (57,9%) dan Kabupaten Kampar (53,8%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan lengkap dalam Program Kesehatan Lingkungan ditemukan di Kabupaten Indragiri Hilir (4,0%) kemudian Kabupaten Indragiri Hulu (6,3%) dan Kabupaten Rokan Hilir (6,7%).

4.8.2.2. Pelatihan Program Kesehatan Lingkungan

Pelatihan dalam pelaksanaan Program Kesehatan Lingkungan yang dikumpulkan dalam Rifaskes ini meliputi Pelatihan Air Minum/Bersih, Pelatihan Sanitasi Makanan/Minuman, Pelatihan Pengelolaan Sampah, dan Pelatihan Pengelolaan Air Limbah yang diikuti petugas Puskesmas pada tahun 2009 dan 2010. Angka Provinsi Riau untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan Program Kesehatan Lingkungan, persentase tertinggi adalah Pelatihan Air Bersih/Minum (34,9%) berikutnya adalah Pelatihan Sanitasi Makanan/Minuman (24,1%), Pelatihan Pengelolaan air limbah (13,3%), dan Pelatihan Pengelolaan sampah (10,8%). Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti secara lengkap keempat jenis pelatihan di atas adalah sebesar 14,1 persen (Tabel 4.8.2.2.1).

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan Pengelolaan Air Bersih/Minum dalam lingkup provinsi adalah sebesar 34,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan Pengelolaan Air Bersih/Minum terdapat di Kabupaten Rokan Hulu (52,6%) kemudian Kabupaten Indragiri Hilir (52,0%) dan Kabupaten Indragiri Hulu (43,8%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti pelatihan Pengelolaan

Air Bersih/ Minum terdapat di Kota Pekanbaru (5,3%), Kabupaten Kepulauan Meranti (12,5) dan Kabupaten Kuantan seningi (14,3%).

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Sanitasi Makanan/Minuman dalam lingkup provinsi adalah sebesar 24,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan Sanitasi Makanan/ Minuman terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu (37,5%), berikutnya adalah KabupatenKampar (34,6%) dan Kabupaten Pelalawan dan Rokan hilir (masing-masing 33,3%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti pelatihan Sanitasi Makanan/ Minuman terdapat di Kabupaten Kuantan seningi (0,0%) berikutnya Kabupaten Bengkalis (9,1%) dan Kabupaten Kepulauan Meranti (12,5%).

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan Pengelolaan Sampah dalam lingkup provinsi adalah sebesar 10,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan Pengelolaan Sampah terdapat di Rokan hilir (26,7%) berikutnya adalah Kabupaten Kampar (23,1%) dan Kota Dumai (11,1%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti pelatihan Pengelolaan sampah terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti (0,0%) berikutnya Kabupaten Kuantan seningi (4,8%) dan Kabupaten Rokan Hulu (5,3%).

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan Pengelolaan Air Limbah dalam lingkup provinsi adalah sebesar 13,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi mengikuti pelatihan Pengelolaan Air Limbah terdapat di Kabupaten Indragiri hilir (24,0%) diikuti oleh Kabupaten Kampar (23,1%) dan Kabupaten Rokan hilir (20,0%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti pelatihan Pengelolaan air limbah terdapat di Kabupaten Kuantan seningi (4,8%) berikutnya Kota Pekanbaru (5,3%) dan Kabupaten Indragiri hulu (6,3%).

Tabel 4.8.2.2.1.
Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Kesehatan Lingkungan, pada Tahun 2009 dan 2010 di Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pelatihan Air Minum/ Air Bersih	Pelatihan Sanitasi Makanan /Minuman	Pelatihan Pengelolaan Sampah	Pelatihan Pengelolaan Air Limbah	Pelatihan Lengkap
1	Kuantan Singingi	21	14.3	0	4.8	4.8	0
2	Indragiri Hulu	16	43.8	37.5	6.3	6.3	6.3
3	Indragiri Hilir	25	52.0	24.0	8.0	24.0	8.0
4	Pelalawan	12	41.7	33.3	8.3	8.3	0
5	Siak	14	35.7	28.6	7.1	7.1	7.1
6	Kampar	26	42.3	34.6	23.1	23.1	23.1
7	Rokan Hulu	19	52.6	26.3	5.3	15.8	5.3
8	Bengkalis	11	36.4	9.1	9.1	9.1	0
9	Rokan Hilir	15	33.3	33.3	26.7	20.0	20.0
10	Kepulauan Meranti	8	12.5	12.5	0	12.5	0
11	Kota Pekan Baru	19	5.3	15.8	10.5	5.3	0
12	Kota Dumai	9	33.3	33.3	11.1	11.1	11.1
	Riau	195	34.9	24.1	10.8	13.3	7.7

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti secara lengkap keempat jenis pelatihan dalam Program Kesehatan Lingkungan dalam lingkup provinsi adalah sebesar 7,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang mengikuti secara lengkap keempat jenis pelatihan terdapat di Kampar (23,1%), berikutnya adalah Kabupaten Rokan Hilir (20,2%) dan Kota Dumai (11,1%). Terdapat 5 kabupaten/kota dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang keseluruhan petugasnya Puskesmasnya tidak mengikuti secara lengkap keempat jenis pelatihan dalam Program Kesehatan Lingkungan (0,0%), yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Pelalawan, Bengkalis, Kepulauan Merantai dan Kota Pekanbaru.

4.8.2.3. Pedoman Program Kesehatan Lingkungan

Pedoman Program Kesehatan Lingkungan diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Buku pedoman Program Kesehatan Lingkungan yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 ini meliputi, Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Sekolah, Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, dan Permenkes Tentang Persyaratan Kualitas Air. Angka provinsi Riau untuk pedoman Program Kesehatan Lingkungan terbanyak dimiliki oleh Puskesmas adalah Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan (48,7%) diikuti oleh Permenkes tentang Persyaratan Kualitas Air (48,2%) dan Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Sekolah (41,5%). Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki secara lengkap ketiga jenis pedoman seperti yang disebutkan di atas adalah sebesar 33,8 persen (Tabel 4.8.2.3.1).

Persentase Puskesmas yang memiliki pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Sekolah adalah sebesar 41,5 persen. Persentase tertinggi puskesmas memiliki pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah terdapat di Kota Dumai (55,6%) kemudian kabupaten Kampar (53,8%) dan Kabupaten Indragiri hulu (50,0%). Persentase terendah Puskesmas memiliki pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah terdapat di Kabupaten Pelalawan (16,7%) kemudian Kabupaten Indragiri hilir (32,0%) dan Kabupaten Rokan hilir (33,3%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan adalah sebesar 48,7persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan terdapat di Kabupaten Siak (64,3%) kemudian Kota Dumai (55,6%) dan Kabupaten Indragiri HULU (50,0%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Permenkes tentang Persyaratan Kualitas Air terdapat di Kabupaten Pelalawan (16,7%) kemudian Kabupaten Indragiri Hilir (32,0%) dan Kabupaten Rokan Hilir (33,3%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Permenkes tentang Persyaratan Kualitas Air adalah sebesar 48,2 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Permenkes tentang Persyaratan Kualitas Air terdapat di Kabupaten Bengkalis (72,7%), Kota Pekanbaru (63,2%) berikutnya adalah Kabupaten Rokan hulu (57,9%) dan Kabupaten Siak (57,1%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Permenkes tentang Persyaratan Kualitas Air terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir (28,0%) kemudian Kabupaten Kampar (34,6%) dan Kabupaten Kepulauan Meranti (37,5%).

Tabel 4.8.2.3.1.
 Persentase Puskesmas menurut Kepemilikan Pedoman dalam Program Kesehatan Lingkungan di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pedoman Penyelenggaraan Kesling di Sekolah	Pedoman Penyelenggaraan Kesling	Permenkes Tentang Kualitas Air	Pedoman Lengkap Kesehatan Lingkungan
1	Kuantan Singingi	21	42.9	47.6	57.1	38.1
2	Indragiri Hulu	16	50.0	43.8	43.8	37.5
3	Indragiri Hilir	25	32.0	40.0	28.0	24.0
4	Pelalawan	12	16.7	50.0	50.0	16.7
5	Siak	14	42.9	64.3	57.1	35.7
6	Kampar	26	53.8	57.7	34.6	34.6
7	Rokan Hulu	19	47.4	47.4	57.9	42.1
8	Bengkalis	11	45.5	45.5	72.7	45.5
9	Rokan Hilir	15	33.3	46.7	40.0	26.7
10	Kepulauan Meranti	8	37.5	50.0	37.5	25.0
11	Kota Pekanbaru	19	36.8	42.1	63.2	31.6
12	Kota Dumai	9	55.6	55.6	55.6	55.6
Riau		195	41.5	48.7	48.2	33.8

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki petunjuk teknis dan pedoman dalam Program Kesehatan Lingkungan secara lengkap sebesar 33,8 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki pedoman Program Kesehatan Lingkungan secara lengkap terdapat di Kota Dumai (55,6%) kemudian Kabupaten Bengkalis (45,5%) dan Kabupaten Roan Hulu (42,1%). Persentase terendah Puskesmas memiliki secara lengkap pedoman Program Kesehatan Lingkungan terdapat di Kabupaten Pelalawan (16,7%) kemudian Kabupaten Rokan hilir (26,7%) dan Kabupaten Indragiri hilir (24,0%).

4.8.2.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan

Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan diperlukan dalam Program Kesehatan Lingkungan untuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan Program Kesehatan Lingkungan. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan dapat berupa kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, umpan balik dalam bentuk tertulis, dan pertemuan monitoring dan evaluasi (monev) yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. Angka provinsi Riau untuk bentuk Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan yang paling banyak diterima Puskesmas dalam Program Kesehatan Lingkungan adalah dalam bentuk supervisi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota (64,1%) diikuti oleh pertemuan monev (60,0%) dan umpan balik (57,9%). Angka Provinsi Riau untuk Puskesmas yang menerima secara lengkap ketiga bentuk Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam Program Kesehatan Lingkungan adalah sebesar 40,5 persen (Tabel 4.8.2.4.1.).

Tabel 4.8.2.4.1.
Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	% Ketersediaan Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesling			
			Supervisi Dinkes	Umpan Balik	Pertemuan Monev	Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Lengkap
1	Kuantan Singingi	21	19.0	4.8	14.3	0
2	Indragiri Hulu	16	25.0	25.0	50.0	6.3
3	Indragiri Hilir	25	72.0	60.0	56.0	56.0
4	Pelalawan	12	50.0	50.0	50.0	33.3
5	Siak	14	85.7	64.3	100	64.3
6	Kampar	26	92.3	88.5	65.4	57.7
7	Rokan Hulu	19	73.7	89.5	73.7	57.9
8	Bengkalis	11	54.5	63.6	45.5	27.3
9	Rokan Hilir	15	46.7	60.0	46.7	26.7
10	Kepulauan Meranti	8	62.5	37.5	25.0	12.5
11	Kota Pekanbaru	19	94.7	68.4	94.7	63.2
12	Kota Dumai	9	77.8	66.7	100	55.6
Riau		195	64.1	57.9	60.0	40.5

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan dalam bentuk kunjungan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota adalah sebesar 64,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima kunjungan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Program Kesehatan Lingkungan terdapat di Kota Pekanbaru (94,7%) kemudian Kabupaten Kampar (92,3%) dan Kabupaten Siak (85,7%). Persentase Puskesmas terendah menerima kunjungan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Program Kesehatan Lingkungan di Puskesmas terdapat di Kuantan sengingi (19,0%) berikutnya adalah Kabupaten Indragiri hulu (25,0%) dan Kabupaten Rokan hilir (46,7%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan dalam bentuk umpan balik adalah sebesar 57,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima umpan balik dari Dinas Kesehatan untuk Program Kesehatan Lingkungan terdapat di Kabupaten Rokanhulu (89,5%) berikutnya adalah Kabupaten Kampar (88,5%) dan Kota Pekanbaru (68,4%). Persentase Puskesmas terendah menerima umpan balik dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Program Kesehatan Lingkungan terdapat di Kabupaten Kuantan Sengingi (4,8%) berikutnya adalah Kabupaten Indragiri Hulu (25,0%) dan Kabupaten kelupauan Meranti (37,5%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan dalam bentuk pertemuan monitoring dan evaluasi adalah sebesar 60,0 persen. Persentase Puskesmas tertinggi mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Program Kesehatan Lingkungan di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota terdapat di Kabupaten Siak dan kota Dumai (100%) kemudian Kota Pekanbaru (94,7%). Persentase Puskesmas terendah mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Program Kesehatan Lingkungan di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota terdapat

di Kabupaten Kuantan Singingi (14,3%) berikutnya adalah Kabupaten Kepulauan Meranti (25,0%) dan Kabupaten Bengkalis (45,5%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima ketiga bentuk Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan secara lengkap adalah sebesar 40,0 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap untuk Program Kesehatan Lingkungan terdapat di Kabupaten Siak (64,3%) berikutnya adalah Kota Pekanbaru (63,2%) dan Kabupaten Rokan Hulu (57,9%). Persentase Puskesmas terendah menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi (0,0%) berikutnya adalah Kabupaten Indragiri Hulu (6,3%) dan Kabupaten Kepulauan Meranti (12,5%).

4.8.3. PROGRAM KESEHATAN IBU

4.8.3.1. Kegiatan Program Kesehatan Ibu

Kegiatan dalam pelaksanaan Program Kesehatan Ibu yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 meliputi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), Kemitraan Bidan dan Dukun di Puskesmas, Kelas Ibu (Hamil dan Nifas), dan Pelayanan Antenatal Terintegrasi yang dilaksanakan oleh Puskesmas pada tahun 2010. Angka Provinsi Riau untuk keempat jenis kegiatan kesehatan ibu, kegiatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) merupakan persentase tertinggi yang dilakukan oleh Puskesmas (96,9%) dan diikuti oleh Kemitraan Bidan dan Dukun (77,9%), Pelayanan Antenatal Terintegrasi (83,1%), dan Kelas Ibu Hamil dan Nifas (41,5%). Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan keempat jenis kegiatan Program Kesehatan Ibu secara lengkap adalah sebesar 31,8 persen (Tabel 4.8.3.1.1.).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) adalah sebesar 96,9 persen. Terdapat 6 kabupaten/ kota dari 12 kabupaten/ kota di Provinsi Riau yang seluruh Puskesmasnya (100,0%) melakukan kegiatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Pelalawan, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru dan kota Dumai. Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) terdapat di Kabupaten Rokan Hilir (86,7%) Kabupaten Indragiri hilir (92,0%) kemudian Kabupaten Siak (92,9%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan Kemitraan Bidan dan Dukun di Puskesmas adalah sebesar 77,9 persen. Terdapat 2 kabupaten/ kota dari 12 kabupaten/ kota di Provinsi Riau yang seluruh Puskesmasnya melakukan kegiatan Kemitraan Bidan dan Dukun (100,0%) yaitu Kabupaten Pelalawan dan Bengkalis. Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Kemitraan Bidan dan Dukun di Puskesmas terdapat di Kabupaten Indragiri hulu (43,8%), Kota Pekanbaru (52,6%) dan Kabupaten Kampar (61,5%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan Kelas Ibu Hamil dan Nifas adalah sebesar 41,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang melakukan kegiatan Kelas Ibu Hamil dan Nifas terdapat di Kabupaten Siak (92,6%) kemudian Kabupaten Indragiri hilir

(64,0%) dan Kota pekanbaru (52,6%). Persentase Puskesmas terendah yang melakukan kegiatan Kelas Ibu Hamil dan Nifas terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi (14,3%) berikutnya adalah Kabupaten Pelalawan (16,7%) dan Kabupaten Rokan Hilir (20,0%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan Pelayanan Antenatal Terintegrasi di Puskesmas adalah sebesar 83,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang melakukan kegiatan Pelayanan Antenatal Terintegrasi terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu dan Kota Pekanbaru (100,0%). Persentase Puskesmas terendah yang melakukan kegiatan Pelayanan Antenatal Terintegrasi terdapat di Kabupaten Bengkalis (72,7%) berikutnya adalah Kabupaten Kampar (73,1%) dan Kabupaten Kepulauan Meranti (75,0%).

Tabel 4.8.3.1.1
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Kegiatan Program Kesehatan Ibu di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	P4K	Kemitraan Dukun dan Bidan di Puskesmas	Kelas Ibu (Hamil dan Nifas)	Pelayanan Antenatal Terintegrasi	Kegiatan Lengkap Kesehatan Ibu
1	Kuantan Singingi	21	95,2	85,7	14,3	90,5	14,3
2	Indragiri Hulu	16	100	43,8	31,3	100	25,0
3	Indragiri Hilir	25	92,0	96,0	64,0	84,0	60,0
4	Pelalawan	12	100	100	16,7	75,0	16,7
5	Siak	14	92,9	92,9	92,9	78,6	78,6
6	Kampar	26	100	61,5	42,3	73,1	19,2
7	Rokan Hulu	19	100	94,7	42,1	94,7	36,8
8	Bengkalis	11	100	100	27,3	72,7	18,2
9	Rokan Hilir	15	86,7	73,3	20,0	53,3	20,0
10	Kepulauan Meranti	8	100	75,0	37,5	75,0	25,0
11	Kota Pekan Baru	19	100	52,6	52,6	100	31,6
12	Kota Dumai	9	100	66,7	44,4	88,9	22,2
Riau		195	96,9	77,9	41,5	83,1	31,8

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan keempat jenis kegiatan secara lengkap dalam Program Kesehatan Ibu adalah sebesar 31,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan keempat jenis kegiatan secara lengkap dalam Program Kesehatan Ibu terdapat di Kabupaten Siak (78,0%) kemudian Kabupaten Indragiri Hilir (60,0%) dan Kabupaten Rokan Hulu (36,8%). Persentase Puskesmas terendah yang melakukan keempat jenis kegiatan secara lengkap dalam Program Kesehatan Ibu terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi (14,3%) berikutnya adalah Kabupaten Pelalawan (16,7%) dan Kabupaten Kampar (masing-masing 19,2%).

4.8.3.2. Pelatihan Program Kesehatan Ibu

Pelatihan dalam pelaksanaan Program Kesehatan Ibu yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 ini meliputi Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN), Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan Pelatihan Pemantauan Wilayah Setempat Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA) yang diikuti tenaga Puskesmas pada tahun 2009 dan 2010. Angka provinsi Riau, dari ketiga jenis pelatihan Program Kesehatan Ibu,

pelatihan APN merupakan persentase tertinggi yang diikuti oleh petugas Puskesmas (46,7%) kemudian pelatihan PWS KIA (40,0%), dan pelatihan PONE D (19,5%). Angka provinsi untuk Puskesmas yang secara lengkap mengikuti ketiga jenis pelatihan dalam Program Kesehatan Ibu adalah sebesar 14,1 persen (Tabel 4.8.3.2.1.).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan APN adalah 46,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan APN terdapat di Kabupaten Pelalawan (100%) berikutnya adalah Kabupaten Kampar (84,6%) dan Kota Pekanbaru (57,9%). Persentase Puskesmas terendah terdapat di Indragiri hulu (6,3%) berikutnya adalah Kabupaten Rokan hilir (13,3%) dan Kabupaten Kepulauan Meranti (25,0%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan PONE D adalah sebesar 19,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan PONE D terdapat di Kabupaten Pelalawan (33,3%) berikutnya adalah Kabupaten Indragiri Hilir (32,0%) dan Kabupaten Indragiri hulu (31,3%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti pelatihan PONE D terdapat di Kabupaten Kuantan seningi (4,8%) berikutnya adalah Kabupaten Rokan hulu (10,5%) dan Kota Dumai (11,1%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan PWS KIA adalah sebesar 40,0 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan PWS KIA terdapat di Indragiri Hilir (60,0%) kemudian Kabupaten Bengkalis (54,5%) dan Kabupaten Pelalawan (50,0%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti pelatihan PWS KIA terdapat di Kabupaten Rokan Hulu (21,1%) kemudian Kabupaten Kuantan Seningi (23,8%) dan Kabupaten Indragiri Hulu (25,0%).

Tabel 4.8.3.2.1.

Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan pada Pelatihan Program Kesehatan Ibu pada Tahun 2009-2010, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pelatihan APN	Pelatihan PONE D	Pelatihan PWS-KIA	Pelatihan Lengkap Kesehatan Ibu
1	Kuantan Singingi	21	28.6	4.8	23.8	0
2	Indragiri Hulu	16	6.3	31.3	25.0	0
3	Indragiri Hilir	25	40.0	32.0	60.0	20.0
4	Pelalawan	12	100	33.3	50.0	16.7
5	Siak	14	57.1	14.3	35.7	14.3
6	Kampar	26	84.6	19.2	46.2	11.5
7	Rokan Hulu	19	42.1	10.5	21.1	0
8	Bengkalis	11	36.4	27.3	54.5	18.2
9	Rokan Hilir	15	13.3	13.3	46.7	0
10	Kepulauan Meranti	8	25.0	12.5	37.5	12.5
11	Kota Pekanbaru	19	57.9	21.1	36.8	15.8
12	Kota Dumai	9	55.6	11.1	44.4	11.1
	Riau	195	46.7	19.5	40.0	9.7

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan lengkap dalam Program Kesehatan Ibu adalah sebesar 9,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti ketiga jenis pelatihan secara lengkap dalam Program Kesehatan Ibu terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir (20,0%) berikutnya adalah Kabupaten Bengkalis

(18,2%) dan Kabupaten Pelalawan (16,7%). Terdapat 4 kabupaten/ kota dari 12 kabupaten/ kota di Provinsi Riau yang seluruh petugas Puskesmasnya tidak mengikuti ketiga jenis pelatihan secara lengkap dalam Program Kesehatan Ibu (0,0%), yaitu di Kabupaten Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, dan Rokan Hilir.

4.8.3.3. Pedoman Program Kesehatan Ibu

Pedoman Program Kesehatan Ibu diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Dalam Program Kesehatan Ibu, buku pedoman yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 ini meliputi, Acuan Asuhan Persalinan Normal (APN), Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Buku Pedoman Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), Buku Pegangan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal, Pedoman Kelas Ibu, Pedoman Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA), Pedoman Pencegahan dan Penanganan Malaria Pada Ibu Hamil dan Pedoman Operasional Pelayanan Terpadu Kesehatan Reproduksi, yang dimiliki oleh puskesmas.

Pedoman Program Kesehatan Ibu yang dimiliki oleh Provinsi Riau yang terbanyak dimiliki adalah Buku KIA (85,1%) kemudian berturut-turut Pedoman PWS-KIA (85,1%), Pedoman APN (65,1%), Buku Pedoman Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) (61,5%), Buku Pegangan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal (43,1%), Pedoman Operasional Pelayanan Terpadu Kesehatan Reproduksi (36,5%), Pedoman Kelas Ibu (56,4%) dan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Malaria Pada Ibu Hamil (39,0%). Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki keseluruhan jenis pedoman seperti yang disebutkan di atas adalah sebesar 22,6 persen.

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki pedoman APN adalah sebesar 63,1 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Pedoman APN terdapat di Kabupaten Kampar (88,5%) kemudian Kabupaten Siak (85,7%) dan Kabupaten Pelalawan (83,3%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Pedoman APN terdapat di Kabupaten Rokan Hilir (33,3%), kemudian Kabupaten Rokan Hulu (42,1%) dan Kabupaten Indragiri Hulu (50,0%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku KIA adalah sebesar 85,1 persen. Terdapat 2 kabupaten/ kota dari 12 kabupaten/ kota di Provinsi Riau yang seluruh Puskesmasnya memiliki Buku KIA (100,0%), yaitu Kabupaten Pelalawan dan Bengkalis. Persentase terendah Puskesmas memiliki Buku KIA terdapat di Kabupaten Rokan Hilir dan Kuantan Sengingi (masing-masing 66,7%), Kota Dumai (77,8%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki pedoman P4K adalah sebesar 61,5 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Pedoman P4K terdapat di Kabupaten Bengkalis (90,9%) kemudian Kabupaten Indragiri Hilir (76,0%) dan Kabupaten Rokan Hulu (73,7%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Pedoman P4K terdapat di Kabupaten Rokan Hilir (20,0%) kemudian Indragiri Hulu (43,8%) dan Kabupaten Kuantan Sengingi (47,6%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki buku Pegangan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal adalah sebesar 43,1 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Buku Pegangan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti (62,5%) kemudian Kabupaten Kota Pekanbaru (57,9%) dan Kabupaten Indragiri Hilir (56,0%). Persentase terendah Puskesmas

yang memiliki Buku Pegangan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal terdapat di Kabupaten Rokan Hilir (20,0%) kemudian Kabupaten Rokan hulu (26,3%) dan Kabupaten Pelalawan (33,3%).

Angka provinsi Puskesmas yang memiliki pedoman Kelas Ibu adalah sebesar 56,4 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Buku Pedoman Kelas Ibu terdapat di Kabupaten Siak (85,7%) berikutnya adalah Indragiri Hilir (76,0%) dan Kabupaten Kuantan Sengingi dan Pelalawan (66,7%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Kelas Ibu terdapat di Kabupaten Rokan Hilir (26,7%) berikutnya adalah Kota Pekanbaru (36,8%) dan Kabupaten Indragiri hulu (43,8%).

Tabel 4.8.3.4.1.a.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Pedoman untuk Melaksanakan Program Kesehatan Ibu di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pedoman APN	Pedoman Buku KIA	Pedoman P4K	Pedoman Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal	Pedoman Kelas Ibu
1	Kuantan Singingi	21	61.9	66.7	47.6	42.9	66.7
2	Indragiri Hulu	16	50.0	87.5	43.8	50.0	43.8
3	Indragiri Hilir	25	52.0	84.0	76.0	56.0	76.0
4	Pelalawan	12	83.3	100.0	66.7	33.3	66.7
5	Siak	14	85.7	85.7	57.1	42.9	85.7
6	Kampar	26	88.5	84.6	73.1	34.6	53.8
7	Rokan Hulu	19	42.1	94.7	73.7	26.3	47.4
8	Bengkalis	11	72.7	100.0	90.9	54.5	54.5
9	Rokan Hilir	15	33.3	66.7	20.0	20.0	26.7
10	Kepulauan Meranti	8	62.5	87.5	50.0	62.5	62.5
11	Kota Pekanbaru	19	63.2	94.7	63.2	57.9	36.8
12	Kota Dumai	9	66.7	77.8	66.7	44.4	55.6
Riau		195	63.1	85.1	61.5	43.1	56.4

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki pedoman PWS - KIA adalah sebesar 69,7 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Pedoman PWS KIA terdapat di Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis (100%), Kabupaten Siak (85,7%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Pedoman PWS KIA terdapat di Kabupaten Rokan Hilir (46,5%) berikutnya adalah Kabupaten Kuantan Sengingi (47,6%) dan Kabupaten Rokan hulu (57,9%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki pedoman Pencegahan dan Penanganan Malaria pada Ibu Hamil adalah sebesar 39,0 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Pedoman Pencegahan dan Penanganan Malaria pada Ibu Hamil terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir (64,0%) berikutnya adalah Kabupaten Kepulauan Meranti (50,0%) dan Kuantan Sengingi (47,6%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Pedoman Pencegahan dan Penanganan Malaria pada Ibu Hamil terdapat di Kabupaten Kampar (23,1%) berikutnya adalah Kabupaten Indragiri Hulu (25,0%) dan Kota Pekanbaru (26,3%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Pedoman Operasional Pelayanan Terpadu Kesehatan Reproduksi adalah sebesar 35,4 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Pedoman Operasional Pelayanan Terpadu Kesehatan Reproduksi terdapat di

Kabupaten Pelalawan, Siak dan Kepulauan Meranti (Masing-masing 50,0%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Pedoman Operasional Pelayanan Terpadu Kesehatan Reproduksi terdapat di Kota Dumai (11,1%) berikutnya adalah Kabupaten Rokan Hilir (20,6%) dan Kabupaten Indragiri Hulu (31,3%).

Tabel 4.8.3.4.1.b.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Pedoman untuk Melaksanakan Program Kesehatan Ibu di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pedoman PWS-KIA	Pedoman Pencegahan dan Penanganan Malaria Pada Ibu Hamil	Pedoman Operasional Pelayanan Terpadu Kespro	Pedoman Lengkap Kesehatan Ibu
1	Kuantan Singingi	21	47.6	47.6	33.3	28.6
2	Indragiri Hulu	16	62.5	25.0	31.3	25.0
3	Indragiri Hilir	25	76.0	64.0	36.0	20.0
4	Pelalawan	12	66.7	33.3	50.0	25.0
5	Siak	14	85.7	42.9	50.0	35.7
6	Kampar	26	73.1	23.1	34.6	15.4
7	Rokan Hulu	19	57.9	31.6	31.6	15.8
8	Bengkalis	11	100	45.5	45.5	36.4
9	Rokan Hilir	15	46.7	40.0	20.0	6.7
10	Kepulauan Meranti	8	62.5	50.0	50.0	37.5
11	Kota Pekanbaru	19	78.9	26.3	36.8	26.3
12	Kota Dumai	9	100	44.4	11.1	11.1
Riau		195	69.7	39.0	35.4	22.6

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki secara lengkap seluruh pedoman tersebut di atas adalah sebesar 22,6 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki secara lengkap seluruh pedoman dalam Program Kesehatan Ibu terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti (37,5%) berikutnya adalah Kabupaten Bengkalis (36,4%) dan Kabupaten Siak (35,7%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Pedoman dalam Program Kesehatan Ibu terdapat di kabupaten Rokan Hilir (6,7%) berikutnya adalah Kota Dumai (11,1%) dan Kabupaten Kampar (15,4%).

4.8.3.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Ibu

Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan diperlukan dalam Program Kesehatan Ibu untuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan Program Kesehatan Ibu. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dapat berupa kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, penerimaan umpan balik dalam bentuk tertulis, pertemuan monitoring dan evaluasi yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan Audit Maternal Perinatal (AMP). Di Provinsi Riau, bentuk Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan yang paling banyak diterima Puskesmas dalam Program Kesehatan Ibu adalah dalam bentuk pertemuan monev yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota (84,1%) diikuti oleh kunjungan supervisi dan monitoring oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota (82,6%), umpan balik (75,9%), dan Audit Maternal dan Perinatal (76,9%). Persentase Puskesmas yang

secara lengkap menerima seluruh bentuk Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam Program Kesehatan Ibu adalah sebesar 63,1 persen (Tabel 4.8.3.5.1.).

Tabel 4.8.3.5.1.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Ibu di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Supervisi Dinkes	Umpan Balik	Pertemuan Monev	Audit Maternal Perinatal
1	Kuantan Singingi	21	47,6	33,3	61,9	57,1
2	Indragiri Hulu	16	68,8	68,8	75,0	68,8
3	Indragiri Hilir	25	92,0	92,0	96,0	88,0
4	Pelalawan	12	66,7	83,3	91,7	100
5	Siak	14	78,6	64,3	92,9	85,7
6	Kampar	26	96,2	84,6	96,2	96,2
7	Rokan Hulu	19	89,5	89,5	94,7	100
8	Bengkalis	11	72,7	72,7	63,6	100
9	Rokan Hilir	15	86,7	80,0	80,0	53,3
10	Kepulauan Meranti	8	100	75,0	37,5	100
11	Kota Pekanbaru	19	94,7	73,7	89,5	21,1
12	Kota Dumai	9	100	100	100	66,7
Riau		195	82,6	75,9	84,1	76,9

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk kunjungan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota ke Puskesmas untuk Program Kesehatan Ibu adalah sebesar 82,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima kunjungan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Program Kesehatan Ibu terdapat di Kabupaten kepulauan Meranti dan Kota Dumai (masing-masing 100,0%) berikutnya adalah Kabupaten Kampar (96,2%). Persentase Puskesmas terendah menerima kunjungan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Program Kesehatan Ibu terdapat di Kabupaten Kuantan Sengingi (47,6%) kemudian Kabupaten Pelalawan (66,7%) dan Kabupaten indeagiri Hulu (68,8%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk umpan balik untuk Program Kesehatan Ibu adalah sebesar 75,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima umpan balik Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Program Kesehatan Ibu terdapat di Kota Dumai (100,0%) diikuti oleh Kabupaten Indragiri Hilir (92,0%) dan Kabupaten Rokan Hulu (89.5%). Persentase Puskesmas terendah menerima umpan balik Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Program Kesehatan Ibu terdapat di Kabupaten Kuantan Sengingi (33,3%) berikutnya adalah Kabupaten Siak (64,3%) dan Kabupaten Indragiri HULU (68,8%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk pertemuan monev di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Program Kesehatan Ibu adalah sebesar 84,1 persen. Persentase Puskesmas yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk pertemuan monev di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Program Kesehatan Ibu terdapat di Kota Dumai (100,0%) diikuti oleh

Kabupaten Kampar (96,2%) dan Kabupaten Indragiri Hilir (96,6%). Persentase Puskesmas terendah mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Program Kesehatan Ibu di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti (37,5%) diikuti oleh Kabupaten Kuantan Singingi (61,9%) dan Kabupaten Bengkalis (63,6%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk Audit Maternal dan Perinatal untuk Program Kesehatan Ibu adalah sebesar 76,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang mengikuti Audit Maternal dan Perinatal untuk Program Kesehatan Ibu di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota terdapat di Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Bengkalis, Kepulauan Meranti (masing-masing 100,0%). Persentase Puskesmas terendah yang mengikuti Audit Maternal dan Perinatal untuk Program Kesehatan Ibu di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota terdapat di Kota Pekanbaru (21,1%) kemudian Kabupaten Rokan Hilir (53,3%) dan Kabupaten Kuantan Singingi (57,1%).

4.8.4. PROGRAM KESEHATAN BAYI DAN ANAK

4.8.4.1. Kegiatan Program Kesehatan Bayi dan Anak

Kegiatan dalam pelaksanaan Pelayanan kesehatan bayi dan Anak yang dikumpulkan pada Rifaskes ini meliputi Manajemen Asfiksia, Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM), Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), Kelas Ibu Balita, Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), Kekerasan Terhadap Anak (KTA), Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), dan Penanganan Kasus Diare pada Balita dengan Dehidrasi Sedang dan Berat. Dalam lingkup provinsi, dari keseluruhan jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak di atas, kegiatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) merupakan persentase tertinggi yang dilakukan oleh Puskesmas (84,6%) dan disusul oleh Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) (78,5%), Penanganan Kasus Diare pada Balita dengan Dehidrasi Sedang dan Berat (76,4%), Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) (67,2%), Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) (54,4%), Manajemen Asfiksia (52,3%), Kelas Ibu Balita (18,5%) dan Kekerasan Terhadap Anak (KTA) (13,3%). Angka provinsi sebesar 5,6 persen Puskesmas melakukan keseluruhan kegiatan di atas secara lengkap dalam Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak (Tabel 4.8.4.1.1).

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan Manajemen Asfiksia dalam lingkup provinsi adalah sebesar 52,3 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang melakukan kegiatan Manajemen Asfiksia terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir (76,0%), Kabupaten Kampar (69,2%) kemudian Kabupaten Rokan Hilir (66,7%).. Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Manajemen Asfiksia terdapat di Kabupaten Kep. Meranti (12,5%) kemudian Kabupaten Kuantan Singingi (28,6%) dan Kota Dumai (33,3%).

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) dalam lingkup provinsi adalah sebesar 67,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir (100,0%) berikutnya adalah Kabupaten Bengkalis (90,9%) dan Rokan Hulu (73,7%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi (38,1%) berikutnya adalah Kabupaten Rokan Hilir (53,3%) dan Kota Dumai (55,6%).

Laporan Provinsi Riau Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dalam lingkup provinsi adalah sebesar 84,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) terdapat di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Bengkalis (masing-masing 100,0%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dalam lingkup provinsi terdapat di Kabupaten Rokan Hilir (53,3%) berikutnya adalah Kabupaten Kuantan Singingi (57,1%) dan Kabupaten Kep. Meranti (75,0%).

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan Kelas Ibu Balita dalam lingkup provinsi adalah sebesar 18,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Kelas Ibu Balita terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir (36,0%) berikutnya adalah Kota Dumai (33,3%) dan Kabupaten Kampar (26,6%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Kelas Ibu Balita terdapat di Kabupaten Rokan Hilir dan Kep. Meranti (Masing-masing 0,0%).

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) dalam lingkup provinsi adalah sebesar 78,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) yaitu Kabupaten Indragiri Hilir (100%) kemudian Kabupaten Pelalawan (91,7%) dan Kabupaten Bengkalis (90,9%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) terdapat di Kabupaten Rokan Hilir (20,0%) berikutnya adalah Kuantan Singingi (47,6%) dan Kabupaten Rokan HULu (73,7%).

Tabel 4.8.4.1.1.a
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Manajemen Asfiksia	MTBM	MTBS	Kelas Ibu Balita	Simulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang
1	Kuantan Singingi	21	28.6	38.1	57.1	4.8	47.6
2	Indragiri Hulu	16	43.8	56.3	87.5	6.3	75.0
3	Indragiri Hilir	25	76.0	100.0	96.0	36.0	100.0
4	Pelalawan	12	58.3	66.7	91.7	16.7	91.7
5	Siak	14	57.1	100	92.9	21.4	100
6	Kampar	26	69.2	50.0	88.5	26.9	88.5
7	Rokan Hulu	19	47.4	73.7	84.2	26.3	73.7
8	Bengkalis	11	63.6	90.9	100	18.2	90.9
9	Rokan Hilir	15	66.7	53.3	53.3	0	20.0
10	Kepulauan Meranti	8	12.5	62.5	75.0	0	87.5
11	Kota Pekanbaru	19	36.8	63.2	100	15.8	84.2
12	Kota Dumai	9	33.3	55.6	88.9	33.3	88.9
	Riau	195	52.3	67.2	84.6	18.5	78.5

Tabel 4.8.4.1.1.b.
 Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pelayanan Kekerasan Terhadap Anak	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	Penanganan Kasus Diare Pada Balita	Kegiatan Lengkap Bayi dan Anak
1	Kuantan Singingi	21	9.5	33.3	33.3	0
2	Indragiri Hulu	16	18.8	37.5	81.3	0
3	Indragiri Hilir	25	12.0	44.0	88.0	8.0
4	Pelalawan	12	8.3	58.3	83.3	8.3
5	Siak	14	14.3	100	100	7.1
6	Kampar	26	15.4	50.0	80.8	7.7
7	Rokan Hulu	19	21.1	68.4	84.2	10.5
8	Bengkalis	11	9.1	45.5	81.8	9.1
9	Rokan Hilir	15	0	26.7	53.3	0
10	Kepulauan Meranti	8	0	75.0	62.5	0
11	Kota Pekanbaru	19	15.8	63.2	89.5	5.3
12	Kota Dumai	9	33.3	88.9	77.8	11.1
Riau		195	13.3	54.4	76.4	5.6

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan Pelayanan Kekerasan Terhadap Anak (KTA) dalam lingkup provinsi adalah sebesar 13,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pelayanan Kekerasan Terhadap Anak (KTA) terdapat di Kota Dumai (33,3%) berikutnya adalah Kabupaten Rokan HULu (21,1%) dan Kab. Indragiri hULu (18,8%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Pelayanan Kekerasan Terhadap Anak (KTA) terdapat di Kabupaten Rokan Hilir dan Kep. Meranti (Masing-masing 0,0%).

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dalam lingkup provinsi adalah sebesar 54,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) terdapat di Kabupaten Siak (100%) berikutnya adalah Kota Dumai (88,9%) dan Kabupaten Kep. Meranti (75,0%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan PKPR terdapat di Kabupaten Rokan Hilir (26,7%) berikutnya adalah Kabupaten Kuantan Sengingi (33,3%) dan Indragiri Hulu (37,5%).

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan Penanganan Kasus Diare pada Balita dengan Dehidrasi Sedang dan Berat dalam lingkup provinsi adalah sebesar 76,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Penanganan Kasus Diare pada Balita dengan Dehidrasi Sedang dan Berat terdapat di Kabupaten Siak (100,0%) berikutnya adalah Kota Pekanbaru (89,5%) dan Kabupaten Indragiri hilir (88,0%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Penanganan Kasus Diare pada Balita dengan Dehidrasi Sedang dan Berat terdapat di Kabupaten Kuantan Sengingi (33,3%) berikutnya adalah Kabupaten Rokan Hilir (53,3%) dan Kabupaten Kep. Meranti (62,5%).

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan lengkap terkait dengan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak dalam lingkup provinsi adalah sebesar 5,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan lengkap dalam Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak terdapat di Kota Dumai (11,1%) berikutnya adalah Kabupaten Rokan HULu (10,5%) dan

Kabupaten Bengkalis (9,1%). Terdapat 4 kabupaten/ kota dari 12 kabupaten/ kota yang seluruh Puskesmasnya tidak melakukan kegiatan secara lengkap dalam Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak (0,0%) yaitu di Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri HULU, Rokan Hilir, Kep, Meranti.

4.8.4.2. Pelatihan Program Kesehatan Bayi dan Anak

Jenis Pelatihan dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 ini meliputi Pelatihan Kelas Ibu Balita, Pelatihan Pelayanan KTA, Pelatihan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), Pelatihan Manajemen Asfiksia, dan Pelatihan Manajemen Terhadap Balita Sakit (MTBS) yang diikuti petugas puskesmas pada tahun 2009 dan 2010. Dari keseluruhan pelatihan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak yang tersebut di atas, Pelatihan Manajemen Asfiksia merupakan presentase tertinggi yang dilakukan oleh Puskesmas (43,6%) kemudian Pelatihan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) (30,3%), disusul oleh pelatihan MTBS (33,8%), Pelatihan Kelas Ibu Balita (6,7%), dan pelatihan Pelayanan KTA (9,7%). Dalam lingkup provinsi, sebesar 2,6 persen Puskesmas yang petugasnya mengikuti keseluruhan pelatihan dalam Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak (Tabel 4.8.4.2.1).

Tabel 4.8.4.2.1

Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan Pelatihan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak pada Tahun 2009 dan 2010 di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pelatihan Manajemen Asfiksia	Pelatihan Kelas Ibu Balita	Pelatihan KTA	Pelatihan SDIDTK	Pelatihan MTBS	Pelatihan Lengkap Kesehatan Bayi dan Anak
1	Kuantan Singingi	21	4.8	0	4.8	0	0	0
2	Indragiri Hulu	16	43.8	0	12.5	25.0	37.5	0
3	Indragiri Hilir	25	64.0	32.0	12.0	64.0	80.0	12.0
4	Pelalawan	12	33.3	0	0	25.0	33.3	0
5	Siak	14	85.7	0	28.6	57.1	64.3	0
6	Kampar	26	53.8	0	3.8	23.1	19.2	0
7	Rokan Hulu	19	15.8	0	10.5	21.1	26.3	0
8	Bengkalis	11	63.6	9.1	9.1	45.5	45.5	0
9	Rokan Hilir	15	33.3	6.7	0	13.3	0	0
10	Kepulauan Meranti	8	25.0	0	0	0	25.0	0
11	Kota Pekanbaru	19	57.9	5.3	5.3	15.8	36.8	0
12	Kota Dumai	9	33.3	22.2	44.4	88.9	33.3	22.2
Riau		195	43.6	6.7	9.7	30.3	33.8	2.6

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan Manajemen Asfiksia adalah sebesar 43,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan Manajemen Asfiksia terdapat di Kabupaten Siak (85,7%), kemudian Kabupaten Indragiri Hilir (64,0%) dan Kabupaten Bengkalis (63,6%). Persentase Puskesmas Terendah di Kabupaten Kuantan Singingi (4,8%) dan Kabupaten Roka Hulu (15,8%).

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan Kelas Ibu Balita adalah sebesar 6,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan

Kelas Ibu Balita terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir (32,0%) berikutnya adalah Kota Dumai (22,2%) dan Kabupaten Bengkalis (9,1%). Terdapat 7 kabupaten/ kota dari 12 kabupaten/ kota yang seluruh petugas Puskesmasnya tidak menerima pelatihan Kelas Ibu Balita (0,0%) yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri hulu, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Kep. Meranti.

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan KTA dalam lingkup provinsi adalah sebesar 9,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan KTA terdapat di Kota Dumai (44,4%) kemudian Kabupaten Siak (26,6%) dan Kabupaten Indragiri hulu (12,5%). Terdapat 3 kabupaten/ kota dari 12 kabupaten/ kota yang seluruh petugas Puskesmasnya tidak mengikuti pelatihan KTA (0,0%) yaitu Kabupaten Pelalawan, Rokan Hilir, dan Kep. Meranti.

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) adalah sebesar 30,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) terdapat di Kota Dumai (88,9%) kemudian Kabupaten Indragiri hilir (64,0%) dan Kabupaten Siak (57,1,0%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti pelatihan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi dan Kep. Meranti (masing-masing 0 %).

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dalam lingkup provinsi adalah sebesar 33,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan MTBS terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir (80,0%) kemudian Kabupaten Siak (64,3%) dan Bengkalis (45,5%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti Pelatihan MTBS terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi dan Roka Hilir (masing-masing 0%).

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti secara lengkap keseluruhan jenis pelatihan dalam Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak pada lingkup provinsi adalah sebesar 2,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan secara lengkap dalam Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak terdapat di Kota Dumai (22,2%) kemudian Kabupaten Indragiri Hilir (12,0%). Terdapat 10 kabupaten/ kota dari 12 kabupaten/ kota di Provinsi Riau yang seluruh petugas Puskemasnya tidak menerima pelatihan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak secara lengkap (0,0%).

4.8.4.3. Pedoman Program Kesehatan Bayi dan Anak

Pedoman Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak, Buku Pedoman yang dikumpulkan dalam Rifaskes ini meliputi, Pedoman Manajemen Asfiksia, Buku KIA, Pedoman SDIDTK, Pedoman Kelas Ibu Balita, Modul BBLR, Modul MTBS, Pedoman pelayanan KTA, dan Pedoman PKPR. Di Provinsi Riau, Pedoman upaya Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak terbanyak dimiliki oleh Puskesmas adalah Buku KIA (74,9%) kemudian Modul MTBS (67,2%), Pedoman SDIDTK (53,8%), Modul BBLR (62,1%), Pedoman Manajemen Asfiksia (53,8%), Pedoman PKPR (38,5%), Pedoman Kelas Ibu Balita (33,8%) dan Pedoman Pelayanan KTA (29,2%). Persentase Puskesmas yang memiliki seluruh Pedoman seperti yang disebutkan di atas dalam lingkup provinsi adalah sebesar 20,0 persen. (Tabel 4.8.4.3.1.a dan 4.8.4.3.1.b.).

Persentase Puskesmas memiliki Pedoman Manajemen Asfiksia dalam lingkup provinsi adalah sebesar 53,8 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Pedoman Manajemen Asfiksia terdapat di Kabupaten Siak (78,6%) kemudian Kabupaten Kampar (76,9%) dan Kabupaten Bengkalis (72,7%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Pedoman Manajemen Asfiksia terdapat di Kabupaten Kep. Meranti (25,0%) kemudian Kabupaten Rokan HULU (31,6%) dan Kabupaten pelalawan (41,7%).

Persentase Puskesmas memiliki Buku KIA dalam lingkup provinsi adalah sebesar 74,9 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Buku KIA terdapat di Kabupaten Siak (100,0%) kemudian Kabupaten bengkalis (90,9%) dan Kabupaten Kampar (80,8%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Buku KIA terdapat di Kabupaten Rokan Hllir (53,3%) kemudian Kabupaten Pelalwan (58,3%) dan Kabupaten Kuantan Sengingi (66,7%).

Persentase Puskesmas memiliki Pedoman SDIDTK dalam lingkup provinsi adalah sebesar 54,8 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Pedoman SDIDTK terdapat di Kabupaten Siak (100%) kemudian kabupaten Indragiri HULU (68,8%) dan Kabupaten Indragiri Hllir (68,0%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Pedoman SDIDTK terdapat di Kabupaten RokanHilir (26,7%) kemudian Kabupaten Pelalawan (33,3%) dan Kabupaten Rokan HULU (36,8%).

Persentase Puskesmas memiliki Pedoman Kelas Ibu Balita dalam lingkup provinsi adalah sebesar 33,8 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Pedoman Kelas Ibu Balita terdapat di Kabupaten Indragiri hulu dan Siak (50,0%) kemudian Kabupaten Indragiri hilir (48,0). Persentase terendah Puskesmas memiliki Pedoman Kelas Ibu Balita terdapat di Kabupaten Pelalawan (16,7%) kemudian Kabupaten Kampar (19,2%) dan Kabupaten Kep.Meranti (25,0%).

Persentase Puskesmas memiliki Modul BBLR dalam lingkup provinsi adalah sebesar 44,1 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Modul BBLR terdapat di Kabupaten Siak (85,7%) kemudian Kabupaten Bengkalis (81,8%) dan Kabupaten Indragiri HULU (62,5%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Modul BBLR terdapat di Kabupaten Rokan Hulu (26,3%) kemudian Kabupaten Kuantan Sengingi dan Rokan Hilir (masing-masing 33,3%).

Persentase Puskesmas memiliki Modul MTBS dalam lingkup provinsi adalah sebesar 67,2 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Modul MTBS terdapat di Kota Dumai dan Kabupaten Siak (masing-masing 100%). kemudian Kabupaten bengkalis (90,9%).. Persentase terendah Puskesmas memiliki Modul MTBS terdapat di Kabupaten Rokan Hilir (33,3%) kemudian Kabupaten Pelalawan dan Kampar (masing-masing 50,0%).

Persentase Puskesmas memiliki Pedoman KTA dalam lingkup provinsi adalah sebesar 29,2 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Pedoman KTA terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu dan Siak (masing-masing 50,0%) kemudian bengkalis (45,5%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Pedoman KTA terdapat di Kabupaten Kampar (7,7%) kemudian Pelalawan (8,3%) dan Kota Dumai (11,1%).

Persentase Puskesmas memiliki Pedoman PKPR dalam lingkup provinsi adalah sebesar 38,5 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Pedoman PKPR terdapat di Kabupaten Siak (78,6%) kemudian Kabupaten Indragiri Hulu (56,3%) dan kota Dumai (55,6%).

Laporan Provinsi Riau Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Persentase terendah Puskesmas memiliki Pedoman PKPR terdapat di Rokan Hilir (13,3%) kemudian Kabupaten Pelalawan (16,7%) dan Kabupaten Kep.Meranti (25,0%).

Tabel 4.8.4.3.1.a.

Persentase Puskesmas menurut Pedoman Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pedoman Manajemen Asfiksia	Pedoman Buku KIA	Pedoman SDIDTK	Pedoman Kelas Ibu Balita	Modul BBLR
1	Kuantan Singingi	21	42.9	66.7	38.1	38.1	33.3
2	Indragiri Hulu	16	68.8	75.0	68.8	50.0	62.5
3	Indragiri Hilir	25	48.0	72.0	68.0	48.0	40.0
4	Pelalawan	12	41.7	58.3	33.3	16.7	25.0
5	Siak	14	78.6	100	100	50.0	85.7
6	Kampar	26	76.9	80.8	65.4	19.2	42.3
7	Rokan Hulu	19	31.6	78.9	36.8	26.3	26.3
8	Bengkalis	11	72.7	90.9	63.6	36.4	81.8
9	Rokan Hilir	15	53.3	53.3	26.7	26.7	33.3
10	Kepulauan Meranti	8	25.0	75.0	37.5	25.0	37.5
11	Kota Pekanbaru	19	47.4	73.7	42.1	26.3	36.8
12	Kota Dumai	9	44.4	77.8	55.6	44.4	44.4
Riau		195	53.8	74.9	53.8	33.8	44.1

Tabel 4.8.4.3.1.b.

Persentase Puskesmas menurut Pedoman Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Modul MTBS	Pedoman KTA	Pedoman PKPR	Pedoman Lengkap Kesehatan Ibu Balita
1	Kuantan Singingi	21	61.9	38.1	42.9	28.6
2	Indragiri Hulu	16	68.8	50.0	56.3	43.8
3	Indragiri Hilir	25	80.0	32.0	28.0	12.0
4	Pelalawan	12	50.0	8.3	16.7	8.3
5	Siak	14	100	50.0	78.6	42.9
6	Kampar	26	50.0	7.7	26.9	7.7
7	Rokan Hulu	19	57.9	26.3	47.4	21.1
8	Bengkalis	11	90.9	45.5	45.5	27.3
9	Rokan Hilir	15	33.3	20.0	13.3	13.3
10	Kepulauan Meranti	8	87.5	25.0	25.0	12.5
11	Kota Pekanbaru	19	63.2	36.8	36.8	21.1
12	Kota Dumai	9	100	11.1	55.6	0
Riau		195	67.2	29.2	38.5	20.0

Persentase Puskesmas memiliki Pedoman Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak dalam lingkup provinsi adalah sebesar 20,0 persen. Persentase tertinggi Puskesmas tersedia Pedoman Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak secara lengkap terdapat di Kabupaten

Indragiri Hulu (43,8%) kemudian Kabupaten Siak (42,9%) dan Kabupaten Kauntan sengingi (28,6%). Persentase terendah Puskesmas tersedia Pedoman Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak secara lengkap terdapat di Dumai (10%)

4.8.4.4 Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Bayi dan Anak

Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan diperlukan dalam Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak untuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan program. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dapat berupa kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, umpan balik dalam bentuk tertulis, dan pertemuan monitoring dan evaluasi yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. Persentase Puskesmas untuk bentuk Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan yang paling banyak diterima Puskesmas dalam Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak adalah dalam bentuk pertemuan monev yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota (73,8%) dan diikuti oleh supervisi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota ke Puskesmas (67,2%) kemudian umpan balik (61,0%). Secara nasional persentase Puskesmas lengkap menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk kunjungan monev, umpan balik dan pertemuan monev di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota adalah sebesar 50,8 persen. (Tabel 4.8.4.4.1).

Tabel 4.8.4.4.1.

Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	% Ketersediaan Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Bayi dan Anak			
			Supervisi Dinkes	Umpan Balik	Pertemuan Monev	Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Lengkap
1	Kuantan Singingi	21	23.8	19.0	42.9	19.0
2	Indragiri Hulu	16	50.0	31.3	81.3	25.0
3	Indragiri Hilir	25	76.0	64.0	72.0	52.0
4	Pelalawan	12	41.7	50.0	58.3	33.3
5	Siak	14	71.4	71.4	100	71.4
6	Kampar	26	88.5	76.9	80.8	69.2
7	Rokan Hulu	19	78.9	84.2	89.5	73.7
8	Bengkalis	11	54.5	72.7	72.7	54.5
9	Rokan Hilir	15	86.7	80.0	73.3	66.7
10	Kepulauan Meranti	8	87.5	50.0	25.0	12.5
11	Kota Pekanbaru	19	73.7	57.9	89.5	52.6
12	Kota Dumai	9	66.7	77.8	77.8	55.6
Riau		195	67.2	61.0	73.8	50.8

Persentase Puskesmas menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk kunjungan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ke Puskesmas untuk Pelayanan kesehatan bayi dan Anak dalam lingkup provinsi adalah sebesar 67,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima kunjungan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak terdapat di kabupaten Kampar (88,5%) kemudian Kabupaten Kep. Meranti (87,5%) dan Kabupaten Rokan Hilir (86,7%). Persentase Puskesmas

terendah menerima kunjungan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak terdapat di Kabupaten Kuantan Senggigi (23,8%) kemudian Kabupaten Pelalawan (41,7%) dan Kabupaten Indragiri Hulu (50,0%).

Persentase Puskesmas menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk umpan balik untuk Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak adalah sebesar 61 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima umpan balik Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak terdapat di Kabupaten Rokan Hulu (84,2%) kemudian Kabupaten Rokan Hilir (80,0%) dan Kota Dumai (77,8%). Persentase Puskesmas terendah menerima umpan balik Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak terdapat di Kabupaten Kuantan Senggigi (19,0%) kemudian Kabupaten Indragiri Hulu (31,3%) dan Kabupaten Pelalawan serta Kabupaten Meranti dengan presentase sama yaitu (50,0%).

Persentase Puskesmas menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk pertemuan monev di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak dalam lingkup provinsi adalah sebesar (73,8%). Persentase Puskesmas tertinggi mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Program Kesehatan Bayi dan Anak di Dinas Kesehatan terdapat di Kabupaten Siak (100%) kemudian di Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Pekanbaru (89,5%). Persentase Puskesmas terendah mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Program Kesehatan bayi dan Anak di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota terdapat di Kabupaten Kep. Meranti (25,0%) kemudian Kabupaten Kuantan Senggigi (42,9%) dan Kabupaten Pelalawan (58,3%).

Persentase Puskesmas menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap untuk Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak dalam lingkup provinsi adalah sebesar (50,8%). Persentase Puskesmas tertinggi menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap untuk Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota terdapat di Kabupaten Rokan Hulu (73,7%) kemudian Kabupaten Siak (71,4%) dan Kabupaten Rokan Hilir (66,7%). Persentase Puskesmas terendah menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap terdapat di Kabupaten Kep. Meranti (12,5%) kemudian Kabupaten Kuantan Senggigi (19,0%) dan Kabupaten Indragiri Hulu (25,0%).

4.8.5. PROGRAM KELUARGA BERENCANA

4.8.5.1 Kegiatan Program Keluarga Berencana

Kegiatan dalam Pelayanan Keluarga Berencana yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 meliputi Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi Mantap (IUD, Susuk, Vasektomi), Penanganan Komplikasi Kontrasepsi, dan Konsultasi KB (Keluarga Berencana). Angka provinsi untuk kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana di Provinsi Riau adalah (96,9%) untuk Konsultasi KB, (84,6%) untuk Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi Mantap (IUD, Susuk, Vasektomi), dan (68,2%) untuk Penanganan Komplikasi Kontrasepsi. Angka provinsi untuk Puskesmas yang melaksanakan ketiga kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana adalah sebesar (61,0%). (Tabel 4.8.5.1.1).

Angka provinsi untuk kegiatan Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi Mantap (IUD, Susuk, Vasektomi) adalah sebesar (84,6%). Persentase Puskesmas tertinggi melakukan

kegiatan Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi Mantap (IUD, Susuk, Vasektomi) terdapat di Kabupaten Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak dan Kota Dumai, masing-masing mencapai (100%). Sedangkan persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Kep. Meranti (25,0%), Kabupaten Bengkalis (72,7%), dan Kabupaten Rokan Hilir (73,3%).

Angka provinsi untuk kegiatan Penanganan Komplikasi Kontrasepsi adalah sebesar 68,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Penanganan Komplikasi Kontrasepsi terdapat di Kabupaten Bengkalis (90,9%), kemudian Kabupaten Indragiri Hulu (81,3%) serta Kabupaten Siak (78,6%), sedangkan persentase Puskesmas terendah terdapat di Kota Dumai (33,3%), kemudian Kabupaten Kep. Meranti (37,5%) dan Kabupaten Kuantan Senggigi (42,9%).

Angka provinsi untuk kegiatan Pelayanan Konsultasi KB adalah sebesar 9%. Terdapat 9 Kabupaten/Kota dari 12 Kabupaten/Kota yang seluruh Puskesmasnya melakukan kegiatan Pelayanan Konsultasi KB. Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Pelayanan Konsultasi KB terdapat di Kabupaten Rokan Hilir (80,0%), Kabupaten Indragiri Hulu (87,5%) dan Kabupaten Kuantan Senggigi (95,2%).

Angka provinsi untuk kegiatan lengkap Pelayanan Keluarga Berencana sebesar 61,0 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan ketiga kegiatan di atas adalah Kabupaten Siak (78,6%) kemudian Kabupaten Kampar (76,9%) dan Kabupaten Pelalawan (75,0%). Persentase Puskesmas terendah melakukan ketiga kegiatan di atas terdapat di Kabupaten Kep. Meranti (12,5%), Kota Dumai (33,3%) dan Kabupaten Rokan Hilir (40,0%).

Tabel 4.8.5.1.1.

Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pelayanan KB di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Kegiatan Pelayanan KB			
			Pemasangan Alat Kontrasepsi	Penanganan Komplikasi	Konsultasi KB	Kegiatan Lengkap
1	Kuantan Singingi	21	81.0	42.9	95.2	38.1
2	Indragiri Hulu	16	75.0	81.3	87.5	68.8
3	Indragiri Hilir	25	84.0	76.0	100	68.0
4	Pelalawan	12	100	75.0	100	75.0
5	Siak	14	100	78.6	100	78.6
6	Kampar	26	96.2	76.9	100	76.9
7	Rokan Hulu	19	84.2	68.4	100	57.9
8	Bengkalis	11	72.7	90.9	100	72.7
9	Rokan Hilir	15	73.3	60.0	80.0	40.0
10	Kepulauan Meranti	8	25.0	37.5	100	12.5
11	Kota Pekanbaru	19	94.7	73.7	100	73.7
12	Kota Dumai	9	100	33.3	100	33.3
Riau		195	84.6	68.2	96.9	61.0

4.8.5.2 Pelatihan Program Keluarga Berencana

Pelatihan dalam pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana yang dikumpulkan Rifaskes 2011 meliputi Pelatihan Program KB, Pelatihan Pemasangan Alat Kontrasepsi, dan Pelatihan Penanganan Komplikasi Kontrasepsi yang diikuti tenaga puskesmas pada tahun

2009 dan tahun 2010. Angka provinsi Pelatihan Pemasangan Alat Kontrasepsi sebesar 70,3 persen, merupakan persentase tertinggi, kemudian diikuti oleh Pelatihan Alat KB (64,1%), dan Pelatihan Penanganan Komplikasi Kontrasepsi (32,8%). Angka provinsi untuk ketiga pelatihan di atas sebesar 31,3 persen (Tabel 4.8.5.2.1.).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Program KB sebesar 64,1 persen. Persentase puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti Pelatihan Program KB terdapat di Kabupaten Rokan Hulu (78,9%), kemudian Kabupaten Siak (78,6%), dan Kabupaten Kep. Meranti (75,0%). Persentase terendah Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Program KB terdapat di Kabupaten Bengkalis (9,1%) kemudian Kabupaten Kuantan Senggigi (57,1%) dan Kabupaten Kampar (57,7%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Pemasangan Alat Kontrasepsi sebesar 70,3 persen. Persentase puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir (88,0%), kemudian Kabupaten Kampar (84,6%), dan Kabupaten Rokan Hulu (84,2%). Persentase terendah Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Pemasangan Alat Kontrasepsi terdapat di Kabupaten Bengkalis (18,2%) kemudian Kota Dumai (55,6%) dan Kabupaten Senggigi (57,1%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penanganan Komplikasi Kontrasepsi sebesar 32,8 persen. Persentase puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir (56,0%), kemudian Kabupaten Rokan Hulu (47,4%) dan Kabupaten Siak (42,9%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penanganan Komplikasi Kontrasepsi terdapat di Kota Dumai (0,0%), Kabupaten Bengkalis (9,1%), dan Kabupaten Kep. Meranti (12,5%).

Tabel 4.8.5.2.1.

Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Pelayanan KB Tahun 2009-2010 di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pelatihan Program KB	Pelatihan Pemasangan Alat Kontrasepsi	Pelatihan Penanganan Komplikasi Kontrasepsi	Pelatihan Lengkap
1	Kuantan Singingi	21	57.1	57.1	23.8	23.8
2	Indragiri Hulu	16	62.5	68.8	37.5	37.5
3	Indragiri Hilir	25	72.0	88.0	56.0	52.0
4	Pelalawan	12	66.7	58.3	16.7	16.7
5	Siak	14	78.6	78.6	42.9	42.9
6	Kampar	26	57.7	84.6	42.3	34.6
7	Rokan Hulu	19	78.9	84.2	47.4	47.4
8	Bengkalis	11	9.1	18.2	9.1	9.1
9	Rokan Hilir	15	66.7	60.0	26.7	26.7
10	Kepulauan Meranti	8	75.0	75.0	12.5	12.5
11	Kota Pekanbaru	19	68.4	73.7	26.3	26.3
12	Kota Dumai	9	66.7	55.6	0	0
Riau		195	64.1	70.3	32.8	31.3

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti ketiga pelatihan dalam Program Pelayanan KB sebesar 31,3 persen. Persentase puskesmas tertinggi yang

petugasnya mengikuti ketiga pelatihan dalam Program KB terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir (52,0%), kemudian Kabupaten Rokan Hulu (47,4%) dan Kabupaten Siak (42,9%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti secara lengkap ketiga pelatihan di atas adalah Kota Dumai (0,0%), kemudian Kabupaten Bengkalis (9,1%) dan Kabupaten Kep. Meranti (12,5%).

4.8.5.3. Pedoman Program Keluarga Berencana

Pedoman dalam Pelayanan Keluarga Berencana diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Dalam Pelayanan Keluarga Berencana, buku pedoman yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 meliputi Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi, Panduan Audit Medik Pelayanan KB, Panduan Baku Klinis KB, Pedoman Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Yankespro) Terpadu, Panduan Kontrasepsi Darurat, dan Panduan Penanggulangan Efek Samping/ Komplikasi Kontrasepsi. Angka provinsi untuk ketersediaan buku pedoman Pelayanan KB di Provinsi Riau tertinggi adalah ketersediaan Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi (50,8%), kemudian Panduan Baku Klinis KB (32,8%), Pedoman Yankespro Terpadu (24,6%), Panduan Penanggulangan Efek Samping/ Komplikasi Kontrasepsi (30,8%), Panduan Kontrasepsi Darurat (28,2%), dan Panduan Audit Medik Pelayanan KB (26,2%). Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki keseluruhan jenis pedoman seperti yang disebutkan di atas adalah sebesar 20,0 persen (Tabel 4.8.5.3.1.a-b).

Angka provinsi untuk ketersediaan buku Panduan Pelayanan Kontrasepsi sebesar 50,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Siak (85,7%), kemudian Kabupaten Kep. Meranti (73,3%), dan Kabupaten Kampar (61,5%). Persentase Puskesmas terendah yang memiliki buku Panduan Pelayanan Kontrasepsi terdapat di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, masing-masing (33,3%), kemudian Kabupaten Kuantan Singingi (38,1%).

Angka provinsi untuk ketersediaan buku Panduan Audit Medik Pelayanan KB sebesar 26,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Kampar (42,3%), kemudian Kabupaten Rokan Hulu (36,8%), dan Kabupaten Indragiri Hulu (31,3%). Persentase Puskesmas terendah yang memiliki buku Panduan Audit Medik Pelayanan KB terdapat di Kabupaten Bengkalis (9,1%), kemudian Kota Dumai (11,1%) dan Kabupaten Kep. Meranti (12,5%).

Angka provinsi untuk ketersediaan buku Panduan Baku Klinis KB sebesar 32,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Kampar (50,0%), kemudian Kabupaten Bengkalis (54,5%) dan Kabupaten Siak (35,7%). Persentase Puskesmas terendah yang memiliki buku Panduan Baku Klinis KB terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi (14,3%), kemudian Kota Dumai (22,2%) dan Kabupaten Rokan Hilir (26,7%).

Angka provinsi untuk ketersediaan buku Pedoman Yankespro Terpadu sebesar 24,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Kampar (42,3%), kemudian Kabupaten Kep. Meranti (37,5%) dan Kabupaten Pelalawan (33,3%). Persentase Puskesmas terendah yang memiliki buku Pedoman Yankespro Terpadu terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi (9,5%), kemudian Kota Dumai (11,1%) dan Kabupaten Rokan Hilir (13,3%).

Tabel 4.8.5.3.1.a.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Pelayanan KB di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Ketersediaan Buku Pedoman Program KB			
			Panduan Pelayanan Kontrasepsi	Panduan Audit Medik Pelayanan KB	Panduan Klinis KB	Pedoman Yankespro Terpadu
1	Kuantan Singingi	21	38.1	23.8	14.3	9.5
2	Indragiri Hulu	16	56.3	31.3	31.3	31.3
3	Indragiri Hilir	25	44.0	24.0	28.0	16.0
4	Pelalawan	12	58.3	25.0	33.3	33.3
5	Siak	14	85.7	21.4	35.7	28.6
6	Kampar	26	61.5	42.3	50.0	42.3
7	Rokan Hulu	19	47.4	36.8	36.8	31.6
8	Bengkalis	11	54.5	9.1	45.5	18.2
9	Rokan Hilir	15	33.3	26.7	26.7	13.3
10	Kepulauan Meranti	8	62.5	12.5	37.5	37.5
11	Kota Pekanbaru	19	42.1	21.1	31.6	21.1
12	Kota Dumai	9	33.3	11.1	22.2	11.1
	Riau	195	50.8	26.2	32.8	24.6

Tabel 4.8.5.3.1.b.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Pelayanan KB di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Ketersediaan Buku Pedoman Program KB		
			Panduan Kontrasepsi Darurat	Panduan Penanggulangan Efek Samping Kontrasepsi	Pedoman Lengkap
1	Kuantan Singingi	21	19.0	19.0	9.5
2	Indragiri Hulu	16	31.3	31.3	31.3
3	Indragiri Hilir	25	20.0	20.0	12.0
4	Pelalawan	12	25.0	41.7	16.7
5	Siak	14	50.0	35.7	21.4
6	Kampar	26	34.6	42.3	34.6
7	Rokan Hulu	19	31.6	31.6	31.6
8	Bengkalis	11	27.3	36.4	9.1
9	Rokan Hilir	15	20.0	26.7	13.3
10	Kepulauan Meranti	8	25.0	25.0	12.5
11	Kota Pekanbaru	19	31.6	36.8	21.1
12	Kota Dumai	9	22.2	22.2	11.1
	Riau	195	28.2	30.8	20.0

Angka provinsi untuk ketersediaan buku Panduan Kontrasepsi Darurat sebesar 28,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Siak (50,0%), kemudian Kabupaten Kampar (34,6%) dan Kabupaten Rokan Hulu serta Kota Pekanbaru yang masing-masing (31,6%). Persentase Puskesmas terendah yang memiliki buku Panduan Kontrasepsi

Darurat terdapat di Kabupaten Kuantan Senggigi (19,0%), kemudian Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Rokan Hilir yang masing-masing (20,0%).

Angka provinsi untuk ketersediaan buku Panduan Penanggulangan Efek Samping/ Komplikasi Kontrasepsi sebesar 30,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Kampar (42,3%), kemudian Kabupaten Pelalawan (41,7%), dan Kota Pekanbaru (36,8%). Persentase Puskesmas terendah yang memiliki buku Panduan Penanggulangan Efek Samping/ Komplikasi Kontrasepsi terdapat di Kabupaten Kuantan Senggigi (19,0%), kemudian Kabupaten Indragiri Hilir (20,0%) dan Kota Dumai (22,2%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki lengkap keenam buku pedoman/ panduan seperti tersebut di atas sebesar 20,0 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang memiliki buku pedoman/ panduan lengkap terdapat di Kabupaten Kampar (34,6%), kemudian Kabupaten Rokan Hulu (31,6%), dan Kabupaten Indragiri Hulu (31,3%). Persentase Puskesmas terendah yang memiliki lengkap keenam buku pedoman/ panduan terdapat di Kabupaten Bengkalis (9,1%), kemudian Kabupaten Kuantan Senggigi (9,5%) dan Kota Dumai (11,1%).

4.8.5.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Keluarga Berencana

Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan diperlukan dalam Pelayanan Keluarga Berencana untuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dapat berupa kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, umpan balik dalam bentuk tertulis, dan pertemuan monitoring dan evaluasi yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. Angka provinsi untuk bentuk Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan yang paling banyak diterima Puskesmas di Provinsi Riau dalam Pelayanan Keluarga Berencana adalah dalam bentuk pertemuan monev yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota (62,6%) kemudian kunjungan supervisi dan monitoring oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota (52,8%), dan umpan balik (51,3%). Angka provinsi untuk persentase Puskesmas yang lengkap menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk kunjungan monev, umpan balik dan pertemuan monev di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota adalah sebesar 37,4 persen (Tabel 4.8.5.4.1.).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk kunjungan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota ke Puskesmas untuk Pelayanan Keluarga Berencana adalah sebesar 52,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima kunjungan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Pelayanan Keluarga Berencana terdapat di Kabupaten Kampar (92,3%) kemudian Kota Pekanbaru (84,2%) dan Kabupaten Rokan Hilir (73,3%). Persentase Puskesmas terendah menerima kunjungan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Pelayanan Keluarga Berencana terdapat di Kabupaten Kuantan Senggigi (0,0%) kemudian Kabupaten Siak (21,4%) dan Kabupaten Kep. Meranti (25,0%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk umpan balik untuk Pelayanan Keluarga Berencana adalah sebesar 51,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima umpan balik Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Pelayanan Keluarga Berencana terdapat di Kabupaten Rokan Hilir (73,3%) kemudian Kabupaten Kampar (73,1%) dan Kabupaten Rokan Hulu (68,4%).

Laporan Provinsi Riau Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Persentase Puskesmas terendah menerima umpan balik Dinas Kesehatan untuk Pelayanan Keluarga Berencana terdapat di Kabupaten Kuantan Senggigi (0,0%) kemudian Kabupaten Bengkalis (36,4%) dan Kabupaten Kep. Meranti (37,5%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk pertemuan monev di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Pelayanan Keluarga Berencana adalah sebesar 62,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Pelayanan Keluarga Berencana di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota terdapat di Kabupaten Kota Dumai (100 %), kemudian Kota Pekanbaru (84,2%) dan Kabupaten Kampar (80,8%). Persentase Puskesmas terendah mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Pelayanan Keluarga Berencana di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota terdapat di Kabupaten Kep. Meranti (25,0%) kemudian Kabupaten Bengkalis (27,3%) dan Kabupaten Kuantan Senggigi (28,6%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima ketiga jenis Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap untuk Pelayanan Keluarga Berencana sebesar 37,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap untuk Pelayanan Keluarga Berencana dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota terdapat di Kabupaten Kampar (65,4%) kemudian Kabupaten Rokan Hilir (60,0%) dan Kota Dumai (55,6%). Persentase Puskesmas terendah menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap terdapat di Kabupaten Kuantan Senggigi dan Kabupaten Kep. Meranti, masing-masing (0,0%), dan Kabupaten Indragiri Hulu (12,5%).

Tabel 4.8.5.4.1.

Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dari Dinas Kesehatan Kab/Kota di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Pelayanan KB			
			Kunjungan Petugas Dinkes Kab/Kota	Umpan Balik Laporan	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi	Bimbingan Teknis Lengkap
1	Kuantan Singingi	21	0	0	28.6	0
2	Indragiri Hulu	16	37.5	43.8	68.8	12.5
3	Indragiri Hilir	25	52.0	48.0	56.0	40.0
4	Pelalawan	12	50.0	58.3	75.0	41.7
5	Siak	14	21.4	50.0	42.9	21.4
6	Kampar	26	92.3	73.1	80.8	65.4
7	Rokan Hulu	19	63.2	68.4	73.7	52.6
8	Bengkalis	11	36.4	36.4	27.3	18.2
9	Rokan Hilir	15	73.3	73.3	73.3	60.0
10	Kepulauan Meranti	8	25.0	37.5	25.0	0
11	Kota Pekanbaru	19	84.2	63.2	84.2	52.6
12	Kota Dumai	9	66.7	55.6	100	55.6
Riau		195	52.8	51.3	62.6	37.4

4.8.6. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

4.8.6.1. Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Kegiatan dalam pelaksanaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 meliputi Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif, Pemberian MP-ASI Anak Umur 6-24 bulan, Pemberian Kapsul Vit-A pada Balita, Pemberian Tablet Besi (90 tablet) pada Ibu Hamil, Pemberian PMT Pemulihan Balita pada Gakin dan Penimbangan Balita. Angka provinsi untuk keseluruhan jenis kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Riau, persentase tertinggi adalah pemberian kapsul vitamin A pada balita (98,5%) kemudian pemberian tablet besi dan penimbangan balita, masing-masing (97,9%), pemberian MP-ASI anak umur 6-24 bulan (91,8%), peningkatan pemberian ASI eksklusif (91,3%), dan pemberian PMP pemulihan balita pada gakin (83,6%). Angka provinsi untuk Puskesmas yang melaksanakan keenam kegiatan program perbaikan gizi masyarakat seperti tersebut di atas secara lengkap adalah sebesar 77,4 persen (Tabel 4.8.6.1.1.a-b).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan peningkatan pemberian ASI eksklusif adalah sebesar 91,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang melakukan kegiatan peningkatan pemberian ASI eksklusif terdapat di Kabupaten Kabupaten Indragiri Hilir, kabupaten pelalawan, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kep. Meranti, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai, masing-masing (100,0%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan peningkatan pemberian ASI eksklusif terdapat di Kabupaten Kuantan Senggigi (61,9%) kemudian Kabupaten Indragiri Hulu (68,8%) dan Kabupaten Siak (85,7%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan pemberian MP-ASI anak umur 6-24 bulan adalah sebesar 91,8 persen. Terdapat 5 kabupaten/ kota dari 12 kabupaten/ kota yang Puskesmasnya sudah 100 persen melakukan kegiatan pemberian MP-ASI anak umur 6-24 bulan, yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Sedangkan persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan pemberian MP-ASI anak umur 6-24 bulan terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu (68,8%) kemudian Kabupaten Kep. Meranti (75,0%) dan Kabupaten Kampar (84,6%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan pemberian kapsul Vit-A pada balita adalah sebesar 98,5 persen. Terdapat 10 kabupaten/ kota yang Puskesmasnya sudah 100 persen melakukan pemberian kapsul vitamin A pada balita. Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan pemberian kapsul Vit-A pada balita terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu (87,5%) dan Kabupaten Kuantan Senggigi (95,2%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan pemberian tablet besi (90 tablet) pada ibu hamil adalah sebesar 97,9 persen. Terdapat 9 kabupaten/ kota dari 12 kabupaten/ kota yang Puskesmasnya sudah 100 persen melakukan pemberian tablet besi pada ibu hamil. Sedangkan persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan pemberian tablet besi (90 tablet) pada ibu hamil terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu (87,5%), Kota Duamai (88,9%) dan Kabupaten Bengkalis (91,0%).

Tabel 4.8.6.1.1.a
 Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat			
			Pemberian ASI Eksklusif	Pemberian MP-ASI Anak Umur 6-24 Bulan	Pemberian Kapsul Vitamin A	Pemberian Tablet Besi
1	Kuantan Singingi	21	61.9	90.5	95.2	100.0
2	Indragiri Hulu	16	68.8	68.8	87.5	87.5
3	Indragiri Hilir	25	100	100	100.0	100
4	Pelalawan	12	100	91.7	100	100
5	Siak	14	85.7	100	100	100
6	Kampar	26	100	84.6	100	100
7	Rokan Hulu	19	94.7	94.7	100	100
8	Bengkalis	11	100	90.9	100	91
9	Rokan Hilir	15	93.3	100	100	100.0
10	Kepulauan Meranti	8	100	75.0	100	100
11	Kota Pekanbaru	19	100	100	100	100
12	Kota Dumai	9	100	100	100	88.9
	Riau	195	91.3	91.8	98.5	97.9

Tabel 4.8.6.1.1.b
 Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat		
			Pemberian PMT Pemulihan Balita Gizi Buruk Pada Gakin	Penimbangan Balita	Kegiatan Lengkap
1	Kuantan Singingi	21	57.1	100	42.9
2	Indragiri Hulu	16	68.8	87.5	56.3
3	Indragiri Hilir	25	96.0	100	96.0
4	Pelalawan	12	66.7	100	66.7
5	Siak	14	92.9	100	78.6
6	Kampar	26	80.8	96.2	73.1
7	Rokan Hulu	19	100	100	94.7
8	Bengkalis	11	100	100	90.9
9	Rokan Hilir	15	73.3	100	66.7
10	Kepulauan Meranti	8	75.0	100	75.0
11	Kota Pekanbaru	19	100	100	100
12	Kota Dumai	9	88.9	88.9	88.9
	Riau	195	83.6	97.9	77.4

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan pemberian PMT pemulihan balita pada Gakin adalah sebesar 83,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan pemberian PMT pemulihan balita pada Gakin terdapat di Kabupaten

Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis dan kota Pekanbaru, yang masing-masing (100%), Kabupaten Indragiri Hilir (96,0%), dan Kabupaten Siak (92,9%). Sedangkan persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan pemberian PMT pemulihan balita pada Gakin terdapat di Kabupaten Kuantan Senggigi (57,1%) kemudian Kabupaten Kabupaten Pelalawan (66,7%) dan Kabupaten Indragiri Hulu (68,8%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan penimbangan bayi adalah sebesar 97,9 persen. Terdapat 9 kabupaten/ kota dari 12 kabupaten/ kota yang Puskesmasnya sudah 100 persen melakukan penimbangan bayi, sedangkan kabupaten/ kota lainnya adalah; Kabupaten Indragiri Hulu (87,5%), Kota Dumai (88,9%) dan Kabupaten Kampar (96,2%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan keenam kegiatan program perbaikan gizi masyarakat secara lengkap adalah sebesar 77,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan lengkap dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat terdapat di Kota Pekanbaru (100,0%), kemudian Kabupaten Indragiri Hilir (96,0%) dan Kabupaten Rokan Hulu (94,7%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan lengkap dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat terdapat di Kabupaten Kuantan Senggigi (42,9%) kemudian Kabupaten Indragiri Hulu (56,3%) serta di Kabupaten pelalawan dan Kabupaten Rokan Hilir, masing-masing (66,7%).

4.8.6.2. Pelatihan Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Pelatihan dalam pelaksanaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat yang telah dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 meliputi Pelatihan Konseling ASI, Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan, Pelatihan Konseling MP-ASI, dan Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk yang diikuti oleh tenaga Puskesmas tahun 2009 dan 2010. Angka provinsi dari keseluruhan pelatihan Program Perbaikan Gizi Masyarakat tersebut di Provinsi Riau tertinggi adalah Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk (42,1%) diikuti oleh Pelatihan Pemantau Pertumbuhan (39,0%), Pelatihan Konseling ASI (32,8%) dan Pelatihan Konseling MP-ASI (26,7%). Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan secara lengkap keempat kegiatan program Perbaikan Gizi Masyarakat sebesar 17,4 persen (Tabel 4.8.6.2.1.).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan konseling ASI adalah sebesar 32,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan konseling ASI terdapat di Kabupaten Kep. Meranti (62,5%) kemudian Kabupaten Indragiri Hilir (52,0%) dan Kabupaten Pelalawan (41,7%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti pelatihan konseling ASI terdapat di Kota Dumai (11,1%) kemudian Kota Pekanbaru (15,8%) dan Kabupaten Kuantan Senggigi (19,0%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan pemantauan pertumbuhan adalah sebesar 39,0 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan pemantauan pertumbuhan terdapat di Kabupaten Rokan Hilir (66,7%) kemudian Kabupaten Bengkalis (54,5%) dan Kabupaten Indragiri Hilir (52,0%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti pelatihan pemantauan pertumbuhan terdapat di Kabupaten Kuantan Senggigi (23,8%) kemudian Kabupaten Siak (28,6%) dan Kabupaten Indragiri hulu (31,3%).

Laporan Provinsi Riau Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan konseling MP-ASI adalah sebesar 26,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan konseling MP-ASI terdapat di Kabupaten Rokan Hilir (60,0%) kemudian Kabupaten Indragiri Hilir (52,0%) dan Kabupaten Bengkalis (36,4%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti pelatihan konseling MP-ASI terdapat di Kabupaten Pelalawan (8,3%) kemudian Kota Pekanbaru (10,5%) dan Kabupaten Siak (14,3%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan tata laksana gizi buruk adalah sebesar 42,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan tata laksana gizi buruk terdapat di Kabupaten Rokan hilir (80,0%) kemudian Kabupaten Indragiri Hilir (60,0%) dan Kabupaten Bengkalis (54,5%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti pelatihan tata laksana gizi buruk terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu dan Kep.Meranti (masing-masing 25,0%) dan Kota Pekanbaru (26,3%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti kelima pelatihan dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat secara lengkap adalah sebesar 17,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan secara lengkap terdapat di Kabupaten Rokan Hilir (40,0%) kemudian Kabupaten Indragiri Hilir (32,0%) dan Kabupaten Bengkalis (27,3%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti pelatihan secara lengkap dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat terdapat di Kabupaten Pelalawan dan Kota Dumai (asing-masing 0,0%) kemudian Kabupaten Kota Pekanbaru (5,3%).

Tabel 4.8.6.2.1.

Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Tahun 2009-2010 di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pelatihan Konseling ASI	Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan	Pelatihan Konseling MP-ASI	Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk	Pelatihan Lengkap
1	Kuantan Singingi	21	19.0	23.8	19.0	38.1	9.5
2	Indragiri Hulu	16	25.0	31.3	31.3	25.0	18.8
3	Indragiri Hilir	25	52.0	52.0	52.0	60.0	32.0
4	Pelalawan	12	41.7	33.3	8.3	33.3	0
5	Siak	14	21.4	28.6	14.3	42.9	7.1
6	Kampar	26	38.5	34.6	19.2	26.9	19.2
7	Rokan Hulu	19	31.6	36.8	15.8	52.6	15.8
8	Bengkalis	11	36.4	54.5	36.4	54.5	27.3
9	Rokan Hilir	15	40.0	66.7	60.0	80.0	40.0
10	Kepulauan Meranti	8	62.5	37.5	25.0	25.0	25.0
11	Kota Pekan Baru	19	15.8	31.6	10.5	26.3	5.3
12	Kota Dumai	9	11.1	44.4	22.2	33.3	0
	Riau	195	32.8	39.0	26.7	42.1	17.4

4.8.6.3. Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat, buku Pedoman yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 meliputi, Buku Surveilans Gizi, Buku Pegangan Kader,

Buku Manajemen Pemberian Vitamin A, Buku Manajemen Pemberian Tablet Fe, Buku Pedoman ASI, Buku Pedoman Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI), Buku Pedoman Pemberian Garam Beriodium, Buku Standar Pemantauan Pertumbuhan, dan Buku Pengelolaan MP-ASI untuk anak usia 6-24 bulan. Angka provinsi untuk ketersediaan buku pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Riau, tertinggi adalah ketersediaan Buku Pegangan Kader (74,4%) diikuti oleh ketersediaan Buku Standar Pemantauan Pertumbuhan (72,3%), Buku Pedoman MP-ASI (55,4%), Buku Pedoman ASI (60,0%), Buku Manajemen Pemberian Vitamin A (54,9%), dan Buku Pedoman Pengelolaan MP-ASI untuk Anak Usia 6-24 Bulan (masing-masing 45,6%), Buku Surveilans Gizi (58,1%), Buku Pedoman Pemberian Garam Beriodium (50,3%), dan Buku Manajemen Pemberian Tablet Fe (36,9%). Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki keseluruhan jenis Pedoman seperti yang disebutkan di atas adalah sebesar 25,1 persen (Tabel 4.8.6.3.1.).

Tabel 4.8.6.3.1.a.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat						
No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pedoman Gizi	Buku Pegangan Kader	Buku Manajemen Pemberian Vitamin A	Panduan Pemberian Tablet Fe
1	Kuantan Singingi	21	33.3	61.9	28.6	28.6
2	Indragiri Hulu	16	75.0	87.5	87.5	68.8
3	Indragiri Hilir	25	40.0	76.0	72.0	32.0
4	Pelalawan	12	41.7	100	58.3	33.3
5	Siak	14	71.4	92.9	71.4	57.1
6	Kampar	26	50.0	80.8	42.3	38.5
7	Rokan Hulu	19	63.2	68.4	36.8	31.6
8	Bengkalis	11	45.5	72.7	54.5	36.4
9	Rokan Hilir	15	26.7	46.7	40.0	26.7
10	Kepulauan Meranti	8	37.5	37.5	37.5	37.5
11	Kota Pekanbaru	19	68.4	84.2	63.2	31.6
12	Kota Dumai	9	11.1	66.7	77.8	22.2
Riau		195	48.7	74.4	54.9	36.9

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku Surveilans Gizi adalah sebesar 48,7 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Buku Surveilans Gizi terdapat di Kabupaten Indragiri HULU (75,0%) kemudian Kabupaten Siak (71,4%) dan Kota Pekanbaru (68,4%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Buku Surveilans Gizi terdapat di Kota Dumai (11,1%) kemudian Kabupaten Rokan Hilir (26,7%) dan Kabupaten Kuantan Singingi (33,3%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku Pegangan Kader adalah sebesar 74,44 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Buku Pegangan Kader terdapat di Kabupaten Pelalawan (100%) kemudian Kabupaten Siak (92,9%) dan Kabupaten

Indragiri hUlu (87,5%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Buku Pegangan Kader terdapat di Kabupaten Kep. Meranti (37,5%) kemudian Kabupaten Rokan Hilir (46,7%) dan Kabupaten Kuantan Sengingi (61,9%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku Manajemen Pemberian Vit A adalah sebesar 54,9 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Buku Manajemen Pemberian Vit A terdapat di Kabupaten Indragiri HULU (87,5%) kemudian Kota Dumai (77,8%) dan Kabupaten Indragiri Hilir (72,0%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Buku Manajemen Pemberian Vit A terdapat di Kabupaten KUantan Sengingi (28,6%) kemudian Rokan HULU (36,8%) dan KabupatenKep. Meranti (37,5%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku Manajemen Pemberian Tablet Fe adalah sebesar 36,9 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Buku Manajemen Pemberian Tablet Fe terdapat di Kabupaten Indragiri HULU (68,8%) kemudian Kabupaten Siak (57,1%) dan Kabupaten Kampar (38,5%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Buku Manajemen Pemberian Tablet Fe terdapat di Kota Dumai (22,2%) kemudian Kabupaten Kuantan Sengingi (28,6%) dan Kabupaten Rokan HULU dan Kota Pekanbaru (31,6%).

Tabel 4.8.6.3.1.b.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat		
			Pedoman ASI	Pedoman MP-ASI	Pedoman Pemberian Garam Beryodium
1	Kuantan Singingi	21	38.1	28.6	33.3
2	Indragiri Hulu	16	81.3	81.3	75.0
3	Indragiri Hilir	25	52.0	48.0	48.0
4	Pelalawan	12	66.7	41.7	58.3
5	Siak	14	92.9	100	92.9
6	Kampar	26	57.7	46.2	38.5
7	Rokan Hulu	19	57.9	57.9	31.6
8	Bengkalis	11	54.5	54.5	54.5
9	Rokan Hilir	15	46.7	40.0	40.0
10	Kepulauan Meranti	8	50.0	37.5	37.5
11	Kota Pekan Baru	19	78.9	63.2	63.2
12	Kota Dumai	9	44.4	88.9	44.4
Riau		195	60.0	55.4	50.3

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman ASI adalah sebesar 60,0 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Buku Pedoman ASI terdapat di Kabupaten Siak (92,9%) kemudian Kabupaten Indragiri HULU (81,3%) dan Kota Pekanbaru (78,9%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Buku Pedoman ASI terdapat di Kabupaten Kuantan SEngingi (38,1%) kemudian Kota Dumai (44,4%) dan Kabupaten rokan Hilir (46,7%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman MP-ASI adalah sebesar 55,4 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Buku Pedoman MP-ASI terdapat di Kabupaten Siak (100%) kemudian Kota Dumai (88,9%) dan Kabupaten Indragiri hulu (81,3%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Buku Pedoman MP-ASI terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi (38,6%) kemudian Kabupaten Kep. Meranti (37,5%) dan Kabupaten Rokan Hilir (40,0%).

Angka provinsi untuk Puskesmas memiliki Buku Pedoman Pemberian Garam Beriodium adalah sebesar 50,3 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Buku Pedoman Pemberian Garam Beriodium terdapat di Kabupaten Siak (92,9%) kemudian kabupaten Indragiri HULU (75,0%) dan Kota Pekanbaru (63,2%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Buku Pedoman Pemberian Garam Beriodium terdapat di Kabupaten Rokan HULU (31,6%) kemudian Kabupaten Kuantan Singingi (33,3%) dan Kabupaten Kep. Meranti (37,5%).

Tabel 4.8.6.3.1.c.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat		
			Buku Pemantauan Pertumbuhan	Buku Pengelolaan MP-ASI	Pedoman Lengkap
1	Kuantan Singingi	21	66.7	23.8	19.0
2	Indragiri Hulu	16	87.5	75.0	56.3
3	Indragiri Hilir	25	80.0	40.0	4.0
4	Pelalawan	12	100	41.7	33.3
5	Siak	14	92.9	78.6	50.0
6	Kampar	26	69.2	34.6	23.1
7	Rokan Hulu	19	63.2	36.8	21.1
8	Bengkalis	11	63.6	54.5	27.3
9	Rokan Hilir	15	46.7	33.3	13.3
10	Kepulauan Meranti	8	37.5	37.5	37.5
11	Kota Pekanbaru	19	78.9	63.2	26.3
12	Kota Dumai	9	66.7	44.4	11.1
Riau		195	72.3	45.6	25.1

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku Standar Pemantauan Pertumbuhan adalah sebesar 72,3 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Buku Standar Pemantauan Pertumbuhan terdapat di Kabupaten Pelalawan (100%) kemudian Kabupaten Siak (92,9%) dan Kabupaten Indragiri Hulu (87,5%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Buku Standar Pemantauan Pertumbuhan terdapat di Kabupaten Kep. Meranti (37,5%) kemudian Kabupaten Rokan Hilir (46,7%) dan Kabupaten Rokan HULU (63,2%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku Pengelolaan MP-ASI adalah sebesar 45,6 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Buku Pengelolaan MP-ASI

terdapat di Kabupaten Siak (78,6%) kemudian Kabupaten Indragiri HULU (75,0%) dan Kota pekanbaru (63,2%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Buku Pengelolaan MP-ASI terdapat di Kabupaten Kuantan Sengingi (23,8%) kemudian Kabupaten Rokan Hilir (33,3%) dan Kabupaten Kampar (34,6%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki keseluruhan pedoman secara lengkap untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah sebesar 25,1 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat secara lengkap terdapat di Kabupaten Indragiri HULU (56,3%) kemudian Kabupaten Siak (50,0%) dan Kabupaten Kep. Meranti (37,5%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat secara lengkap terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir (4,0%) kemudian Kota Dumai (11,1%) dan Kabupaten Rokan Hilir (13,3%).

4.8.6.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan diperlukan dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan program. Pengawasan, evaluasi dan bimbingan dapat berupa kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, umpan balik dalam bentuk tertulis, dan pertemuan monitoring dan evaluasi yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. Angka provinsi untuk bentuk Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Riau adalah dalam bentuk kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota (73,8%) diikuti oleh pertemuan monev yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota (78,5%) dan umpan balik (68,2%). Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima secara lengkap keseluruhan bentuk pengawasan, evaluasi dan bimbingan dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah sebesar 64,8 persen (Tabel 4.8.6.4.1.).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima pengawasan, evaluasi dan bimbingan dalam bentuk kunjungan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota ke Puskesmas untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah sebesar 73,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima kunjungan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat terdapat di Kabupaten Kep.Meranti, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai (masing-masing 100,0%). Persentase Puskesmas terendah menerima kunjungan supervisi Dinas Kesehatan terdapat di Kabupaten Kuantan Sengingi (38,1%) kemudian Kabupaten Pelalawan (50,0%) dan Kabupaten Indragiri hULU (56,3%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima pengawasan, evaluasi dan bimbingan dalam bentuk umpan balik dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah sebesar 68,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima umpan balik dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat terdapat di Kota Dumai (100,0%) kemudian Kota Pekanbaru (94,7%) dan Kabupaten Rokan HULU (89,5%). Persentase Puskesmas terendah menerima umpan balik dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat terdapat di Kabupaten Kuantan Sengingi (23,8%) kemudian Kabupaten Kep.Meranti (37,5%) dan Kabupaten Indragiri Hulu (43,8%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima pengawasan, evaluasi dan bimbingan dalam bentuk mengikuti pertemuan monev di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah sebesar 78,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota terdapat di Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai (masing-masing 100,0%). Persentase Puskesmas terendah mengikuti pertemuan monev di Dinas Kesehatan terdapat di Kabupaten Kep Meranti (37,5%) kemudian Kabupaten Kuantan Singingi (28,1%) dan Kabupaten Pelalawan (41,7%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima secara lengkap keseluruhan bentuk pengawasan, evaluasi dan bimbingan untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah sebesar 55,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima pengawasan, evaluasi dan bimbingan secara lengkap untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota terdapat di Kota Dumai (100,0%) kemudian Kota Pekanbaru (94,7%) dan Kabupaten Rokan Hilir (73,3%). Persentase Puskesmas terendah menerima pengawasan, evaluasi dan bimbingan secara lengkap terdapat di Kabupaten Kep. Meranti (12,5%) kemudian Kabupaten Kuantan Singingi (19,0%) dan Kabupaten Indragiri hulu dan pelalawan (25,0%).

Tabel 4.8.6.4.1.

Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Perbaikan Gizi Masyarakat			
			Kunjungan Petugas Dinkes Kab/Kota	Umpan Balik Laporan	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi	Bimbingan Teknis Lengkap
1	Kuantan Singingi	21	38.1	23.8	38.1	19.0
2	Indragiri Hulu	16	56.3	43.8	81.3	25.0
3	Indragiri Hilir	25	80.0	76.0	92.0	68.0
4	Pelalawan	12	50.0	58.3	41.7	25.0
5	Siak	14	64.3	64.3	100	50.0
6	Kampar	26	80.8	76.9	80.8	65.4
7	Rokan Hulu	19	73.7	89.5	89.5	63.2
8	Bengkalis	11	81.8	54.5	63.6	45.5
9	Rokan Hilir	15	80.0	86.7	93.3	73.3
10	Kepulauan Meranti	8	100	37.5	37.5	12.5
11	Kota Pekan Baru	19	100	94.7	100	94.7
12	Kota Dumai	9	100	100	100	100.0
Riau		195	73.8	68.2	78.5	55.4

4.8.7. PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

4.8.7.1. Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular

Kegiatan dalam pelaksanaan Upaya Pengendalian Penyakit Menular yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 meliputi: Program TB paru, Program ISPA, Program Diare,

Laporan Provinsi Riau Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Program DBD, Program Malaria, Program Kusta, Program Schistosomiasis, Program HIV-AIDS, Program Filariasis, Surveilans Terpadu, dan Program Rabies.

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan Program TB Paru di Provinsi Riau adalah sebesar 98,5 persen. Terdapat 10 kabupaten/ kota dari 12 kabupaten/ kota yang semua Puskesmasnya 100,0 persen melakukan Program TB Paru. Persentase terendah Puskesmas yang melakukan kegiatan Program TB Paru terdapat di Kabupaten Rokan Hilir (86,7%) dan Kabupaten Indragiri hilir (96,0%).

Angka provinsi untuk Puskesmas melakukan kegiatan Program ISPA/Pneumonia adalah sebesar 93,3 persen. Terdapat 5 kabupaten/ kota dari 12 kabupaten/ kota yang semua Puskesmasnya 100,0 persen melakukan Program ISPA/Pneumonia. Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Program ISPA/Pneumonia terdapat di Kabupaten Rokan Hilir (66,7%) kemudian Kabupaten Kep. Meranti (87,5%) dan kota Dumai (88,9%).

Angka provinsi untuk Puskesmas melakukan kegiatan Program Diare adalah sebesar 95,4 persen. Terdapat 7 kabupaten/ kota dari 12 kabupaten/ kota yang semua Puskesmasnya 100,0 persen melakukan Program Diare. Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Program Diare terdapat di Kabupaten Rokan Hilir (73,3%) kemudian Kabupaten Pelalawan (83,3%) dan Kabupaten Kep. Meranti (87,5%).

Angka provinsi untuk Puskesmas melakukan kegiatan Program DBD adalah sebesar 94,4 persen. Terdapat 5 kabupaten/ kota dari 12 kabupaten kota yang semua Puskesmasnya 100,0 persen melakukan Program DBD, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kampar, Rokan Hulu, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Program DBD adalah Kabupaten Kep. Meranti (75,0%) kemudian Kabupaten Rokan Hili (86,7%) dan Kabupaten Indragiri hulu (87,5%) seperti terlihat dalam tabel 4.8.7.1.1.a.

Tabel 4.8.7.1.1.a.

Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular			
			Program TB Paru	Program ISPA/ Pneumonia	Program Diare	Program DBD
1	Kuantan Singingi	21	100	100	100	95.2
2	Indragiri Hulu	16	100	100	100	87.5
3	Indragiri Hilir	25	96.0	92.0	100	92.0
4	Pelalawan	12	100	91.7	83.3	100
5	Siak	14	100	92.9	100	92.9
6	Kampar	26	100	100	100	100
7	Rokan Hulu	19	100	89.5	89.5	100
8	Bengkalis	11	100	100	100	90.9
9	Rokan Hilir	15	86.7	66.7	73.3	86.7
10	Kepulauan Meranti	8	100	87.5	87.5	75.0
11	Kota Pekanbaru	19	100	100	100	100
12	Kota Dumai	9	100	88.9	100	100
	Riau	195	98.5	93.3	95.4	94.4

Laporan Provinsi Riau Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan Program Malaria adalah sebesar 95,4 persen. Terdapat 8 kabupaten/ kota dari 12 kabupaten/ kota yang keseluruhan Puskesmasnya 100,0 persen melakukan Program Malaria. Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Program Malaria terdapat di Kabupaten Kep.Meranti (62,5%) kemudian Kota Pekanbaru (78,9%) dan Kabupaten Siak(92,9%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan Program Kusta adalah sebesar 84,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Program Kusta terdapat di Kabupaten Pelalawan, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai (Masing-masing 100%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Program Kusta terdapat di Kabupaten Indragiri HULU (43,8%) kemudian Kabupaten Rokan Hilir (60,0%) dan Kabupaten Bengkalis (81,8%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan Program Schistosomiasis adalah sebesar 4,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Program Schistosomiasis terdapat di Kabupaten Siak (14,3%) kemudian Kabupaten Pelalawan (8,3%) dan Kabupaten Rokan Hilir (6,7%). Terdapat 4 kabupaten/ kota dari 12 kabupaten/ kota yang seluruh Puskesmasnya tidak melakukan kegiatan Program Schistosomiasis (0,0%) yaitu Kabupaten Kuantan Sengingi, Bengkalis, Kep. Meranti dan Kota Dumai .

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan Program HIV-AIDS adalah sebesar 46,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Program HIV-AIDS terdapat di Kabupaten Rokan Hulu (68,4%) kemudian Kabupaten Roan Hilir dan Kota Dumai (masing-masing 66,7%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Program HIV-AIDS terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu (12,5%) kemudian Kabupaten Kuantan SEngingi (33,3%) dan Kabupaten Kampar (34,6%). Tabel 4.8.7.1.1.b.

Tabel 4.8.7.1.1.b.

Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular			
			Program Malaria	Program Kusta	Program Schistosomiasis	Program HIV-AIDS
1	Kuantan Singingi	21	100	85.7	0	33.3
2	Indragiri Hulu	16	100	43.8	6.3	12.5
3	Indragiri Hilir	25	100	92.0	4.0	36.0
4	Pelalawan	12	100	100	8.3	58.3
5	Siak	14	92.9	92.9	14.3	64.3
6	Kampar	26	100	80.8	3.8	34.6
7	Rokan Hulu	19	100	89.5	5.3	68.4
8	Bengkalis	11	100	81.8	0	36.4
9	Rokan Hilir	15	93.3	60.0	6.7	66.7
10	Kepulauan Meranti	8	62.5	87.5	0	50.0
11	Kota Pekan Baru	19	78.9	100	5.3	57.9
12	Kota Dumai	9	100	100	0	66.7
Riau		195	95.4	84.1	4.6	46.7

Laporan Provinsi Riau Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan Program Filariasis adalah sebesar 65,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Program Filariasis terdapat di Kabupaten Pelalawan (91,7%) kemudian Kota Dumai (88,9%) dan Kabupaten Kuantan Singingi dan Siak (85,7%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Program Filariasis terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu (25,0%) kemudian Kabupaten Rokan Hilir (46,7%) dan Kabupaten kampar (50,0%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan Program Surveilans Terpadu adalah sebesar 86,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Program Surveilans Terpadu terdapat di Kep. Meranti (100,0%) kemudian Kabupaten Kuantan Singingi (95,2%) dan Kota Pekanbaru (94,7%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Program Surveilans Terpadu terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir (72,0%) kemudian KabupatenRokan hilir (73,3%) dan Kota Dumai (77,8%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan Program Rabies adalah sebesar 84,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Program Rabies terdapat di Kabupaten Kampar (96,2,0%) kemudian Kota Pekanbaru (94,7%) dan Kabupaten Siak (92,9%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Program Rabies terdapat di Kabupaten Rokan Hilir (60,0%) kemudian Kabupaten Indragiri Hilir (76,0%) dan Indragiri hulu (81,3%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan seluruh kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular secara lengkap adalah sebesar 3,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan seluruh kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular secara lengkap terdapat di Kabupaten siak (7,1%) kemudian Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Pekanbaru (5,3%). Terdapat 6 kabupaten/ kota dari 12 kabupaten/ kota yang seluruh Puskesmasnya tidak melakukan seluruh kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular secara lengkap (0,0%), seperti terlihat pada tabel 4.8.7.1.1.c.

Tabel 4.8.7.1.1.c.
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular			
			Program Filariasis	Surveilans Terpadu	Program Rabies	Kegiatan Lengkap
1	Kuantan Singingi	21	85.7	95.2	90.5	0
2	Indragiri Hulu	16	25.0	87.5	81.3	0
3	Indragiri Hilir	25	60.0	72.0	76.0	4.0
4	Pelalawan	12	91.7	83.3	83.3	0
5	Siak	14	85.7	92.9	92.9	7.1
6	Kampar	26	50.0	88.5	96.2	3.8
7	Rokan Hulu	19	68.4	89.5	89.5	5.3
8	Bengkalis	11	72.7	81.8	90.9	0
9	Rokan Hilir	15	46.7	73.3	60.0	6.7
10	Kepulauan Meranti	8	75.0	100	87.5	0
11	Kota Pekanbaru	19	63.2	94.7	94.7	5.3
12	Kota Dumai	9	88.9	77.8	88.9	0
Riau		195	65.1	86.2	86.2	3.1

4.8.7.2. Pelatihan Program Pengendalian Penyakit Menular

Jenis Pelatihan dalam pelaksanaan Upaya Pengendalian Penyakit Menular yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 ini meliputi Pelatihan TB Paru, ISPA/Pneumonia, Diare, DBD, Malaria, Kusta, Schistosomiasis, Pencegahan HIV-AIDS, Pengenalan HIV-AIDS (konseling dan VCT) di RS dan Puskesmas, Filariasis, Rabies dan Tim Gerak Cepat yang diikuti oleh tenaga puskesmas pada tahun 2009 dan 2010. Angka provinsi untuk keseluruhan pelatihan Upaya Pengendalian Penyakit Menular dengan persentase tertinggi yang diikuti oleh petugas puskesmas di Provinsi Riau adalah pelatihan TB Paru (68,7%), kemudian pelatihan ISPA (433,8%) dan pelatihan Diare (31,3%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit TB Paru adalah sebesar 68,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit TB Paru terdapat di Kabupaten Pelalawan (91,7%) kemudian Kabupaten Rokan Hilir (86,7%) dan Kabupaten Bengkalis (81,8%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit TB Paru terdapat di Kabupaten Kep. Meranti (37,5%) kemudian Kabupaten Kuantan Singingi dan Siak (masing-masing 57,1%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit ISPA/Pneumonia adalah sebesar 33,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit ISPA/Pneumonia terdapat di Kabupaten Siak (71,4%) kemudian Kabupaten Kampar (53,8%) dan Kabupaten Indragiri HULU (50,0%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit ISPA/Pneumonia terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi (4,8%) kemudian kota Dumai (11,1%) dan Kabupaten Bengkalis (18,2%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Diare adalah sebesar 31,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Diare terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu (56,3%) kemudian Kabupaten Siak (42,9%) dan Kabupaten Kampar (42,3%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Diare terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi (9,5%) kemudian Kabupaten Kep Meranti (12,5%) dan Kabuapten Bengkalis (18,2%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit DBD adalah sebesar 28,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit DBD terdapat di Indragiri HULU (43,8%) kemudian Kabupaten Siak (42,9%) dan Kabupaten Kampar (42,3%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit DBD terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi (0,0%) kemudian Kabupaten Bengkali (9,1%) dan Kota Dumai (11,1%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Malaria adalah sebesar 39,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Malaria terdapat di Kabupaten Pelalawan (75,0%) kemudian Kabupaten Rokan Hilir (73,3%) dan Kabupaten Indragiri hilir (64,0%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti Pelatihan

Laporan Provinsi Riau Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Penatalaksanaan Penyakit Malaria terdapat di Kabupaten Bengkalis (9,1%) kemudian Kota Pekanbaru (10,5%) dan Kabupaten Kep.Meranti (12,5%). Tabel 4.8.7.2.1.a.

Tabel 4.8.7.2.1.a.

Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Pengendalian Penyakit Menular Tahun 2009-2010 di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pelatihan TB Paru	Pelatihan ISPA/ Pneumonia	Pelatihan Diare	Pelatihan DBD	Pelatihan Malaria
1	Kuantan Singingi	21	57.1	4.8	9.5	0	19.0
2	Indragiri Hulu	16	75.0	50.0	56.3	43.8	62.5
3	Indragiri Hilir	25	76.0	36.0	36.0	40.0	64.0
4	Pelalawan	12	91.7	41.7	33.3	16.7	75.0
5	Siak	14	57.1	71.4	42.9	42.9	42.9
6	Kampar	26	73.1	53.8	42.3	42.3	38.5
7	Rokan Hulu	19	57.9	21.1	21.1	42.1	26.3
8	Bengkalis	11	81.8	18.2	18.2	9.1	9.1
9	Rokan Hilir	15	86.7	33.3	40.0	20.0	73.3
10	Kepulauan Meranti	8	37.5	25.0	12.5	12.5	12.5
11	Kota Pekanbaru	19	57.9	26.3	21.1	31.6	10.5
12	Kota Dumai	9	66.7	11.1	33.3	11.1	22.2
	Riau	195	68.7	33.8	31.3	28.7	39.5

Tabel 4.8.7.2.1.b.

Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Pengendalian Penyakit Menular Tahun 2009-2010 di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pelatihan Kusta	Pelatihan Schistosomiasis	Pelatihan Pencegahan HIV-AIDS	Pelatihan Pengenalan HIV-AIDS
1	Kuantan Singingi	21	0	0	0	0
2	Indragiri Hulu	16	0	0	0	0
3	Indragiri Hilir	25	56.0	0	24.0	20.0
4	Pelalawan	12	58.3	8.3	33.3	33.3
5	Siak	14	21.4	0	7.1	14.3
6	Kampar	26	30.8	0	23.1	11.5
7	Rokan Hulu	19	42.1	0	21.1	15.8
8	Bengkalis	11	0	0	27.3	18.2
9	Rokan Hilir	15	40.0	0	20.0	6.7
10	Kepulauan Meranti	8	12.5	0	12.5	0
11	Kota Pekanbaru	19	21.1	0	47.4	31.6
12	Kota Dumai	9	11.1	0	11.1	11.1
	Riau	195	26.7	0.5	19.5	13.8

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Kusta adalah sebesar 26,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Kusta terdapat di Kabupaten Pelalawan (58,3%) kemudian Kabupaten Indragiri Hilir (56,0%) dan kabupaten Rokan Hulu

(42,1%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Kusta terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu dan Bengkalis (Masing-masing 0,0%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Schistosomiasis adalah sebesar 0,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Schistosomiasis terdapat di Kabupaten Pelalawan (8,3%). Terdapat 11 kabupaten/ kota dari 12 kabupaten/ kota yang keseluruhannya tidak mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Schistosomiasis (0,0%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Pencegahan HIV-AIDS adalah sebesar 19,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang mengikuti Pelatihan Pencegahan HIV-AIDS terdapat di Kota Pekanbaru (47,4%) kemudian Kabupaten Pelalawan (33,3%) dan Kabupaten bengkalis (27,3%). Terdapat 2 kabupaten/ kota dari 12 kabupaten/ kota yang keseluruhan petugas Puskesmasnya tidak mengikuti Pelatihan Pencegahan HIV-AIDS (0,0%) yaitu Kabupaten Kuantan Singingi dan Indragiri HULU. Tabel 4.8.7.2.1.b.

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Pengenalan HIV-AIDS adalah sebesar 13,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti Pelatihan Pengenalan HIV-AIDS terdapat di kabupaten Pelalawan (33,3%) kemudian Kota Pekanbaru (31,6%) dan Kota Indragiri hilir (20,0%). Terdapat 3 kabupaten/ kota dari 12 kabupaten/ kota yang keseluruhan petugas Puskesmasnya tidak mengikuti Pelatihan Pencegahan HIV-AIDS (0,0%) yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri HULU, dan Kep.Meranti.

Tabel 4.8.7.2.1.c.

Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Pengendalian Penyakit Menular Tahun 2009-2010 di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pelatihan Filariasis	Pelatihan Rabies	Pelatihan Tim Gerak Cepat	Pelatihan Lengkap
1	Kuantan Singingi	21	4.8	4.8	0	100
2	Indragiri Hulu	16	0	6.3	0	100
3	Indragiri Hilir	25	20.0	28.0	12.0	100
4	Pelalawan	12	33.3	16.7	0	100
5	Siak	14	42.9	28.6	14.3	100
6	Kampar	26	15.4	34.6	3.8	100
7	Rokan Hulu	19	10.5	21.1	26.3	100
8	Bengkalis	11	0	0	0	100
9	Rokan Hilir	15	26.7	26.7	13.3	100
10	Kepulauan Meranti	8	12.5	12.5	0	100
11	Kota Pekanbaru	19	0	15.8	5.3	100
12	Kota Dumai	9	0	11.1	0	100
Riau		195	13.8	19.0	7.2	100

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Filariasis adalah sebesar 1,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang

mengikuti Pelatihan Filariasis terdapat di Kabupaten Siak (42,9%) kemudian Kabupaten Pelalawan (33,3%) dan Kabupaten Rokan Hilir (26,7%). Terdapat 4 kabupaten/ kota dari 12 kabupaten/ kota yang keseluruhan petugas Puskesmasnya tidak mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Filariasis yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Bengkalis, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Rabies adalah sebesar 19,0 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Rabies terdapat di Kabupaten Kampar (34,6%) kemudian Kabupaten Siak (28,6%) dan Kabupaten Indragiri Hilir (28,0%). Terdapat 1 kabupaten/ kota dari 12 kabupaten/ kota yang keseluruhan petugas Puskesmasnya tidak mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Rabies (0,0%) yaitu Kabupaten Bengkalis, kemudian Kabupaten Kuantan Singingi (4,8%) dan Kabupaten Indragiri Hulu (6,3%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Tim Gerak Cepat adalah sebesar 7,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti Pelatihan Tim Gerak Cepat terdapat di Kabupaten Rokan Hulu (26,3%) kemudian Kabupaten Siak (14,3%) dan Kabupaten Rokan Hilir (13,3%). Terdapat 6 kabupaten/ kota dari 12 kabupaten/ kota yang keseluruhan petugas Puskesmasnya tidak mengikuti Pelatihan Tim Gerak Cepat (0,0%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Lengkap adalah sebesar 100 persen. Tabel 4.8.7.2.1.c.

4.8.7.3. Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular

Pedoman pelaksanaan Upaya Pengendalian Penyakit Menular yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 meliputi: Penanggulangan TB Paru, Penanggulangan ISPA, Penanggulangan Diare, Penanggulangan DBD, Penanggulangan Malaria, Penanggulangan Kusta, Penanggulangan Schistosomiasis, Pencegahan HIV-AIDS, Penanggulangan Filariasis, pedoman KLB dan Pedoman Surveilans Integrasi Avian Influenza.

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Pedoman Penanggulangan TB Paru adalah sebesar 79,0 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Pedoman Penanggulangan TB Paru terdapat di Kabupaten Bengkalis (100%) kemudian Kabupaten Pelalawan (91,7%) dan Kota Dumai (88,9%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Pedoman Penanggulangan TB Paru terdapat di Kabupaten Kep. Meranti dan Indragiri Hulu (62,5%) kemudian Kabupaten Kabupaten Kuantan Singingi (71,4%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan ISPA adalah sebesar 48,2 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan ISPA terdapat di Kabupaten Bengkalis (72,7%) kemudian Kabupaten Siak (71,4%) dan Kota Pekanbaru (57,9%). Persentase terendah puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan ISPA terdapat di Kota Dumai (33,3%) kemudian Kabupaten Indragiri Hilir (36,0%) dan Kabupaten Kep. Meranti (37,5%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Diare adalah sebesar 50,3 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Diare terdapat di Kabupaten Bengkalis (90,9%) kemudian Kabupaten Siak

(71,4%) dan Kota Pekanbaru (57,9%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Diare terdapat di Kabupaten Rokan Hulu (31,6%) kemudian Kabupaten Pelalawan (33,3%) dan Kabupaten Indragiri HULU (37,5%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan DBD adalah sebesar 53,8 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan DBD terdapat di kabupaten Bengkalis (100%) kemudian Kabupaten Siak (85,7%) dan Kota Dumai (66,7%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan DBD terdapat di Kabupaten Kep.Meranti (37,5%) kemudian Kabupaten Kuantan Singingi (38,1%) dan Kabupaten Pelalawan (41,7%).

Tabel 4.8.7.3.1.a.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

Ketersediaan Buku Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular						
No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pedoman Penanggulangan TB Paru	Pedoman Penanggulangan ISPA	Pedoman Penanggulangan Diare	Pedoman Penanggulangan DBD
1	Kuantan Singingi	21	71.4	38.1	47.6	38.1
2	Indragiri Hulu	16	62.5	50.0	37.5	43.8
3	Indragiri Hilir	25	72.0	36.0	52.0	44.0
4	Pelalawan	12	91.7	41.7	33.3	41.7
5	Siak	14	85.7	71.4	71.4	85.7
6	Kampar	26	76.9	53.8	46.2	53.8
7	Rokan Hulu	19	84.2	36.8	31.6	52.6
8	Bengkalis	11	100	72.7	90.9	100
9	Rokan Hilir	15	80.0	53.3	46.7	53.3
10	Kepulauan Meranti	8	62.5	37.5	50.0	37.5
11	Kota Pekanbaru	19	84.2	57.9	57.9	52.6
12	Kota Dumai	9	88.9	33.3	55.6	66.7
	Riau	195	79.0	48.2	50.3	53.8

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Malaria adalah sebesar 59,0 persen. Persentase tertinggi Puskesmas dengan ketersediaan Buku Pedoman Penanggulangan Malaria terdapat di Kabupaten bengkalis (100%) kemudian Kota Dumai (88,9%) dan Kabupaten rokan Hilir (73,3%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Malaria terdapat di Kabupaten Kep. Meranti (25.0%) kemudian Kota pekanbaru (36,8%) dan Kabupaten Indragiri HULU (43,8%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Kusta adalah sebesar 47,7 persen. Persentase tertinggi Puskesmas dengan ketersediaan Buku Pedoman Penanggulangan Kusta terdapat di Kabupaten Bengkalis (90,9%) kemudian Kabupaten Siak (85,7%) dan Kabupaten Pelalawan (58,3%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Kusta terdapat di Kabupaten Indragir HULU dan Kep Merani (masing-masing 25,0%) kemudian Kabupaten Kuantan Singingi (33,3%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Schistosomiasis adalah sebesar 23,6 persen. Persentase tertinggi Puskesmas dengan ketersediaan Buku Pedoman Penanggulangan Schistosomiasis terdapat di Kabupaten Bengkalis (63,6%) kemudian Kabupaten Siak (42,9%) dan Kabupaten Rokan Hilir (26,7%). Terdapat 1 kabupaten/ kota dari 12 kabupaten/ kota yang keseluruhan Puskesmasnya tidak memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Schistosomiasis, yaitu Kota Dumai (0,0%), kemudian Kabupaten Kuantan sengingi (9,5%) dan Kep.Meranti (12,5%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan HIV-AIDS adalah sebesar 40,5 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan HIV-AIDS terdapat di Kabupaten Bengkalis (72,7%) kemudian Kota Pekanbaru (52,6%) dan Kabupaten Siak (50,0%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan HIV-AIDS terdapat di Kota Dumai (11,1%) kemudian Kabupaten Kep. Meranti (25,0%) dan Kabupaten Indragiri HULU (31,3%).

Tabel 4.8.7.3.1.b.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Ketersediaan Buku Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular			
			Pedoman Penanggulangan Malaria	Pedoman Penanggulangan Kusta	Pedoman Penanggulangan Schistosomiasis	Pedoman Penanggulangan HIV-AIDS
1	Kuantan Singingi	21	66.7	33.3	9.5	42.9
2	Indragiri Hulu	16	43.8	25.0	25.0	31.3
3	Indragiri Hilir	25	60.0	52.0	16.0	36.0
4	Pelalawan	12	58.3	58.3	25.0	41.7
5	Siak	14	71.4	85.7	42.9	50.0
6	Kampar	26	46.2	34.6	19.2	42.3
7	Rokan Hulu	19	57.9	47.4	26.3	36.8
8	Bengkalis	11	100	90.9	63.6	72.7
9	Rokan Hilir	15	73.3	53.3	26.7	33.3
10	Kepulauan Meranti	8	25.0	25.0	12.5	25.0
11	Kota Pekanbaru	19	36.8	42.1	26.3	52.6
12	Kota Dumai	9	88.9	44.4	0.0	11.1
Riau		195	59.0	47.7	23.6	40.5

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Pedoman Penanggulangan Filariasis adalah sebesar 39,0 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Filariasis terdapat di Kabupaten Siak (78,6%) kemudian Kabupaten Kuantan Sengingi (76,2%) dan Kabupaten Bengkalis (63,6%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Filariasis terdapat di Kabupaten Kep. Meranti (12,5%) kemudian Kabupaten Rokan Hulu (15,8%) dan Kota Dumai (22,2%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan KLB adalah sebesar 37,9 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan KLB terdapat di Kabupaten Siak (78,6%) kemudian Kabupaten Bengkalis (&2,7%) dan Kabupaten Indragiri Hilir (44,0%). Persentase terendah Puskesmas yang

memiliki Buku Pedoman Penanggulangan KLB terdapat di Kota Dumai (11,1%) kemudian Kabupaten Kep. Meranti (12,5%) dan Kabupaten Pelalawan (25,0%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Rabies adalah sebesar 40,5 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Rabies terdapat di Kabupaten Bengkalis (90,9%) kemudian Kabupaten Siak (85,7%) dan Kota Dumai (66,7%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Rabies terdapat di Kabupaten Rokan HULU (21,1%) kemudian Kabupaten Indragiri HULU dan pelalawan (masing-masing 25,0 %).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Surveilans Integrasi Avian Influenza adalah sebesar 45,6 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Surveilans Integrasi Avian Influenza terdapat di Kabupaten Bengkalis (100%) kemudian kabupaten Siak (78,6%) dan Kabupaten Rokan hulu (63,2%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Buku Pedoman Surveilans Integrasi Avian Influenza terdapat di Kota Dumai (22,2%) kemudian Kabupaten Indragiri Hilir (24,0%) dan Kabupaten Indragiri HULU (25,0%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki secara lengkap seluruh buku pedoman dalam Program Pengendalian Penyakit Menular adalah sebesar 18,5%. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki secara lengkap seluruh buku pedoman terdapat di Kabupaten Bengkalis (45,5%) diikuti oleh Kabupaten Siak (42,9%) dan Kabupaten Rokan Hilir (26,7%). Persentase terendah buku pedoman dalam Program Pengendalian Penyakit Menular adalah Kota Dumai (0%) Kemudian Rokan hULU (5,3%) dan Kabupaten Indragiri Hilir (8,0%).

Tabel 4.8.7.3.1.c.

Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Puskesmas	Ketersediaan Buku Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular				
			Pedoman Penanggulangan Filariasis	Pedoman Penanggulangan KLB	Pedoman Penanggulangan Rabies	Pedoman Penanggulangan Avian Influenza	Pedoman Lengkap
1	Kuantan Singingi	21	76.2	28.6	38.1	42.9	9.5
2	Indragiri Hulu	16	25.0	37.5	25.0	25.0	25.0
3	Indragiri Hilir	25	24.0	44.0	28.0	24.0	8.0
4	Pelalawan	12	58.3	25.0	25.0	41.7	8.3
5	Siak	14	78.6	78.6	85.7	78.6	42.9
6	Kampar	26	30.8	34.6	42.3	38.5	19.2
7	Rokan Hulu	19	15.8	31.6	21.1	63.2	5.3
8	Bengkalis	11	63.6	72.7	90.9	100	45.5
9	Rokan Hilir Kepulauan	15	33.3	33.3	33.3	53.3	26.7
10	Meranti	8	12.5	12.5	37.5	37.5	12.5
11	Kota Pekanbaru Baru	19	31.6	36.8	31.6	42.1	26.3
12	Kota Dumai	9	22.2	11.1	66.7	22.2	0
Riau		195	39.0	37.9	40.5	45.6	18.5

4.8.7.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Pengendalian Penyakit Menular

Pengawasan, evaluasi dan bimbingan diperlukan dalam Upaya Pengendalian Penyakit Menular untuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan program. Pengawasan, evaluasi dan bimbingan dapat berupa kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan, umpan balik dalam bentuk tertulis, dan pertemuan monitoring dan evaluasi yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.

Angka provinsi untuk bentuk pengawasan, evaluasi dan bimbingan yang paling banyak diterima Puskesmas dalam Upaya Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Riau adalah dalam bentuk kunjungan supervisi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota ke Puskesmas (82,6%) dan diikuti oleh pertemuan monitoring dan evaluasi di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota (81,5%) dan kemudian umpan balik (77,9%). Angka provinsi untuk persentase Puskesmas yang secara lengkap menerima pengawasan, evaluasi dan bimbingan dalam bentuk kunjungan monev, umpan balik dan pertemuan monev di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota adalah sebesar 64,1 persen.

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima pengawasan, evaluasi dan bimbingan dalam bentuk kunjungan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota ke Puskesmas untuk Upaya Pengendalian Penyakit Menular adalah sebesar 82,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima kunjungan supervisi Dinas Kesehatan untuk Upaya Pengendalian Penyakit Menular terdapat di Kep. Meranti dan Kota Dumai (100%) dan Kabupaten Rokan Hilir (93,3%), sedangkan persentase Puskesmas terendah menerima kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan untuk Upaya Pengendalian Penyakit Menular terdapat di Kabupaten Indragiri HULU (56,3%) kemudian Kabupaten Kuantan Singingi (66,7%) dan Kota Pekanbaru (78,9%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima pengawasan, evaluasi dan bimbingan dalam bentuk umpan balik untuk Upaya Pengendalian Penyakit Menular adalah sebesar 77,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima umpan balik dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Upaya Pengendalian Penyakit Menular terdapat di Kabupaten Rokan Hulu (94,7%) kemudian Kabupaten Bengkalis (90,9%) dan Kota Dumai (88,9%). Persentase Puskesmas terendah menerima umpan balik dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Upaya Pengendalian Penyakit Menular terdapat di Kabupaten Kep. Meranti (50,0%) kemudian Kabupaten Indragiri HULU (62,5%) dan Kabupaten Siak (64,3%).

Angka provinsi untuk Puskesmas menerima pengawasan, evaluasi dan bimbingan dalam bentuk mengikuti pertemuan monev di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Upaya Pengendalian Penyakit Menular adalah sebesar 81,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Upaya Pengendalian Penyakit Menular di Dinas Kesehatan kabupaten/ Kota terdapat di Kabupaten Kampar (92,3%) kemudian Kabupaten Pelalawan (91,7%) dan Kabupaten Rokan HULU (89,5%). Persentase Puskesmas terendah mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Upaya Pengendalian Penyakit Menular di Dinas Kesehatan terdapat di Kabupaten Kep. Meranti (37,5%) kemudian Kabupaten Bengkalis (63,6%) dan Kabupaten Kuantan Singingi (76,2%).

Angka provinsi untuk Puskesmas menerima secara lengkap keseluruhan bentuk pengawasan, evaluasi dan bimbingan secara lengkap untuk Upaya Pengendalian Penyakit Menular adalah sebesar 64,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima secara lengkap keseluruhan bentuk pengawasan, evaluasi dan bimbingan untuk Upaya Pengendalian Penyakit Menular dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota terdapat di Kota Dumai (88,9%) kemudian Kabupaten Kampar (76,9%) dan Kabupaten Pelalawan (75,0%). Persentase Puskesmas terendah menerima secara lengkap keseluruhan bentuk pengawasan, evaluasi dan bimbingan terdapat di Kabupaten Kep. Meranti (37,5%) kemudian Kota Pekanbaru (47,4%) dan Kabupaten Indragiri Hulu (50,0%).

Tabel 4.8.7.4.1.

Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Pengendalian Penyakit Menular			
			Kunjungan Petugas Dinkes Kab/Kota	Umpan Balik Laporan	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi	Bimbingan Teknis Lengkap
1	Kuantan Singingi	21	66.7	81.0	76.2	57.1
2	Indragiri Hulu	16	56.3	62.5	87.5	50.0
3	Indragiri Hilir	25	80.0	76.0	80.0	60.0
4	Pelalawan	12	83.3	75.0	91.7	75.0
5	Siak	14	92.9	64.3	78.6	64.3
6	Kampar	26	92.3	84.6	92.3	76.9
7	Rokan Hulu	19	84.2	94.7	89.5	73.7
8	Bengkalis	11	81.8	90.9	63.6	63.6
9	Rokan Hilir	15	93.3	86.7	80.0	73.3
10	Kepulauan Meranti	8	100	50.0	37.5	37.5
11	Kota Pekanbaru	19	78.9	68.4	84.2	47.4
12	Kota Dumai	9	100	88.9	88.9	88.9
Riau		195	82.6	77.9	81.5	64.1

4.8.8. PROGRAM IMUNISASI

4.8.8.1. Program Imunisasi di Puskesmas

Pada Rifaskes 2011 Pelayanan Imunisasi yang dikumpulkan meliputi Pelayanan Imunisasi Dalam Gedung Puskesmas dan Pelayanan Imunisasi di Luar Gedung Puskesmas. Angka provinsi untuk Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung Puskesmas di Provinsi Riau tertinggi adalah dengan frekuensi setiap hari (47,2%), kemudian frekuensi seminggu sekali (39,0%), dua hari dalam seminggu (0 %), dan tiga hari dalam seminggu (2,6%). Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung Puskesmas dengan frekuensi setiap hari terdapat di Kabupaten Indragiri hilir (68,0%) kemudian Kota Dumai (66,7%) dan Kabupaten Kampar (65,4%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung Puskesmas dengan frekuensi setiap hari terdapat di Kota Pekanbaru (5,3%) kemudian Kabupaten Pelalawan (8,3%) dan Kabupaten Kep. Meranti (12,5%).

Laporan Provinsi Riau Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dengan frekuensi 3 hari dalam seminggu adalah sebesar 2,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung puskesmas dengan frekuensi 3 hari dalam satu minggu terdapat di Kota Dumai (11,1%) kemudian Kabupaten Indragiri HULU (6,3%) dan Kabupaten RokanHulu dan KOTA Pekanbaru (5,3%). Terdapat 7 kabupaten/ kota dari 12 kabupaten/ kota yang seluruh Puskesmasnya tidak melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung Puskesmas dengan frekuensi 3 hari dalam seminggu (0,0%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung dengan frekuensi 2 hari dalam seminggu adalah sebesar 0 persen.

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung dengan frekuensi seminggu sekali adalah sebesar 39,0 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung Puskesmas dengan frekuensi seminggu sekali terdapat di Kota Pekanbaru (89,5%) kemudian Kabupaten Kep.Meranti (75,0%) serta Kabupaten Pelalawan (66,7%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung dengan frekuensi seminggu sekali terdapat di Kota Dumai (11,1%) kemudian Kabupaten Rokan Hilir dan Indragiri Hilir (20.0%)

Angka provinsi untuk Puskesmas yang melakukan kegiatan pelayanan imunisasi di luar gedung adalah sebesar 97,9 persen. Terdapat 10 kabupaten/ kota dari 12 kabupaten/ kota di Provinsi Riau yang keseluruhan Puskesmasnya (100,0%) melakukan kegiatan pelayanan imunisasi di luar gedung Puskesmas. Persentase terendah Puskesmas yang melakukan kegiatan pelayanan imunisasi di luar gedung Puskesmas terdapat di Kabupaten Rokan Hilir (86,7%) dan Kabupaten Kuantan Singingi (90,5%).

Tabel 4.8.8.1.1.

Persentase Puskesmas menurut Frekuensi Pelayanan Imunisasi di Dalam dan Luar Gedung di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Frekuensi Pelayanan Imunisasi Dalam Gedung Puskesmas				Kegiatan Pelayanan Imunisasi di Luar Gedung Puskesmas
			% Setiap Hari	% Tiga Hari/Minggu	% Dua Hari/Minggu	% Seminggu Sekali	
1	Kuantan Singingi	21	61.9	0	0	28.6	90.5
2	Indragiri Hulu	16	43.8	6.3	0	31.3	100
3	Indragiri Hilir	25	68.0	0	0	20.0	100
4	Pelalawan	12	8.3	0	0	66.7	100
5	Siak	14	64.3	0	0	28.6	100
6	Kampar	26	65.4	3.8	0	26.9	100
7	Rokan Hulu	19	31.6	5.3	0	57.9	100
8	Bengkalis	11	54.5	0	0	27.3	100
9	Rokan Hilir	15	53.3	0	0	20.0	86.7
10	Kepulauan Meranti	8	12.5	0	0	75.0	100
11	Kota Pekan Baru	19	5.3	5.3	0	89.5	100
12	Kota Dumai	9	66.7	11.1	0	11.1	100
Riau		195	47.2	2.6	0	39.0	97.9

4.8.8.2. Pelatihan Program Imunisasi

Pelatihan dalam pelaksanaan pelayanan imunisasi yang telah dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 ini meliputi Pelatihan Tatalaksana Imunisasi dan Pelatihan Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) yang diikuti oleh petugas Puskesmas pada tahun 2009 dan 2010. Dari kedua jenis pelatihan tersebut, Pelatihan Tatalaksana Imunisasi merupakan pelatihan dengan persentase tertinggi yang diikuti oleh petugas Puskesmas (40,5%) dan kemudian Pelatihan KIPI (30,3%).

Angka provinsi untuk Puskesmas di Provinsi Riau yang petugasnya mengikuti Pelatihan Tatalaksana Imunisasi adalah sebesar 40,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti Pelatihan Tatalaksana Imunisasi terdapat di Kabupaten Pelalawan (75,0%) kemudian Kota Dumai (55,6%) dan Kabupaten Rokan Hulu (52,6%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti Pelatihan Tatalaksana Imunisasi terdapat di Kabupaten Bengkalis (9,1%) diikuti oleh Kabupaten Kep. Meranti (12,5%) dan Kabupaten Kuantan Singingi (23,8%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan KIPI adalah sebesar 30,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti Pelatihan KIPI terdapat di Kabupaten Pelalawan (66,7%) diikuti oleh Kabupaten Rokan Hulu (62,2%) dan Kota Dumai (44,4%). Persentase Puskesmas terendah mengikuti Pelatihan KIPI terdapat di Kabupaten Bengkalis (0,0%) kemudian Kota Pekanbaru (10,5%) dan Kabupaten Kep. Meranti (12,5%).

Tabel 4.8.8.2.1.

Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Imunisasi Tahun 2009-2010 di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pelatihan Tata Laksana Imunisasi	Pelatihan KIPI	Pelatihan Lengkap Pelayanan Imunisasi
1	Kuantan Singingi	21	23.8	14.3	9.5
2	Indragiri Hulu	16	43.8	18.8	18.8
3	Indragiri Hilir	25	48.0	40.0	40.0
4	Pelalawan	12	75.0	66.7	58.3
5	Siak	14	50.0	28.6	28.6
6	Kampar	26	38.5	26.9	26.9
7	Rokan Hulu	19	52.6	63.2	52.6
8	Bengkalis	11	9.1	0	0
9	Rokan Hilir	15	46.7	33.3	33.3
10	Kepulauan Meranti	8	12.5	12.5	12.5
11	Kota Pekanbaru	19	26.3	10.5	5.3
12	Kota Dumai	9	55.6	44.4	44.4
	Riau	195	40.5	30.3	27.7

Laporan Provinsi Riau Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Angka provinsi untuk Puskesmas yang petugasnya mengikuti secara lengkap kedua jenis pelatihan pelayanan imunisasi tersebut adalah sebesar 27,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti pelatihan lengkap dalam Pelayanan Imunisasi terdapat di Kabupaten Pelalawan (58,3%) kemudian Kabupaten Rokan Hulu (52,6%) serta Kota Dumai (44,4%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti pelatihan lengkap dalam Pelayanan Imunisasi terdapat di Kabupaten Bengkalis (0,0%) kemudian Kota Pekanbaru (5,3%) dan Kabupaten Kuantan Singingi (9,3%).

4.8.8.3. Pedoman Program Imunisasi

Pedoman pelayanan imunisasi diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Dalam pelayanan imunisasi buku pedoman yang telah dikumpulkan pada Rifaskes 2011 ini meliputi Pedoman Pelaksanaan Program Imunisasi di Indonesia, Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi, Pedoman Penanganan Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Imunisasi.

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki buku pedoman Pelayanan Imunisasi di Provinsi Riau, terbanyak adalah Pedoman Pelaksanaan Program Imunisasi di Indonesia (64,6%), Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi (61,1%), Pedoman Penanganan KIPI (56,9%), dan SOP Pelayanan Imunisasi (50,3%).

Tabel 4.8.8.3.1.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Pelayanan Imunisasi di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Ketersediaan Buku Pedoman Pelayanan Imunisasi				
			Pedoman Pelaksanaan Program Imunisasi di Indonesia	Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi	Pedoman Penanganan KIPI	SOP Pelayanan Imunisasi	Lengkap Pedoman Pelayanan Imunisasi
1	Kuantan Singingi	21	28.6	38.1	19.0	19.0	14.3
2	Indragiri Hulu	16	50.0	43.8	43.8	37.5	37.5
3	Indragiri Hilir	25	64.0	56.0	52.0	40.0	36.0
4	Pelalawan	12	66.7	75.0	66.7	66.7	58.3
5	Siak	14	64.3	57.1	50.0	64.3	42.9
6	Kampar	26	69.2	69.2	73.1	65.4	50.0
7	Rokan Hulu	19	84.2	78.9	68.4	73.7	57.9
8	Bengkalis	11	90.9	90.9	100	72.7	72.7
9	Rokan Hilir	15	53.3	40.0	60.0	33.3	26.7
10	Kepulauan Meranti	8	50.0	37.5	25.0	12.5	12.5
11	Kota Pekanbaru	19	78.9	78.9	47.4	52.6	36.8
12	Kota Dumai	9	88.9	77.8	100	66.7	66.7
Riau		195	64.6	61.5	56.9	50.3	41.5

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Pedoman Pelaksanaan Program Imunisasi di Provinsi Riau adalah sebesar 64,6 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Pedoman Pelaksanaan Program Imunisasi di Indonesia terdapat di Kabupaten Bengkalis (90,9%) kemudian Kota Dumai (88,9%) dan Kabupaten Rokan Hulu (84,2%).

Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Pedoman Pelaksanaan Program Imunisasi di Indonesia terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi (28,6%) kemudian Kabupaten Indragiri Hulu dan Kep.Meranti (50,0%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi adalah sebesar 61,5 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi terdapat di Kabupaten Bengkalis (90,9%) kemudian Kota Pekanbaru dan Kabupaten Rokan Hulu (masing-masing 78,9%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi terdapat di Kabupaten Kep. Meranti (37,5%) kemudian Kabupaten Kuantan Singingi (38,1%) dan Kabupaten Indragiri Hulu (43,8%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki Pedoman Penanganan KIPI adalah sebesar 56,9 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Pedoman Penanganan KIPI terdapat di Kabupaten Bengkalis dan Kota dUmai (100%) kemudian Kabupaten Kampar (73,1%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Pedoman Penanganan KIPI terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi (19,0%) kemudian Kabupaten Kep.Meranti (25,0%) dan Kabupaten Indragiri Hulu (43,8%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki SOP Pelayanan Imunisasi adalah sebesar 50,3 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki SOP Pelayanan Imunisasi terdapat di Kabupaten Rokan Hulu (73,7%) kemudian Bengkalis (72,7%) dan Kabupaten Pelalawan dan Kota Dumai (masing-masing 66,7%). Persentase terendah Puskesmas memiliki SOP Pelayanan Imunisasi terdapat di Kabupaten Kep.Meranti (12,5%) diikuti oleh Kabupaten Kuantan Singingi (19,0%) dan Kabupaten Rokan Hilir (33,3%).

Angka provinsi untuk Puskesmas yang memiliki secara lengkap keempat jenis pedoman untuk Pelayanan Imunisasi adalah sebesar 41,5 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang memiliki Pedoman Pelayanan Imunisasi secara lengkap terdapat di Kabupaten Bengkalis (72,5%) kemudian Kota Dumai (66,7%) dan Kabupaten Pelalawan (58,3%). Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Pedoman Pelayanan Imunisasi secara lengkap terdapat di Kabupaten Kep. Meranti (12,5%) kemudian Kabupaten Kuantan Singingi (14,3%) dan kabupaten Rokan Hilir (26,7%).

4.8.8.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Imunisasi

Pengawasan, evaluasi dan bimbingan diperlukan dalam Pelayanan Imunisasi untuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan Pelayanan Imunisasi. Pengawasan, evaluasi dan bimbingan dapat berupa kunjungan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk supervisi, umpan balik tertulis dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, maupun ikut serta pada pertemuan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Angka provinsi untuk bentuk pengawasan, evaluasi dan bimbingan yang diterima Puskesmas di Provinsi Riau dalam Pelayanan Imunisasi adalah dalam bentuk pertemuan monitoring dan evaluasi program (74,4%), kemudian kunjungan petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk supervisi (79,5%), dan umpan balik dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota (85,1%). Angka provinsi untuk Puskesmas menerima pengawasan, evaluasi dan bimbingan pelayanan imunisasi dalam bentuk kunjungan supervisi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota adalah sebesar 79,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima

kunjungan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk supervisi terdapat di kota Dumai (100,0%) kemudian Kabupaten Rokan Hilir (93,3%) dan Kabupaten Siak (92,9%). Persentase Puskesmas terendah menerima kunjungan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk supervisi terdapat di Kabupaten Indragiri HULU (43,8%) kemudian Kabupaten Kuantan Singingi (57,1%) serta Kabupaten Kep. Meranti (62,5%).

Angka provinsi untuk Puskesmas menerima pengawasan, evaluasi dan bimbingan Pelayanan Imunisasi dalam bentuk umpan balik dari Dinas Kesehatan kabupaten/ Kota adalah sebesar 85,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi menerima umpan balik dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota terdapat di Kabupaten Pelalawan, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis dan Kota Dumai (masing-masing 100,0%). Persentase Puskesmas terendah menerima umpan balik dari Dinas Kesehatan Kab/Kota terdapat di Kabupaten Kep. Meranti (25,0%) kemudian Kabupaten Indragiri Hulu (62,5%) dan Kabupaten Siak (71,4%).

Angka provinsi untuk Puskesmas menerima pengawasan, evaluasi dan bimbingan Pelayanan Imunisasi dalam bentuk keikutsertaan pada pertemuan monitoring dan evaluasi di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota adalah sebesar 74,4 persen. Terdapat 1 kabupaten/kota dari 12 kabupaten/ kota di Provinsi Riau yang 100,0 persen Puskesmasnya mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi program, yaitu Kota Pekanbaru, kemudian Kabupaten Kampar (92,3%) dan Kabupaten Pelalawan (91,7%). Persentase Puskesmas terendah mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi program terdapat di Kabupaten Siak (28,6%) kemudian Kabupaten Kep. Meranti (37,5%) dan Kabupaten Kuantan Singingi (42,9%).

Tabel 4.8.8.4.1.
Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam Program Imunisasi di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Imunisasi			
			Kunjungan Petugas Dinkes Kab/Kota	Umpan Balik Laporan	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi	Bimbingan Teknis Lengkap
1	Kuantan Singingi	21	57.1	81.0	42.9	33.3
2	Indragiri Hulu	16	43.8	62.5	81.3	37.5
3	Indragiri Hilir	25	72.0	80.0	80.0	60.0
4	Pelalawan	12	91.7	100	91.7	91.7
5	Siak	14	92.9	71.4	28.6	21.4
6	Kampar	26	92.3	100	92.3	84.6
7	Rokan Hulu	19	89.5	100	89.5	84.2
8	Bengkalis	11	72.7	100	63.6	54.5
9	Rokan Hilir	15	93.3	93.3	66.7	66.7
10	Kepulauan Meranti	8	62.5	25.0	37.5	25.0
11	Kota Pekanbaru	19	89.5	84.2	100	73.7
12	Kota Dumai	9	100	100	88.9	88.9
Riau		195	79.5	85.1	74.4	61.5

Angka provinsi untuk Puskesmas yang menerima secara lengkap seluruh bentuk pengawasan, evaluasi dan bimbingan Pelayanan Imunisasi adalah sebesar 61,5 persen.

Persentase Puskesmas tertinggi menerima secara lengkap keseluruhan bentuk pengawasan, evaluasi dan bimbingan Pelayanan Imunisasi terdapat di Kabupaten Pelalawan (91,7%) kemudian Kota Dumai (88,9%) dan Kabupaten Kampar (84,6%). Persentase Puskesmas terendah menerima secara lengkap keseluruhan bentuk pengawasan, evaluasi dan bimbingan Pelayanan Imunisasi terdapat di Kabupaten Siak (21,4%) kemudian Kabupaten Kep. Meranti (25,0%) dan Kabupaten Kuantan Singingi (33,3%).

4.9. PELAYANAN PONED

Pelayanan PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar) ditanyakan pada Puskesmas Perawatan dengan Pelayanan PONED. Di Provinsi Riau, Puskesmas dengan Pelayanan PONED berjumlah 22 Puskesmas. Empat Kabupaten/Kota di Riau tidak memiliki Puskesmas dengan Pelayanan PONED, yaitu Kabupaten Indragiri hulu, Kabupaten Siak, Kepulauan Meranti dan Kota Pekanbaru.

Tabel 4.9.1.
Persentase Puskesmas Perawatan PONED menurut Kegiatan Pelayanan dan Pelatihan PONED di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No.	Kabupaten/Kota	Jml Pusk PONED	Pelayanan PONED 24 jam	Pelatihan PONED yang diikuti Petugas
1	Kuantan Singingi	4	75,0	25,0
2	Indragiri Hulu	0	0	0
3	Indragiri Hilir	3	33,3	33,3
4	Pelalawan	1	100	100,0
5	Siak	0	0	0
6	Kampar	2	50,0	50,0
7	Rokan Hulu	5	80,0	60,0
8	Bengkalis	4	100	100,0
9	Rokan Hilir	2	100	100,0
10	Kepulauan Meranti	0	0	0
11	Kota Pekan Baru	0	0	0
12	Kota Dumai	1	100	100,0
Riau		22	77,3	63,6

Tabel 4.9.1. menunjukkan ketersediaan Pelayanan PONED 24 jam dan Keikutsertaan petugas dalam pelatihan PONED. Persentase puskesmas PONED yang memberikan pelayanan PONED 24 jam di Provinsi Riau adalah 77,3 persen. Seluruh Puskesmas PONED di Kabupaten Pelalawan, bengkalis, Rokan Hilir dan Kota Dumai (100%) telah memberikan pelayanan 24 jam, selanjutnya di Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri hilir, Kampar dan Rokan Hulu Puskesmas PONED yang menyediakan Pelayanan PONED 24 jam masing-masing hanya 75,0 persen, 33,3 Persen, 50,0 persen dan 80,0 persen.

Persentase puskesmas PONED di Riau yang petugasnya telah mengikuti pelatihan PONED adalah 63,6 persen. Seluruh Puskesmas PONED di 4 Kabupaten di Provinsi Riau yang

petugasnya telah mengikuti pelatihan PONED (100%) yaitu di Kabupaten Pelalawan, Bengkalis, Rokan Hilir dan Kota Dumai . Terendah di Kabupaten Kuantan Singingi (25,0%) kemudian Kabupaten Indragiri hilir (33,0%) dan Kabupaten Kampar (50,0).

4.10. PUSKESMAS SEBAGAI PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sesuai SK Menkes no 128 Tahun 2004 tentang kebijakan dasar Puskesmas, disebutkan bahwa salah satu dari tiga fungsi puskesmas adalah sebagai Pusat Pemberdayaan masyarakat di bidang Kesehatan.

Tabel 4.10.1.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Petugas Khusus dan Petugas yang dilatih Pemberdayaan Masyarakat, Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Juml Pusk	Petugas Khusus	Petugas yang dilatih
1	Kuantan Singingi	21	38.1	9.5
2	Indragiri Hulu	16	0	0
3	Indragiri Hilir	25	52.0	40.0
4	Pelalawan	12	41.7	8.3
5	Siak	14	35.7	21.4
6	Kampar	26	73.1	34.6
7	Rokan Hulu	19	57.9	36.8
8	Bengkalis	11	18.2	9.1
9	Rokan Hilir	15	13.3	20.0
10	Kepulauan Meranti	8	12.5	25.0
11	Kota Pekanbaru	19	78.9	36.8
12	Kota Dumai	9	88.9	22.2
Riau		195	45.6	24.1

Tabel 4.10.1. menunjukkan secara provinsi, persentase Puskesmas yang mempunyai petugas khusus dan petugas yang dilatih pada tahun 2009 dan 2010. Di Provinsi Riau, persentase Puskesmas yang mempunyai petugas khusus untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah 45,6 persen. Persentase tertinggi adalah di Kota Dumai (88,9%) kemudian Kota pekanbaru (78,9%) dan Kabupaten kampar (73,1%). Terendah di Kabupaten Indragiri hulu (0%), diikuti Kabupaten Kep. Meranti (12,5%) dan Rokan Hilir (13,3%).

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan terkait fungsi Puskesmas sebagai pusat pemberdayaan bidang Kesehatan hanya 24,1 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan di Kabupaten Indragiri Hilir (40%), kemudian Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Pekanbaru (36,8%). Terendah di

Kabupaten Indragiri Hulu (0%), kemudian Kabupaten pelalawan (8,3%) dan Kabupaten Bengkalis (9,1%).

Tabel 4.10.2. menunjukkan tentang ketersediaan pedoman, Standard Operational Procedure (SOP)/Protap Peraturan tertulis yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Puskesmas berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat.

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang memiliki pedoman pemberdayaan masyarakat hanya 29,2 persen. Persentase tertinggi di Kota Pekanbaru (57,9%), kemudian Kota Dumai (55,6%) dan Kabupaten Indragiri Hilir (48,0%). Terendah di kabupaten Indragiri Hulu (0%), kemudian Kabupaten Bengkalis (9,1%), dan Kabupaten Kuantan Singingi (14,3%).

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang mempunyai SOP/Protap pemberdayaan masyarakat hanya 22,6 persen. Persentase tertinggi di Kota Pekanbaru (47,4%), kemudian Kabupaten Indragiri Hilir (40,0%) dan Kabupaten Kampar (34,6%). Terendah di Kabupaten kuantan seningi dan Indragiri Hulu (0%), kemudian Kabupaten Rokan Hilir (6,7%).

Tabel 4.10.2.
Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Pedoman, SOP dan Peraturan
tentang Pemberdayaan Masyarakat, di Provinsi Riau
Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pedoman	SOP/Protap	Peraturan Tertulis
1	Kuantan Singingi	21	14.3	0	4.8
2	Indragiri Hulu	16	0	0	6.3
3	Indragiri Hilir	25	48.0	40.0	28.0
4	Pelalawan	12	16.7	8.3	0
5	Siak	14	21.4	28.6	14.3
6	Kampar	26	34.6	34.6	30.8
7	Rokan Hulu	19	31.6	26.3	36.8
8	Bengkalis	11	9.1	9.1	9.1
9	Rokan Hilir	15	20.0	6.7	0
10	Kepulauan Meranti	8	25.0	25.0	0
11	Kota Pekanbaru	19	57.9	47.4	52.6
12	Kota Dumai	9	55.6	22.2	33.3
Riau		195	29.2	22.6	20.5

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang mempunyai peraturan tertulis pemberdayaan masyarakat hanya 20,5 persen. Persentase tertinggi di Kota Pekanbaru (52,6%), kemudian Kabupaten Rokan Hulu (36,8%) dan Kota Dumai (33,3%). Terendah di Kabupaten Pelalawan, Rokan Hilir dan Kep. Meranti (0%).

Tabel 4.10.3. menunjukkan ketersediaan alokasi dana khusus untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Secara provinsi, persentase Puskesmas yang mempunyai alokasi dana khusus untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang

kesehatan hanya 23,6 persen. Persentase tertinggi ada di kabupaten rokan HULu (63,3%), kemudian Kota Dumai (44,4%) dan Kabupaten Indragiri Hilir (36,0%). Sedangkan persentase terendah ada Kabupaten Pelalawan dan Rokan Hilir (0%), kemudian Kabupaten Indragiri HULu (6,3%).

Tabel 4.10.3.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Alokasi Dana Khusus
Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Riau,
Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Juml Pusk	Alokasi Dana Khusus
1	Kuantan Singingi	21	23.8
2	Indragiri Hulu	16	6.3
3	Indragiri Hilir	25	36.0
4	Pelalawan	12	0
5	Siak	14	7.1
6	Kampar	26	34.6
7	Rokan Hulu	19	63.2
8	Bengkalis	11	9.1
9	Rokan Hilir	15	0
10	Kepulauan Meranti	8	12.5
11	Kota Pekanbaru	19	15.8
12	Kota Dumai	9	44.4
Riau		195	23.6

Tabel 4.10.4.a dan 4.10.4.b. menunjukkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan puskesmas yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Puskesmas sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 meliputi Pertemuan Tingkat Desa, Survei Mawas Diri (SMD), Musyawarah Masyarakat Desa (MMD), Pelatihan Kader Kesehatan Baru, Pertemuan Kader Kesehatan, Pelatihan Kader Lama, Pelatihan Bagi Tokoh Masyarakat, dan Pelatihan Bagi LSM/Ormas. Kegiatan pemberdayaan masyarakat terbanyak adalah Pertemuan Kader (63,1%), kemudian Musyawarah Masyarakat Desa (59,0%), Pertemuan Tingkat Desa (35,4%), Pelatihan Kader Lama (56,9%), Pelatihan Kader Kesehatan Baru (48,2%), Survei mawas Diri (44,6%), Pelatihan Bagi Toma (30,8%) dan Pelatihan Bagi LSM/ Ormas (6,7).

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pertemuan tingkat desa adalah 35,4%. Persentase tertinggi di Kota Dumai (100%), kemudian Kota Pekanbaru (68,4%) dan Kabupaten Rokan HULu (47,4%). Persentase terendah di Kabupaten Indragiri hULu (0%), kemudian Kabupaten Rokan Hilir (6,7%) dan Kabupaten Pelalawan (16,7%).

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Survei Mawas Diri adalah 44,6 persen. Persentase tertinggi di Kota Dumai (100%), kemudian Kota pekanbaru (84,2%) dan Kabupaten Rokan HULu (73,7%). Persentase terendah di Kabupaten Indragiri Hulu dan Bengkalis (0%), kemudian Kabupaten Kuantan Sengingi (23,8%).

Tabel 4.10.4.a.
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Riau,
Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pertemuan Tingkat Desa	Survei Mawas Diri	Musyawaharah Masyarakat Desa	Pelatihan Kader Kesehatan Baru
1	Kuantan Singingi	21	23.8	23.8	52.4	33.3
2	Indragiri Hulu	16	0	0	0	6.3
3	Indragiri Hilir	25	44.0	24.0	68.0	76.0
4	Pelalawan	12	16.7	33.3	50.0	16.7
5	Siak	14	21.4	42.9	50.0	35.7
6	Kampar	26	46.2	73.1	92.3	65.4
7	Rokan Hulu	19	47.4	73.7	78.9	63.2
8	Bengkalis	11	18.2	0	18.2	18.2
9	Rokan Hilir	15	6.7	26.7	20.0	40.0
10	Kepulauan Meranti	8	25.0	50.0	50.0	12.5
11	Kota Pekanbaru	19	68.4	84.2	89.5	78.9
12	Kota Dumai	9	100	100	100	77.8
Riau		195	35.4	44.6	59.0	48.2

Tabel 4.10.4.b.
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Riau,
Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pertemuan Kader Kesehatan	Pelatihan Kader Lama	Pelatihan Bagi Toma	Pelatihan Bagi LSM/Ormas
1	Kuantan Singingi	21	52.4	47.6	19.0	0
2	Indragiri Hulu	16	0	12.5	0	0
3	Indragiri Hilir	25	80.0	72.0	44.0	8.0
4	Pelalawan	12	58.3	25.0	8.3	0
5	Siak	14	42.9	42.9	35.7	7.1
6	Kampar	26	88.5	84.6	46.2	7.7
7	Rokan Hulu	19	84.2	73.7	31.6	10.5
8	Bengkalis	11	27.3	27.3	0	0
9	Rokan Hilir	15	33.3	53.3	40.0	0
10	Kepulauan Meranti	8	62.5	50.0	12.5	12.5
11	Kota Pekanbaru	19	94.7	68.4	52.6	26.3
12	Kota Dumai	9	100	88.9	44.4	0
Riau		195	63.1	56.9	30.8	6.7

Tabel 4.10.5. menunjukkan pembinaan dan pemantauan kegiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dilakukan petugas puskesmas berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Puskesmas sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan. Pembinaan dan pemantauan yang dilakukan dapat berupa pemberian umpan balik laporan kegiatan, melakukan supervisi kegiatan dan mengadakan pertemuan

pembinaan. Pembinaan dan pemantauan yang sering dilakukan petugas puskesmas adalah melakukan pertemuan pembinaan sebesar 59,0 persen, diikuti melaksanakan supervisi sebesar 54,9 persen, dan memberikan umpan balik laporan kegiatan sebesar 49,7 persen.

Secara provinsi, Persentase Puskesmas yang memberikan umpan balik laporan kegiatan sebesar 49,7 persen. Persentase tertinggi di Kabupaten Kampar (80,8%), kemudian kabupaten Indragiri Hilir (80,0%) dan Kabupaten Rokan HULu dan kota Pekanbaru (57,9%). Persentase terendah di Kabupaten Pelalawan (8,3%), Kabupaten Indragiri HULu (12,5%), dan Kabupaten Rokan Hilir (13,3%).

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang melakukan supervisi adalah 54,9 persen. Persentase tertinggi di Kabupaten Kampar (84,6%), diikuti Kabupaten Rokan HULu (84,2%) dan Kabupaten Indragiri hilir (80,0%). Terendah di Kabupaten Rokan Hilir (6,7%), kemudian Kabupaten Pelalawan (8,3%) dan Kabupaten Indragiri hULu (18,8%).

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang melakukan pertemuan pembinaan adalah 59,0 persen. Persentase tertinggi di Kota Dumai (88,9%), kemudian Kabupaten kampar (88,5%) dan Kabupaten Rokan HULu (84,2%). Persentase terendah di Kabupaten Rokan HULir (6,7%), kemudian Kabupaten Indragiri hulu (18,8%) dan Kabupaten Pelalawan (33,3%).

Tabel 4.10.5.
Persentase Puskesmas menurut Pelaksanaan Pembinaan dan Pemantauan
Kegiatan UKBM di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Umpan Balik	Supervisi	Pertemuan Pembinaan
1	Kuantan Singingi	21	52.4	47.6	52.4
2	Indragiri Hulu	16	12.5	18.8	18.8
3	Indragiri Hilir	25	80.0	80.0	80.0
4	Pelalawan	12	8.3	8.3	33.3
5	Siak	14	57.1	50.0	57.1
6	Kampar	26	80.8	84.6	88.5
7	Rokan Hulu	19	57.9	84.2	84.2
8	Bengkalis	11	18.2	27.3	36.4
9	Rokan Hilir	15	13.3	6.7	6.7
10	Kepulauan Meranti	8	37.5	50.0	37.5
11	Kota Pekanbaru	19	57.9	68.4	73.7
12	Kota Dumai	9	55.6	77.8	88.9
Riau		195	49.7	54.9	59.0

Tabel 4.10.6. menunjukkan kondisi input dan proses yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Puskesmas sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan. Input dikategorikan baik bila tersedia sumber daya tenaga, pedoman dan dana khusus. Sedangkan proses dikategorikan baik bila ada kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa survei mawas diri, musyawarah masyarakat desa, pelatihan kader kesehatan baru dan lama.

Secara provinsi, persentase Puskesmas dengan kondisi input pemberdayaan masyarakat yang baik hanya 8,7 persen. Persentase puskesmas tertinggi yang mempunyai

Input pemberdayaan Masyarakat yang baik adalah di Kabupaten Indragiri hilir (28,0%), kemudian Kabupaten Rokan hulu (15,8%) dan Kabupten Kampar (11,5%). Terdapat 5 provinsi yang tidak ada input yang baik untuk pemberdayaan masyarakatnya.

Secara provinsi, persentase Puskesmas dengan proses yang baik dalam pemberdayaan masyarakat hanya 37,4 persen. Persentase puskesmas tertinggi dengan proses pemberdayaan masyarakat yang baik adalah di Kota Dumai (88,9%), kemudian Kota Pekanbaru (78,9%) dan Kabupaten Rokan HULU (68,4%), sedang persentase terendah adalah di Kabupaten Indragiri hulu dan Rokan Hulu (0%).

Tabel 4.10.6.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Input dan Proses
Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Input	Proses
1	Kuantan Singingi	21	5	14,3
2	Indragiri Hulu	16	0	0
3	Indragiri Hilir	25	28,0	20,0
4	Pelalawan	12	0	16,7
5	Siak	14	0	35,7
6	Kampar	26	11,5	65,4
7	Rokan Hulu	19	15,8	68,4
8	Bengkalis	11	9,1	0
9	Rokan Hilir	15	0	20,0
10	Kepulauan Meranti	8	0	25,0
11	Kota Pekanbaru	19	5,3	78,9
12	Kota Dumai	9	11	88,9
Riau		195	8,7	37,4

Tabel 4.10.7.a. dan 4.10.7.b. menunjukkan keberadaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Puskesmas sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan. UKBM yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 meliputi Pos Pelayanan terpadu (Posyandu), Pos Pelayanan terpadu bagi lanjut usia (Posyandu Lansia), Pos Obat desa (POD)/Warung Obat Desa (WOD), Saka Bakti Husada (SBH), Pos Kesehatan pesantren (Poskestren), Dana Sehat, Kelompok Peduli Lansia, Kelompok Peduli HIV-AIDS dan Kelompok Peduli TB Paru. Secara provinsi, persentase keberadaan UKBM yang terbanyak adalah Posyandu (96,9%), kemudian Posyandu Lansia (85,6%), Dana Sehat (40,5%) Peduli Lansia (27,7%), Peduli TB Paru (19,0%), Poskestren (25,1%), POD/WOD (17,9%), Peduli HIV-AIDS (9,7%) dan SBH (17,4%).

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang ada Posyandu adalah 96,9 persen, Terdapat 9 dari 12 Kabupaten/Kota yang seluruh puskesmasnya mempunyai Posyandu (100%). Provinsi dengan persentase Puskesmas terendah yang ada posyandu adalah di Kabupaten Bengkalis (72,7%), Kabupaten rokan Hilir (86,7%) dan Kabupaten Indragiri hulu (93,8%).

Laporan Provinsi Riau Riset Fasilitas Kesehatan 2011

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang ada Posyandu Lansia adalah 85,6 persen. Terdapat 3 Kabupaten dan Kota seluruh puskesmasnya mempunyai Posyandu Lansia (100%) yaitu Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Sedang persentase puskesmas terendah yang ada Posyandu Lansia adalah di Kabupaten Bengkalis (63,6%), Kabupaten Rokan Hilir (66,7%), dan Kabupaten Indragiri hulu (68,8%).

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang ada POD/WOD adalah 17,9 persen. Persentase puskesmas tertinggi yang ada POD/WOD adalah Kabupaten Kampar (42,3%), kemudian Kota Pekanbaru (36,8%) dan Kabupaten Pelalawan (25,0%). Terdapat 3 Kabupaten dan Kota yang puskesmasnya tidak ada POD/WODnya yaitu Kabupaten Indragiri HULU, Bengkalis dan Kep. Meranti.

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang ada SBH adalah 17,4 persen. Persentase puskesmas tertinggi yang ada SBH adalah Kota Pekanbaru (42,1%), kemudian Kabupaten Indragiri hilir (32,0%) dan Kabupaten Rokan HULU (31,6%). Terdapat 3 Kabupaten yang puskesmasnya tidak ada SBHnya yaitu Kabupaten Siak, Bengkalis dan Kep. Meranti.

Tabel 4.10.7.a.
Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Posyandu	Posyandu Lansia	POD/WOD	SBH	Poskestren
1	Kuantan Singingi	21	100	95.2	14.3	9.5	14.3
2	Indragiri Hulu	16	93.8	68.8	0	6.3	6.3
3	Indragiri Hilir	25	100	84.0	12.0	32.0	8.0
4	Pelalawan	12	100	83.3	25.0	8.3	16.7
5	Siak	14	100	85.7	14.3	0	21.4
6	Kampar	26	100	100	42.3	23.1	57.7
7	Rokan Hulu	19	100	84.2	10.5	31.6	36.8
8	Bengkalis	11	72.7	63.6	0	0	27.3
9	Rokan Hilir	15	86.7	66.7	13.3	6.7	6.7
10	Kepulauan Meranti	8	100	75.0	0	0	0
11	Kota Pekanbaru	19	100	100	36.8	42.1	42.1
12	Kota Dumai	9	100	100	22.2	11.1	44.4
	Riau	195	96.9	85.6	17.9	17.4	25.1

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang ada Poskestren adalah 25,1 persen. Persentase puskesmas tertinggi yang ada Poskestren adalah Kabupaten Kampar (57,7%), kemudian Kota Dumai (44,4%) dan Kota Pekanbaru (42,1%). Terdapat 1 Kabupaten yang puskesmasnya tidak ada Poskestren yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti.

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang ada Dana Sehat 40,5 persen. Persentase puskesmas tertinggi yang ada Dana Sehat adalah Kabupaten Kampar (76,9%), kemudian Kabupaten Kepulauan Meranti (62,5%) dan Kabupaten Pelalawan (58,3%). Terendah di Kabupaten Indragiri hulu (6,3%), diikuti Kabupaten Indragiri Hilir (16,0%) dan Kabupaten Bengkalis (18,2%).

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang ada Peduli Lansia adalah 27,7 persen. Persentase puskesmas tertinggi yang ada Peduli Lansia adalah Kabupaten Kuantan Singingi

(42,9%), kemudian Kota Pekanbaru (42,1%) dan Kabupaten Kampar (34,6%). Kabupaten yang puskesmasnya tidak ada Peduli Lansia yaitu Kabupaten Siak (0%) kemudian Kabupaten Indragiri hulu (6,3%) dan Kabupaten Kepulauan Meranti (12,5).

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang ada Peduli HIV-AIDS adalah 9,7 persen. Persentase puskesmas tertinggi Peduli HIV-AIDS adalah Kabupaten Bengkalis (27,3%), kemudian Kota Pekanbaru (26,3%) dan Kabupaten Rokan Hilir (20,0%). Terdapat 3 Kabupaten yang puskesmasnya tidak ada Peduli HIV-AIDS yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri hulu dan Siak.

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang ada Peduli TB Paru adalah 19,0 persen. Persentase puskesmas tertinggi yang ada Peduli TB Paru adalah Kabupaten Pelalawan (33,3%), kemudian Kabupaten Kuantan Singingi (28,6%) dan Kabupaten Indragiri hilir (28,0%). Terdapat 1 Kabupaten yang puskesmasnya tidak ada Poskestren yaitu Kabupaten Indragiri hulu.

Tabel 4.10.7.b.
Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Dana Sehat	Peduli Lansia	Peduli HIV-AIDS	Peduli TB Paru
1	Kuantan Singingi	21	28.6	42.9	0	28.6
2	Indragiri Hulu	16	6.3	6.3	0	0
3	Indragiri Hilir	25	16.0	32.0	4.0	28.0
4	Pelalawan	12	58.3	33.3	16.7	33.3
5	Siak	14	42.9	0	0	7.1
6	Kampar	26	76.9	34.6	7.7	23.1
7	Rokan Hulu	19	52.6	26.3	5.3	10.5
8	Bengkalis	11	18.2	27.3	27.3	9.1
9	Rokan Hilir	15	20.0	26.7	20.0	20.0
10	Kepulauan Meranti	8	62.5	12.5	12.5	12.5
11	Kota Pekanbaru	19	57.9	42.1	26.3	26.3
12	Kota Dumai	9	44.4	22.2	11.1	11.1
Riau		195	40.5	27.7	9.7	19.0

4.11. ALAT KESEHATAN (ALKES) DAN OBAT

Ketersediaan alat kesehatan dianalisis menurut: 1. Kelengkapan jenis alat yang tersedia yaitu jenis alat yang ditunjukkan oleh petugas Puskesmas dan 2. Jenis alat yang baik dan digunakan yaitu jenis alat yang ditunjukkan dan diakui alat tersebut baik dan digunakan untuk pelayanan. Analisis dikelompokkan atas 5 yaitu : 80-100 persen, 60-79 persen, 40-59 persen, 20-39 persen, dan 0- 19 persen.

4.11.1. ALKES POLIKLINIK UMUM

Pada Rifaskes 2011 data jenis alat Poliklinik umum yang dikumpulkan sebanyak 56 jenis.

Tabel 4.11.1.1.
Persentase Puskesmas menurut Kelengkapan Ketersediaan Alat Kesehatan Poliklinik Umum di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Skor Ketersediaan Alat Kesehatan Poliklinik Umum				
			80-100%	60-79%	40-59%	20-39%	< 20%
1	Kuantan Singingi	21	0	14.3	38.1	28.6	19.0
2	Indragiri Hulu	16	0	25.0	31.3	25.0	18.8
3	Indragiri Hilir	25	4.0	32.0	48.0	8.0	8.0
4	Pelalawan	12	16.7	25.0	25.0	16.7	16.7
5	Siak	14	7.1	28.6	28.6	14.3	21.4
6	Kampar	26	15.4	38.5	26.9	3.8	15.4
7	Rokan Hulu	19	5.3	26.3	31.6	26.3	10.5
8	Bengkalis	11	27.3	18.2	18.2	9.1	27.3
9	Rokan Hilir	15	0	20.0	26.7	33.3	20.0
10	Kepulauan Meranti	8	0	37.5	50.0	12.5	0
11	Kota Pekanbaru	19	0	31.6	42.1	21.1	5.3
12	Kota Dumai	9	0	22.2	66.7	11.1	0
Riau		195	6.2	27.2	35.4	17.4	13.8

Tabel 4.11.1.1. menunjukkan persentase Puskesmas menurut ketersediaan jenis alat poliklinik umum. Di Provinsi Riau, persentase Puskesmas yang mempunyai 80-100 persen jenis alat poliklinik umum hanya 6,2 persen. Persentase tertinggi di Kabupaten Bengkalis (27,3%), kemudian Kabupaten Pelalawan (16,7%) dan kabupaten Kampar (15,4%). Sementara masih ada 6 Kabupaten/Kota yang tidak memiliki Ketersediaan 80-100 persen jenis alat poliklinik umum (0%) yaitu Kabupaten Kuantan sengigi, Indragiri hulu, Rokan hilir, Kep.Meranti, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.

Di Provinsi Riau, persentase Puskesmas yang mempunyai 60-79 persen jenis alat poliklinik umum adalah 27,2 persen. Tertinggi di Kabupaten Kampar (38,5%), kemudian Kabupaten Kep. Meranti Palembang (37,5%) dan Kabupaten Indragiri hilir (32,0%). Persentase terendah di Kabupaten Kuantan Sengingi (14,3%), kemudian Kabupaten Bengkalis (18,2%) dan kabupaten Rokan Hilir (20,0%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Riau yang mempunyai 40-59 persen jenis alat poliklinik umum adalah 35,4 persen. Persentase Tertinggi di Kota dumai (66,7%), kemudian Kabupaten Kep. Meranti (50,0%), Kabupaten Indragiri hilir (48,0%). Persentase terendah di Kabupaten Bengkalis (18,2%), kemudian Kabupaten Pelalawan (25,0%) dan Kabupaten Rokan Hilir (26,7%).

Di Provinsi Riau, persentase Puskesmas yang mempunyai 20-39 persen jenis alat poliklinik umum adalah 17,4 persen. Persentase tertinggi di Kabupaten Rokan Hilir (33,3%), kemudian Kabupaten Kuantan Sengingi (28,6%) dan Kabupaten Rokan hulu (26,3%). Persentase terendah di Kabupaten Kampar (3,8%), kemudian Kabupaten Indragiri hilir (8,0%) dan Kabupaten bengkalis (9,1%).

Persentase Puskesmas yang mempunyai kurang dari 0-19 persen jenis alat poliklinik umum di Provinsi Riau adalah 13,8 persen. Persentase tertinggi di Kabupaten Bengkalis (27,3%), kemudian Kabupaten Siak (21,4%) dan Kabupaten Rokan Hilir (20,0%). Ada 2

Kabupaten/Kota yang terendah dengan persentase 0 persen, yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Dumai.

4.11.2. ALKES POLIKLINIK KIA

Pada Rifaskes 2011 data jenis alat Poliklinik KIA yang dikumpulkan sebanyak 59 jenis. Tabel 4.11.2.1. menunjukkan persentase Puskesmas menurut ketersediaan jenis alat poliklinik KIA. Di Provinsi Riau, persentase Puskesmas yang mempunyai 80-100 persen jenis alat poliklinik KIA hanya 9,7 persen. Persentase tertinggi di Kabupaten Pelalawan (33,3%), kemudian Kabupaten Bengkalis (18,2%) dan Kabupaten Indragiri hilir (16,0%). Ada 4 Kabupaten/Kota yang terendah dengan persentase 0 persen, yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri hulu, Siak dan kota Pekanbaru.

Di Provinsi Riau, persentase Puskesmas yang mempunyai 60-79 persen jenis alat poliklinik KIA adalah 30,8 persen. Tertinggi di Kota Dumai (66,7%), kemudian Kabupaten Kampar (50,0%) dan Kabupaten Siak (42,9%). Terendah di Kabupaten Rokan Hulu (0%), kemudian Kabupaten Indragiri hulu (6,3%) dan Kabupaten kepulauan Meranti (12,5%).

Di Provinsi Riau, persentase Puskesmas yang mempunyai 40-59 persen jenis alat poliklinik KIA adalah 36,4 persen. Tertinggi di Kabupaten Rokan hulu (63,2%), kemudian Kabupaten siak (57,1%) dan Kabupaten Kuantan Sngingi (47,6%). Terendah di Kabupaten Bengkalis (9,1%), kemudian kota Dumai (22,2%) dan Kabupaten Indragiri Hilir (24,0%).

Tabel 4.11.2.1.

Persentase Puskesmas menurut Kelengkapan Ketersediaan Alat Kesehatan Poliklinik KIA di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Skor Ketersediaan Alat Kesehatan Poliklinik KIA				
			80-100%	60-79%	40-59%	20-39%	< 20%
1	Kuantan Singingi	21	0	23.8	47.6	19.0	9.5
2	Indragiri Hulu	16	0	6.3	43.8	43.8	6.3
3	Indragiri Hilir	25	16.0	40.0	24.0	20.0	0
4	Pelalawan	12	33.3	33.3	25.0	8.3	0
5	Siak	14	0	42.9	57.1	0	0
6	Kampar	26	11.5	50.0	30.8	7.7	0
7	Rokan Hulu	19	10.5	0	63.2	26.3	0
8	Bengkalis	11	18.2	27.3	9.1	27.3	18.2
9	Rokan Hilir	15	13.3	33.3	33.3	20.0	0
10	Kepulauan Meranti	8	12.5	12.5	37.5	25.0	12.5
11	Kota Pekan Baru	19	0	31.6	31.6	26.3	10.5
12	Kota Dumai	9	11.1	66.7	22.2	0	0
Riau		195	9.7	30.8	36.4	19.0	4.1

Di Provinsi Riau, persentase Puskesmas yang mempunyai 20-39 persen jenis alat poliklinik KIA adalah 19,0 persen. Tertinggi di Kabupaten Indragiri hulu (43,8%), kemudian Kabupaten Bengkalis (27,3%) dan Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Pekanbaru (26,3%). Terendah di Kabupaten Siak dan Kota Dumai (0%).

Di Provinsi Riau, persentase Puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis alat poliklinik KIA adalah 4,1 persen. Tertinggi di Kabupaten Bengkalis (18,2%), kemudian Kabupaten Kep. Meranti (12,5%) dan Kota Pekanbaru (10,5%). Sementara di 7 Kabupaten/Kota, sudah tidak ada Puskesmas yang persediaan Jenis alat Poliklinik KIA hanya 0-20 persen (%)

4.11.3. ALKES PONED

Ditanyakan khusus pada Puskesmas Perawatan dengan PONED. Pada Rifaskes 2011 data Jenis Alat PONED yang dikumpulkan sebanyak 26 jenis.

Tabel 4.11.3.1, menunjukkan persentase Puskesmas PONED menurut ketersediaan jenis alat kesehatan PONED. Di Provinsi Riau, persentase Puskesmas PONED yang mempunyai 80% atau lebih jenis alat kesehatan PONED adalah 4,5 persen. Hanya Puskesmas PONED di 1 Kabupaten/Kota yang memiliki ketersediaan alat kesehatan PONED 80-100 persen, yaitu Tertinggi di Kabupaten Indragiri Hilir (33,3%), sementara Kabupaten/Kota Lainnya 0 persen.

Di Provinsi Riau, persentase Puskesmas PONED yang mempunyai 60-79 persen jenis alat kesehatan Puskesmas PONED 54,5 persen. 8 kabupaten/kota dengan Puskesmas PONED yang mempunyai 60-79 persen jenis alat kesehatan Puskesmas PONED, Tertinggi di Kabupaten Kuantan seningi, Rokan Hilir dan Kota Dumai masing-masing (100%).

Di Provinsi Riau, persentase Puskesmas PONED yang mempunyai 40-59 persen jenis alat kesehatan Puskesmas PONED adalah 13,6 persen. 2 Kabupaten/kota dengan Puskesmas PONED mempunyai 40-59 persen jenis alat kesehatan Puskesmas PONED, Tertinggi di Kabupaten Rokan hulu (40,0%), kemudian Kabupaten Bengkalis (25,0%), sementara Kabupaten/Kota Lainnya 0 persen.

Tabel 4.11.3.1.

Persentase Puskesmas Perawatan Poned menurut Kelengkapan Ketersediaan Alat Poned di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Skor Ketersediaan Alat Poned				
			80-100%	60-79%	40-59%	20-39%	< 20%
1	Kuantan Singingi	4	0	100	0	0	0
2	Indragiri Hulu	0	0	0	0	0	0
3	Indragiri Hilir	3	33.3	33.3	0	0	33.3
4	Pelalawan	1	0	33.3	0	0	0
5	Siak	0	0	0	0	0	0
6	Kampar	2	0	50.0	0	50.0	0
7	Rokan Hulu	5	0	20.0	40.0	20.0	20.0
8	Bengkalis	4	0	25.0	25.0	25	25.0
9	Rokan Hilir	2	0	100	0	0	0
10	Kepulauan Meranti	0	0	0	0	0	0
11	Kota Pekanbaru	0	0	0	0	0	0
12	Kota Dumai	1	0	100	0	0	0
Riau		22	4.5	54.5	13.6	13.6	13.6

Di Provinsi Riau, persentase Puskesmas Poned yang mempunyai 20-39 persen jenis alat kesehatan Puskesmas Poned adalah 13,6 persen. 3 Kabupaten/kota dengan Puskesmas Poned mempunyai 20-39 persen jenis alat kesehatan Puskesmas Poned, Tertinggi di Kabupaten Kampare (50,0%), kemudian Kabupaten Bengkalis (25,6%), serta Kabupaten Rokan HULU (20,0%).

Di Provinsi Riau, persentase Puskesmas Poned yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis alat kesehatan Puskesmas Poned adalah 13,6 persen. 3 Puskesmas Poned mempunyai 0-20 persen jenis alat kesehatan Puskesmas Poned, yaitu Indragiri hilir (33,3%), Kabupaten Bengkalis (25,0%) dan kabupaten Rokan Hulu (20,0%).

4.11.4. ALKES IMUNISASI

Tabel 4.11.4.1, menunjukkan persentase Puskesmas menurut ketersediaan jenis alat imunisasi. Jenis alat kesehatan imunisasi yang dimaksud pada laporan ini adalah Cold Box, Vaccine Carier dan Kulkas yang dimiliki puskesmas tersebut untuk pelayanan imunisasi. Di Provinsi Riau, persentase Puskesmas yang mempunyai ketiga jenis alat imunisasi berfungsi hanya 41,0 persen. Tertinggi di Provinsi yaitu Kabupaten Siak (71,4%), diikuti Kota Pekanbaru (68,4%) dan Kabupaten Pelalawan (58,35%). Terendah di Kabupaten Kep. Meranti (0%), kemudian Kabupaten Rokan Hillir (6,7%) dan Kabupaten Indragiri hilir (24,0%).

Tabel 4.11.4.1.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Alkes Imunisasi di
Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Ketersediaan Alkes Imunisasi (Kulkas, Cold Box, Vaccine Carrier)
1	Kuantan Singingi	21	38.1
2	Indragiri Hulu	16	31.3
3	Indragiri Hilir	25	24.0
4	Pelalawan	12	58.3
5	Siak	14	71.4
6	Kampar	26	50.0
7	Rokan Hulu	19	52.6
8	Bengkalis	11	18.2
9	Rokan Hilir	15	6.7
10	Kepulauan Meranti	8	0
11	Kota Pekanbaru	19	68.4
12	Kota Dumai	9	55.6
Riau		195	41.0

4.11.5. OBAT UMUM

Pada Rifaskes 2011 data jenis obat umum yang dikumpulkan sebanyak 44 jenis. Tabel 4.11.5.1. menunjukkan persentase Puskesmas menurut ketersediaan Pelayanan obat umum.

Di Provinsi Riau, persentase Puskesmas yang mempunyai 80-100 persen ketersediaan pelayanan obat umum adalah 29,2 persen. Kabupaten/Kota yang memiliki ketersediaan pelayanan obat umum Tertinggi di Kabupaten Indragiri hilir (68,0%), kemudian Kabupaten Siak (57,1%) kemudian Kabupaten Bengkalis (54,5%).

Tabel 4.11.5.1.
Persentase Puskesmas menurut Kelengkapan Ketersediaan Obat Umum di
Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Skor Ketersediaan Obat Umum				
			80-100%	60-79%	40-59%	20-39%	< 20%
1	Kuantan Singingi	21	9.5	81.0	9.5	9.5	0
2	Indragiri Hulu	16	18.8	75.0	6.3	6.3	0
3	Indragiri Hilir	25	68.0	32.0	0	0	0
4	Pelalawan	12	33.3	66.7	0	0	0
5	Siak	14	57.1	42.9	0	0	0
6	Kampar	26	23.1	73.1	3.8	3.8	0
7	Rokan Hulu	19	10.5	84.2	5.3	5.3	0
8	Bengkalis	11	54.5	45.5	0	0	0
9	Rokan Hilir	15	26.7	66.7	0	0	6.7
10	Kepulauan Meranti	8	12.5	87.5	0	0	0
11	Kota Pekanbaru	19	15.8	84.2	0	0	0
12	Kota Dumai	9	11.1	66.7	22.2	22.2	0
Riau		195	29.2	66.7	3.6	3.6	0.5

Di Provinsi Riau, persentase Puskesmas yang mempunyai 60-79 persen pelayanan obat umum adalah 66,7 persen. Tertinggi di Kota Prabumulih memiliki ketersediaan pelayanan obat umum 60-79 persen (87,5%), kemudian diikuti Kota Pekanbaru dan kabupaten Rokan hulu, masing-masing 84,2 persen. Sementara puskesmas terendah yang memiliki ketersediaan pelayanan obat umum 60-79 persen yaitu Kabupaten Indragiri hilir (32,0 %), Kabupaten siak (42,9%), dan Kabupaten Bengkalis (45,5%).

Persentase Puskesmas yang mempunyai 40-59 persen pelayanan obat umum Di Provinsi Riau adalah 3,6 persen. Kabupaten yang puskesmasnya memiliki ketersediaan pelayanan obat umum 40-59 terbanyak adalah Kota dumai (22,2%), Kabupaten Kuantan Sengingi (9,5%), dan Kabupaten Indragiri hulu (6,3%). Sementara puskesmas PONE D di 7 Kabupaten/Kota tidak ada yang memiliki ketersediaan pelayanan obat umum 40-59 persen (0%), yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kep. Meranti, dan Kota Pekanbaru.

4.11.6. OBAT PONE D

Pada Rifaskes 2011 data jenis obat PONE D yang dikumpulkan sebanyak 17 jenis. Tabel 4.11.6.1. menunjukkan persentase Puskesmas menurut ketersediaan Jenis obat PONE D. Di Provinsi Riau, persentase Puskesmas yang mempunyai 80-100 persen Jenis obat PONE D 0 persen.

Tabel 4.11.6.1.

Persentase Puskesmas Perawatan Poned menurut Kelengkapan Ketersediaan Obat Poned di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Skor Ketersediaan Obat Poned				
			80-100%	60-79%	40-59%	20-39%	< 20%
1	Kuantan Singingi	4	0	0	0	25.0	75.0
2	Indragiri Hulu	0	0	0	0	0	0
3	Indragiri Hilir	3	0	0	0	33.3	66.7
4	Pelalawan	1	0	0	100	0	0
5	Siak	0	0	0	0	0	0
6	Kampar	2	0	0	50.0	50.0	0
7	Rokan Hulu	5	0	0	20.0	40.0	40.0
8	Bengkalis	4	0	50.0	25.0	25.0	0
9	Rokan Hilir	2	0	0	0	50.0	50.0
10	Kepulauan Meranti	0	0	0	0	0	0
11	Kota Pekanbaru	0	0	0	0	0	0
12	Kota Dumai	1	0	0	0	0	100
Riau		22	0	9.1	18.0	31.8	40.9

Di Provinsi Riau, persentase Puskesmas yang mempunyai 60-79 persen Jenis obat Poned hanya 9,1 persen. Hanya Puskesmas Poned di Bengkalis yang memiliki ketersediaan 60-79 persen Jenis obat Poned (50,0%). Sementara 11 Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas Poned lainnya tidak mempunyai 60-79 persen Jenis obat Poned (0%).

Di Provinsi Riau, persentase Puskesmas yang mempunyai 40-59 persen Jenis obat Poned hanya 18,0 persen. Hanya Puskesmas Poned di Kabupaten Pelalawan (100%), Kampar (50,0%), Bengkalis (25,0%) dan Kabupaten Rokan Hulu (20,0) yang memiliki ketersediaan 60-79 persen Jenis obat Poned. Sementara 8 Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas Poned lainnya tidak mempunyai 40-59 persen Jenis obat Poned (0%).

Di Provinsi Riau, persentase Puskesmas yang mempunyai 20-39 persen Jenis obat Poned adalah 31,8 persen. Tertinggi di Kabupaten Kampar dan Rokan hilir (masing-masing 50,0% , Sementara 6 Kabupaten/kota mempunyai 20-39 persen Jenis obat Poned sebnyak (0%).

Di Provinsi Riau, persentase Puskesmas Poned yang mempunyai persediaan jenis obat Poned kurang dari 20 persen Jenis obat Poned (0-19%) adalah 40,9 persen. Seluruh Puskesmas Poned di KotaDumai (100%) hanya memiliki persediaan 0-19 persen Jenis obat Poned, kemudian Kabupaten KUantan Sengingi (75,0%) dan Kabupaten Indragiri hilir (66,7%). Sementara 7 Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas Poned lainnya tidak ada lagi yang mempunyai Jenis obat Poned kurang dari 20 persen (0%0).

4.11.7. OBAT/ALAT KELUARGA BERENCANA (KB)

Pada Rifaskes 2011 data jenis obat/Alat KB yang dikumpulkan sebanyak 11 jenis. Tabel 4.11.7.1, menunjukkan persentase Puskesmas menurut ketersediaan Jenis Obat/Alat KB.

Secara nasional, persentase Puskesmas yang mempunyai 80 persen atau lebih Jenis Obat/Alat KB adalah 8,2 persen. Tertinggi di Kabupaten Kampar (19,2%), kemudian Kabupaten Kep. Meranti (12,5%) dan Kabupaten Indragiri hilir (12,0%). Terdapat 4 Kabupaten/Kota yang puskesmasnya tidak mempunyai 80 persen atau lebih jenis obat/alat KB (0%) yaitu Kabupaten Kuantan seningi, Indragiri hulu, Bengkalis dan kota dumai.

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang mempunyai 60-79 persen Jenis Obat/Alat KB adalah 5,1 persen. Tertinggi di Kabupaten Kuantan Sningi (14,3%), kemudian Kabupaten Kampar (11,5%) dan Kabupaten Bengkalis (9,1%). Terdapat 6 Kabupaten dan Kota yang puskesmasnya tidak mempunyai 60-79 persen jenis obat/alat KB (0%) yaitu Kabupaten Pelalawan, Siak, Rokan hili, Kep Meranti, kota pekanbaru dan kota dumai.

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang mempunyai 40-59 persen Jenis Obat/Alat KB adalah 25,6 persen. Tertinggi di Kabupaten Bengkalis (45,5%), kemudian Kabupaten Kampar (42,3%) dan Kabupaten Rokan Hulu (36,8%). Terendah di Kabupaten Kuantan seningi (4,8%), kemudian Kabupaten Rokan hilir (13,3%) dan Kabupaten Indragiri hilir (16,0%).

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang mempunyai 20-39 persen Jenis Obat/Alat KB adalah 36,9 persen. Tertinggi di Kabupaten Kuantan Sningi (71,4%), kemudian Kota Dumai (55,6%) dan Kabupaten Rokan Hilir (46,7%). Terendah di Kabupaten kampar (15,4%), kemudian Kabupaten Pelalwan dan Kep. Meranti (25,0%).

Secara provinsi, persentase Puskesmas yang mempunyai 0-19 persen Jenis Obat/Alat KB adalah 24,1 persen. Tertinggi di Kota Pekanbaru (42,1%), kemudian Kabupaten Pelalawan (41,7%) dan Kabupaten Kep.Meranti (37,5%). Terendah di Kabupaten Rokan Hulu (5,3%) kemudian Kabupaten Kuantan seningi (9,5%) dan Kota Dumai (11,10%).

Tabel 4.11.7.1.

Persentase Puskesmas Menurut Kelengkapan Ketersediaan Obat/Alat KB
Di Provinsi Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Skor Ketersediaan Obat/Alat KB				
			80-100%	60-79%	40-59%	20-39%	< 20%
1	Kuantan Singingi	21	0	14.3	4.8	71.4	9.5
2	Indragiri Hulu	16	0	6.3	25.0	37.5	31.3
3	Indragiri Hilir	25	12.0	4.0	16.0	32.0	36.0
4	Pelalawan	12	8.3	0	25.0	25.0	41.7
5	Siak	14	7.1	0	35.7	35.7	21.4
6	Kampar	26	19.2	11.5	42.3	15.4	11.5
7	Rokan Hulu	19	10.5	5.3	36.8	42.1	5.3
8	Bengkalis	11	0	9.1	45.5	27.3	18.2
9	Rokan Hilir	15	6.7	0	13.3	46.7	33.3
10	Kepulauan Meranti	8	12.5	0	25.0	25.0	37.5
11	Kota Pekan Baru	19	10.5	0	15.8	31.6	42.1
12	Kota Dumai	9	0	0	33.3	55.6	11.1
Riau		195	8.2	5.1	25.6	36.9	24.1

BAB V

KESIMPULAN

Rifaskes Puskesmas 2011 telah menghasilkan gambaran input dan proses upaya kesehatan Puskesmas yang sangat kaya, rinci dan cukup valid untuk membuat gambaran atau potret fasilitas kesehatan di Puskesmas mulai dari tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota maupun individual Puskesmas.

Pada prinsipnya ditemukan bahwa komponen-komponen input (terutama SDM, sarana dan prasarana) dan proses (terutama kegiatan, pembinaan, supervisi dan monitoring) dari pelayanan kesehatan di Puskesmas masih belum seperti yang diharapkan. Unsur output sulit untuk dinilai karena validitas data output yang umumnya berdasarkan catatan dan laporan Puskesmas banyak yang kurang lengkap baik konsistensi bulan pelaporan maupun isi dari variabel yang dilaporkan.

Pada unsur input upaya kesehatan Puskesmas ditemukan bahwa baik kuantitas dan kualitas SDM, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, serta obat dan alat kesehatan yang saat ini ada di Puskesmas masih dibawah standar yang telah ditentukan. Ditemukan juga terjadi kesenjangan *supply* dan *demand* dari unsur input upaya kesehatan Puskesmas. Disamping itu digambarkan pula adanya disparitas unsur input upaya kesehatan Puskesmas antar Regional dan Provinsi, serta dimungkinkan juga antar Kabupaten/Kota maupun individual Puskesmas. Selanjutnya dapat disimpulkan juga bahwa penyediaan sarana, prasarana, dan SDM yang sesuai dengan ketiga fungsi Puskesmas (pelayanan kesehatan dasar, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, dan pembangunan berwawasan kesehatan) masih belum diperhatikan dengan semestinya.

Di Provinsi Riau, dari 195 Puskesmas, 100% Puskesmas memiliki tenaga dokter, 19,5% tidak memiliki dokter gigi, 0,5% tidak memiliki perawat, dan 0,5% tidak memiliki tenaga bidan. 31,8% Puskesmas di Provinsi Riau tidak memiliki tenaga gizi, 34,4% tidak memiliki sanitarian, dan 77,4% tidak memiliki tenaga promkes.

Dari sudut sarana prasarana, ditemukan bahwa 73,3% bangunan Puskesmas berada dalam kondisi rusak sedang dan berat dan 12,3% Puskesmas memiliki jenis bangunan semi permanen/tidak permanen, sarana air bersih hanya dimiliki oleh 55,4% Puskesmas dan 30,8% Puskesmas tidak mempunyai listrik 24 jam.

Sekitar 13,8% Puskesmas di Provinsi Riau memiliki kelengkapan alkes poliklinik umum kurang dari 20% jumlah standar alkes poliklinik umum (56 alat). Sebanyak 13,6% Puskesmas PONEC memiliki kelengkapan obat PONEC kurang dari 20%. Hanya 4,5% Puskesmas PONEC yang memiliki kelengkapan obat PONEC $\geq 80\%$ lengkap.

Pada unsur proses upaya kesehatan Puskesmas, terjadi kesenjangan kelengkapan dan kualitas kegiatan, pelaksana program, pembinaan, monitoring dan supervisi program Puskesmas dibanding dengan standar yang sudah ditentukan dan disepakati. Ditemukan juga disparitas proses upaya kesehatan Puskesmas tersebut diatas antar Kabupaten/Kota maupun individual Puskesmas. Sebagai contoh, walaupun sebanyak 97,9% Puskesmas telah memiliki

Dokumen Perencanaan Tahunan dan 77,9% telah melaksanakan Lokakarya Mini Bulanan, tetapi hanya 52,8% dari mereka yang melaksanakan Lokakarya Mini Tiga Bulanan.

Dilihat dari input dan proses yang menunjang tiga fungsi Puskesmas, maka input dan proses yang mendukung keberhasilan fungsi Puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan fungsi Puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan masih jauh dari harapan. Hanya 45,6% Puskesmas di Provinsi Riau yang memiliki petugas didalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat. Disamping itu pelatihan yang dibutuhkan untuk fungsi tersebut kepada tenaga pelaksananya kurang sekali dilakukan, hanya 24,1% petugas yang dilatih untuk kegiatan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Khusus untuk pencapaian MDG's, maka input dan proses program wajib kesehatan ibu dan anak, terutama program PONED, masih jauh dibandingkan standar minimal yang harus dipenuhi. Hanya 15,5% Puskesmas di Provinsi Riau yang merupakan Puskesmas PONED, dimana 4,1% diantaranya adalah Puskesmas PONED Non Perawatan.

Dalam manajemen pelaksanaan Rifaskes Puskesmas 2011, telah pula dilakukan validasi proses dan substansi Rifaskes Puskesmas 2011 (bersama-sama dengan RSU Pemerintahan dan Laboratorium Klinik Mandiri), oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, UNAIR dan UNHAS. Hasil validasi menunjukkan bahwa lebih dari 80% langkah-langkah proses Rifaskes Puskesmas 2011 dilaksanakan sesuai proposal, pedoman, instrumen Rifaskes Puskesmas 2011 dan Rifaskes 2011 secara umum. Demikian pula variabel yang dihasilkan oleh Rifaskes 2011, 80% sesuai dengan hasil validasi yang dilakukan oleh ketiga Universitas tersebut diatas.

BAB VI

SARAN-SARAN

1. Perlu dilakukan analisis lanjut terhadap data yang dihasilkan oleh Rifaskes Puskesmas 2011, baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
2. Dari hasil Rifaskes Puskesmas 2011, jelas sudah diketahui semua permasalahan dan kekurangan unsur input dan proses upaya kesehatan Puskesmas di seluruh Indonesia, termasuk juga di Provinsi Riau. Dengan demikian intervensi dan perbaikan pada unsur input dan proses upaya kesehatan Puskesmas telah tergambarkan secara jelas dan gamblang tanpa harus membuat intervensi baru.
3. Perlu mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hasil Rifaskes 2011 untuk masukan perencanaan kesehatan tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk itu sebaiknya ada perencanaan yang terpadu didalam penggunaan dana yang sudah tersedia, baik Dana Dekonsentrasi, DAK, DAU, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan BLN.
4. Untuk perencanaan Provinsi perlu memprioritaskan masalah-masalah input dan proses yang ditemukan dari hasil data Rifaskes 2011 sehingga spesifikasi daerah bisa nampak dan efisiensi penggunaan dana bisa terjadi. Prioritas input dan proses ini akan lebih baik lagi apabila dimulai dari tingkat Kabupaten/Kota.
5. Secara horisontal di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, perencanaan program-program Puskesmas tidak mungkin sempurna apabila tidak dilakukan secara komprehensif, terpadu, dan terintegrasi antar Ditjen, Bidang dan unsur-unsur terkait yang kewenangannya secara berbeda-beda ada pada mereka, namun berhubungan erat sekali dengan program kesehatan prioritas.
6. Secara vertikal perlu kejelasan dan komitmen yang sungguh-sungguh terhadap kewenangan dan fungsi masing-masing level didalam pelaksanaan program-program kesehatan prioritas dengan integritas yang tinggi.
7. Khusus untuk pencapaian MDG's, perlu diprioritaskan, ditekankan, dan diperkuat program PONED di seluruh Indonesia, terutama daerah DTPK.
8. Pemenuhan dan pengembangan input dan proses upaya Puskesmas yang menunjang ke tiga fungsi utama Puskesmas yaitu sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berwawasan kesehatan perlu mendapatkan prioritas tinggi.
9. Kesenjangan geografi, perdesaan/perkotaan dari input dan proses upaya kesehatan Puskesmas harus segera dipikirkan pemecahannya dengan meningkatkan integritas dan kejelasan pembagian peran antara Kementerian Kesehatan, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota.

10. Untuk kepentingan persiapan BPJS, maka sudah jelas bahwa dari hasil Rifaskes Puskesmas 2011, perlu segera memperbaiki atau memenuhi kekurangan unsur input dan proses upaya kesehatan Puskesmas dengan segera pada tahun 2013 seoptimal mungkin. Tanpa hal ini dilaksanakan, maka akan diragukan keberhasilan pelaksanaan BPJS yang akan dimulai pada tahun 2014 mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Pengisian Kuesioner Puskesmas Riset Fasilitas Kesehatan, 2011
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar Indonesia (Riskesdas), 2007
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium di Indonesia 2010*, 2010
- Blum, H.L. *Planning for Health*, 2nd Edition. Human Sciences Press, 1981
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 Tentang Sistem Kesehatan Nasional, 2009
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2004
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota, 2008
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, 2008
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil, 2007
- Donabedian, Avedis. *Explorations in Quality Assessment and Monitoring. Vol I. The Definition of Quality and Approaches to its Assessment, 1980; Vol.II. The Criteria and Standards of Quality. 1982; Vol. III The Methods and Findings of Quality Assessment and Monitoring: An Illustrated Analysis. Ann Arbor: Health Administration Press, 1985.*
- Jakab, M., Preker, A., Harding, A. and Hawkins, L. *The Introduction of Market Forces in The Public Hospital Sector. From New Public Sector Management to Organizational Reform. Health, Nutrition and Population (HNP) Discussion Paper, the World Bank, 2002*
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.01/160/2010 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2010-2014, 2010

Republik Indonesia. Instruksi Presiden No 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, 2010

Republik Indonesia. Instruksi Presiden No 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, 2010

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 2007

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, 2010

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 2011

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 2009

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 2004

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 2009

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 2009

LAMPIRAN

**SUSUNAN TIM
RIFASKES 2011
PROVINSI RIAU**

LAMPIRAN

KUESIONER

RIFASKES PUSKESMAS 2011